

# DAFTAR ISI

**Jurnal Regional Planning**

**VOL 1 NO 1 FEBRUARI 2019**

<b>Pengaruh Persepsi, Perilaku, Dan Sosial Budaya Masyarakat Terhadap Pelestarian Hutan Diklat Pondok Buluh Kecamatan Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun .....</b>	<b>1- 12</b>
Charles Hadi Parmian Sihotang, Marto Silalahi, Robert Tua Siregar, Jhonson Marbun	
<b>Kualitas Pelayanan Publik Dalam Peningkatan Kinerja Di Kantor Lurah Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar .....</b>	<b>13 - 30</b>
Handrico Eldorado Dobona Purba, Robert Tua Siregar, Sarintan E Damanik, Mustafa Ginting	
<b>Pengaruh Pelatihan, Budaya Organisasi, Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, Dan Aset Kabupaten Simalungun .....</b>	<b>31 - 38</b>
Marulitua Tambunan, Marihot Manullang, Robert Tua Siregar, Sarintan E Damanik	
<b>Dampak Perusahaan Kelapa Sawit PTPN - IV Terhadap Kesejahteraan Sosial Masyarakat Dalam Pembaangunan Wilayah Di Desa Kedai Damar Kecamatan Pabatu Kabupaten Serdang Badagei .....</b>	<b>39 - 53</b>
M Agus Nurlanda Siregar, Marihot Manullang, Robert Tua Siregar, Sarintan E Damanik	
<b>Dampak Relokasi Pusat Pemerintahan Terhadap Efisiensi Pelayanan Masyarakat Dan Pengembangan Wilayah Kabupaten Simalungun .....</b>	<b>54 - 66</b>
Ridwan Toni Purba, Marihot Manullang, Robert Tua Siregar, Sarintan E Damanik	

**PENGARUH PERSEPSI, PERILAKU, DAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT  
TERHADAP PELESTARIAN HUTAN DIKLAT PONDOK BULUH KECAMATAN  
DOLOK PANRIBUAN KABUPATEN SIMALUNGUN**

**Charles Hadi Parmian Sihotang<sup>1</sup>, Marto Silalahi<sup>2</sup>, Robert Tua Siregar<sup>3</sup>, Jhonson Marbun<sup>4</sup>**  
Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota  
Program Pascasarjana Universitas Simalungun

**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh persepsi, perilaku dan sosial budaya masyarakat terhadap pelestarian Hutan Diklat Pondok Buluh, Kecamatan Dolok Panribua, Kabupaten Simalungun. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: (1) observasi, (2) wawancara, (3) questioner/angket dan (4) dokumentasi. Selanjutnya teknik analisis data dilakukan dengan (1) analisis deskriptif dan (2) analisis regresi. Hasil penelitian melalui penyebaran kuisioner terhadap 100 orang responden, terkait pengaruh persepsi masyarakat terhadap pelestarian Hutan Diklat Pondok Buluh adalah ada pengaruh yang signifikan antara variabel persepsi masyarakat terhadap pelestarian hutan diklat Pondok Buluh; sedangkan pengaruh perilaku masyarakat terhadap pelestarian hutan diklat Pondok Bulu menunjukkan bahwa tingkat korelasi antara perilaku dengan pelestarian hutan Pondok Buluh berpengaruh positif; demikian juga dengan pengaruh sosial budaya terhadap pelestarian hutan diklat Ponok Bulu diperoleh adanya pengaruh positif. Secara uji serempak variabel persepsi, perilaku dan social budaya masyarakat terhadap pelestarian hutan Pondok Buluh berpengaruh positif. Persamaan yang didapat dalam peneitian ini adalah  $Y = -19,412 + 1,112X_1 - 0,002X_2 - 0,780X_3$ . Pembahasan, hasil analisis regresi berganda yang dilakukan menunjukkan bahwa pengaruh persepsi, perilaku dan sosial budaya masyarakat terhadap pelestarian hutan Pondok Buluh terdapat pengaruh positif antara variabel persepsi, perilaku dan sosial budaya masyarakat terhadap pelestarian hutan Pondok Buluh. Saran, masyarakat memandang bahwa hutan harus tetap dijaga dan dilestarikan dan perlu adanya penguatan kapasitas lembaga baik lembaga pemerintah maupun lembaga masyarakat dalam rangka pelestarian hutan.

**Kata Kunci:** Persepsi, Perilaku, Sosial Budaya, Pelestarian Hutan

**ABSTRACT**

*The purpose of this research is to analyze the influence of perceptions, behavior and social culture of the community on the preservation of the Pondok Buluh Training Forest, Dolok Panribua District, Simalungun Regency. The research method used in this study is a quantitative method. While the data collection techniques in this study were: (1) observation, (2) interviews, (3) questionnaires and (4) documentation. Furthermore, data analysis techniques were carried out by (1) descriptive analysis and (2) regression analysis. The results of the research by distributing questionnaires to 100 respondents, regarding the influence of public perceptions of the preservation of the Pondok Buluh Training Forest, there is a significant influence between the variables of public perception of the preservation of the Pondok Buluh Training Forest; while the influence of community behavior on the preservation of the Pondok Bulu training forest shows that the level of correlation between behavior and the preservation of the Pondok Buluh forest has a positive effect; Likewise with the socio-cultural influence on the preservation of the Ponok Bulu training forest, it was found that there was a positive*

*influence. Simultaneously, the perception, behavior and socio-cultural variables of the community have a positive effect on the preservation of the Pondok Buluh forest. The equation obtained in this study is  $Y = -19.412 + 1.112X_1 - 0.002X_2 - 0.780X_3$ . Discussion, the results of the multiple regression analysis conducted show that the influence of perceptions, behavior and social culture of the community on the preservation of the Pondok Buluh forest has a positive influence between the variables of perception, behavior and social culture of the community on the preservation of the Pondok Buluh forest. Suggestions, the community views that forests must be maintained and preserved and it is necessary to strengthen the capacity of institutions, both government agencies and community institutions in the context of forest conservation*

*Keyword : Perception, Behavior, Socio-Cultural, Forest Conservation*

## PENDAHULUAN

Tertuang dalam Undang - Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Hutan merupakan suatu kumpulan tumbuhan dan juga tanaman, terutama pepohonan atau tumbuhan berkayu lain, yang menempati daerah yang cukup luas.

Selain itu, hutan juga merupakan bagian dari lingkungan hidup manusia yang sangat vital dan mempunyai fungsi ekologi yang sangat penting, antara lain fungsi hidrologis, menyimpan sumberdaya genetic, pengatur kesuburan tanah dan iklim serta menyerap karbon (*carbon silk*). Hutan juga mempunyai fungsi ekonomi yaitu sebagai pemasok hasil hutan berupa kayu dan non kayu dan fungsi social lain yaitu penyerapan lapangan kerja dan dapat meningkatkan kesejahteraan.

Sejak dahulu hutan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan manusia, hal ini dapat kita ketahui bahwa hutan merupakan sumber bahan makanan serta tempat berlindung. Seiring dengan perubahan akal pikiran manusia, manusia mulai membudidayakan tumbuh-tumbuhan dan hewan yang dibutuhkan sehingga dapat menjamin sumber makanan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan pesatnya perkembangan jumlah penduduk, teknologi dan industri dan berlangsung secara terus menerus menimbulkan dampak positif dan dampak negati dalam berbentuk pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Hutan sebagai suatu kesatuan ekosistem dalam kehidupan memberikan banyak manfaat terhadap kelangsungan hidup manusia dari jaman dulu sampai sekarang. Semua spesies yang berada di hutan mempunyai nilai ekonomi bagi masyarakat setempat dan berpotensi menjadi gudang sumberdaya genetis bagi tanaman pertanian. Disamping itu, hutan dan masyarakat lokal memiliki hubungan dan interaksi yang bersifat sosio-kultural. Kedekatan masyarakat secara fisik dan emosional akan melahirkan pengetahuan mengenai hutan itu sendiri sehingga menciptakan kearifan tradisional. Kearifan tradisional yang merupakan modal sosial masyarakat lokal dapat digunakan sebagai landasan untuk pengelolaan sumberdaya hutan.

Kontribusi hasil hutan non-kayu terhadap perekonomian nasional dan regional sulit ditentukan karena kurangnya sistem untuk melacak nilai yang dihasilkan dari sekian banyaknya jenis produk yang mampu dihasilkan dari hasil hutan non-kayu. Namun beberapa komoditas seperti sirup maple mampu diketahui karena merupakan komoditas ekspor yang

diproduksi secara besar-besaran, mencapai 1,400,000 US gallon (5,300 m<sup>3</sup>) dengan nilai 38,3 juta US\$ di Amerika Serikat. Selain itu, di hutan iklim sedang dihasilkan berbagai jamur. Jamur yang terkenal dihasilkan dari hutan jenis ini adalah jamur matsutake yang juga bernilai ekonomi tinggi. Tanaman obat seperti ginseng serta sayuran seperti sala dan tumbuhan paku juga bernilai ekonomi tinggi. Namun tingkat keekonomian hasil hutan non-kayu bervariasi seiring dengan beragamnya hasil hutan non-kayu di tempat yang berbeda (Soerawidjaja, 2005).

Penguasaan dan pengelolaan sumberdaya hutan pada masyarakat lokal, baik yang berada di dalam ataupun di sekitar hutan merupakan suatu produk kebudayaan yang menjadi tata nilai tersendiri. Dengan segala kemampuan yang dimiliki, masyarakat melihat, memahami, memilah-milah gejala untuk kemudian merencanakan tindakan dan menentukan sikap serta perbuatan dalam memanfaatkan sumberdaya hutan. Hak dari sumberdaya hutan diperoleh karena hubungan jangka panjang antara hutan sebagai tempat menggantungkan hidup dengan masyarakat itu sendiri. Kewajiban untuk mengelola hutan secara berkesinambungan diharapkan dapat menjadi respon balik dari masyarakat lokal setelah memanfaatkan apa yang sudah disediakan oleh alam.

Masyarakat sekitar hutan kehidupannya sangat bergantung pada keberadaan hutan. Terdapat jutaan masyarakat pedesaan yang tinggal di sekitar hutan kehidupannya tergantung kepada produksi dan juga hasil hutan. Sayangnya sampai dengan saat ini banyak penelitian menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat sekitar hutan pada umumnya tidak jauh dari kesan kemiskinan, keterbelakangan, kualitas hidup yang pas - pasan, dan hal - hal lain yang menunjukkan betapa kondisi masyarakat sekitar hutan selalu berada dalam keadaan yang memprihatinkan.

Keberadaan masyarakat lokal yaitu masyarakat Pondok Buluh sekitar hutan memiliki ketergantungan terhadap sumberdaya hutan yang berupa manfaat lahan untuk pertanian, sumber kayu dan sumber air untuk masyarakat lokal. Masyarakat memanfaatkan sumberdaya hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dan penambahan penghasilan. Masyarakat Pondok Buluh yang tinggal disekitar hutan bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani. Sistem pertanian masyarakat lokal dikenal dengan sistem pertanian "mar-huma" (berladang).

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana persepsi, perilaku dan sosial budaya masyarakat terhadap pelestarian hutan diklat di Pondok Buluh Kecamatan Panribuan Kabupaten Simalungun.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Seperti yang dijelaskan oleh (Creswell, 2014) bahwa penelitian kuantitatif merupakan pendekatan untuk menguji teori objektif dengan menguji hubungan antar variabel. Variabel ini, pada gilirannya, dapat diukur dengan menggunakan instrumen, sehingga data jumlah dapat dianalisis dengan menggunakan prosedur statistik. Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah: (1) observasi, (2) wawancara, (3) quesioner/angket dan (4) dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data dilakukan dengan (1) analisis deskriptif dan (2) analisis regresi.

---

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Secara geografis Hutan Diklat Pondok Buluh (HDPB) terletak diantara 99°56' BT s/d 99°00' s/d 99°00' BT dan antara 2°43' LU s/d 2°47' LU. Berdasarkan administratif pemerintahan, areal Hutan Diklat Pondok Buluh berada di Kecamatan Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara, sedangkan berdasarkan wilayah pemangkuan hutannya termasuk dalam pengelolaan wilayah Resor Polisi Hutan Tiga Dolok Dinas Kehutanan Kabupaten Simalungun. Dengan adanya penunjukan sebagai hutan pendidikan dan pelatihan ini, maka pengelolaannya berada di Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Pematangsiantar. Kawasan Hutan Diklat Pondok Buluh merupakan bagian hulu daerah Aliran Sungai (DAS). Sungai-sungai yang mengalir di wilayah ini adalah Bah Panomburan, Bah Pogos, Bah Kasindir dan Bah Lintong. Sungai-sungai tersebut mengalir tersebar merata ke seluruh wilayah hutan diklat dan selalu berair sepanjang tahun.

Untuk mendukung pengembangan wilayah KHDTK Pondok Buluh, maka diperlukan penataan areal yang dilakukan dengan membagi KHDTK dalam blok atau petak pengelolaan areal KHDTK. Pembagian blok ini disesuaikan dengan fungsi pokok kawasan yaitu untuk menghasilkan hutan yang memenuhi persyaratan sebagai laboratorium alam untuk menunjang kegiatan litbang dan diklat kehutanan. Disamping itu, pembagian blok KHDTK Pondok Buluh harus memperhatikan daya dukung lingkungan. Ini terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana sebagai penunjang pengelolaan. Potensi lansekap atau bentang alam, kelerangan, kepekaan erosi tanah dan curah hujan sangat mempengaruhi variabel abiotik daya dukung lingkungan. Hal ini disebabkan topografi di areal KHDTK Pondok Buluh yang berbukit-bukit atau bergelombang sangat rentan terhadap erosi/labil sehingga pembangunan pada unsur lansekap bernilai tinggi harus dikonservasi sedangkan unsur lansekap bernilai rendah dapat dimanfaatkan untuk area pembangunan infrastruktur.

Blok pembangunan infrastruktur seperti jalan masuk asrama, asrama hutan diklat, *workshop*, perumahan pegawai, dan *camping ground* di areal yang memiliki lansekap rendah. Sedangkan untuk pembagian blok lainnya seperti blok pemanfaatan getah pinus, habitat burung rangkong, blok konservasi tanah, habitat kera ekor panjang, blok pengembangan sampinur, blok pengamatan burung, habitat trenggiling, blok pemberdayaan masyarakat, *agroforestry*, demplot aren, habitat beruang madu, habitat anggrek dan ekowisata, blok resolusi konflik, jalur *tracking*, dan blok pengembangan meranti disesuaikan dengan sebaran potensi satwa dan tumbuhan.

### Persepsi Masyarakat

Persepsi manusia terhadap lingkungan (*environmental perception*) merupakan persepsi spasial yakni sebagai interpretasi tentang suatu *setting* (ruang) oleh individu yang didasarkan atas latar belakang, budaya, nalar dan pengalaman individu tersebut. Manusia menginderakan objek di lingkungannya, ia memproses hasil pengindraannya dan timbul makna tentang objek pada diri manusia yang bersangkutan yang dinamakan persepsi yang selanjutnya menimbulkan reaksi terhadap lingkungan terutama dikawasan Pondok Buluh.

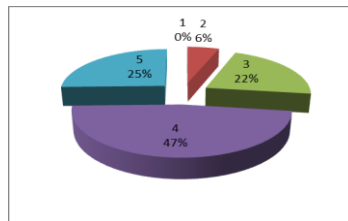
Dari hasil wawancara diketahui bahwa sebagian besar responden mempunyai persepsi tahu terhadap pelestarian hutan Pondok Buluh (47,40%) sedangkan sebagian lainnya memiliki persepsi sangat tahu (25,40%) diikuti kurang tahu (21,60%), dan tidak tahu (2,60%) (Tabel 1).

**Tabel 1. Persepsi Masyarakat Terhadap Pelestarian Hutan Pondok Buluh**

No	Uraian	f	%
1.	Tidak mau tahu	-	-
2.	Tidak tahu	28	5,60
3.	Kurang tahu	108	21,60
4.	Tahu	237	47,40
5.	Sangat tahu	127	25,40
<b>Jumlah</b>		<b>500</b>	<b>100</b>

Sumber: Data primer diolah tahun 2016

Sebagian besar responden memandang bahwa hutan harus tetap dijaga dan dilestarikan. Hal ini ditunjukkan dengan pengetahuan yang cukup tentang fungsi hutan, adanya undang-undang kehutanan dan mereka mau mendengar penyampaian informasi jika ada undang-undang yang baru yang mereka belum tahu. Responden juga tahu hak dan kewajiban mereka dalam pemanfaatan hasil hutan khususnya hasil hutan bukan kayu (HHBK). Disamping itu, responden sangat tahu konsekuensi yang dapat ditimbulkan akibat aktifitas masyarakat terhadap lingkungan. Persepsi masyarakat sekitar Hutan Diklat Pondok Bulu dapat dilihat pada Gambar berikut:



**Gambar 1. Persepsi Masyarakat Terhadap Pelestarian Hutan Diklat Pondok Buluh**

Hasil analisis regresi mengenai persepsi masyarakat terhadap pelestarian hutan Pondok Buluh, dalam hal ini R yang menunjukkan korelasi, yaitu korelasi/hubungan antara lima variabel bebas terhadap variabel terikat. Angka R yang didapat .917<sup>a</sup> (lampiran 2) artinya adanya hubungan yang sangat erat antara variabel persepsi masyarakat terhadap pelestarian hutan Pondok Buluh, karena nilai yang dimiliki 0,974.

*R Square* ( $R^2$ ) atau kuadrat R menunjukkan koefisien determinasi, besar  $R^2$  sebesar 0,842 artinya bahwa persepsi masyarakat berpengaruh sebesar 84,2 terhadap pelestarian hutan Pondok Buluh. Variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat sebesar 84%.

Hasil dari perhitungan SPSS dengan menggunakan analisis regresi didapat nilai Beta yaitu 0,831, nilai tersebut menunjukkan bahwa tingkat korelasi antara persepsi dengan pelestarian hutan Pondok Buluh berpengaruh positif. Korelasi persepsi masyarakat terhadap pelestarian hutan Pondok Buluh dapat dilihat pada Tabel berikut

**Tabel 2. Analisis Regresi Persepsi Masyarakat Terhadap Pelestarian Hutan Pondok Buluh**

Model				t	Sig.	95.0% Confidence Interval for B		Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound	Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1 (Constant)	-60.012	110.231		-.544	.624	-410.815	290.791					

Persepsi Masyarakat (X1)	.831	.208	.917	3.993	.028	.169	1.493	.917	.917	.917	1.000	1.000
--------------------------	------	------	------	-------	------	------	-------	------	------	------	-------	-------

**Perilaku Masyarakat**

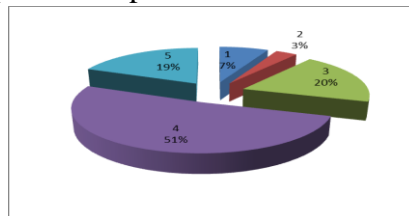
Hasil penelitian tentang perilaku menunjukkan bahwa masyarakat mengetahui tentang hutan, fungsi dan Undang - Undang yang mengaturnya serta menganggap keberadaannya perlu dijaga dan dipertahankan. Perilaku masyarakat berkaitan dengan aspek perilaku yaitu aktivitas masyarakat di kawasan hutan Pondok Buluh. Perilaku masyarakat terhadap pelestarian hutan Pondok Buluh dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel 3. Analisis Perilaku Masyarakat Terhadap Pelestarian Hutan Pondok Buluh**

No	Uraian	f	%
1.	Tidak mau tahu	36	7,20
2.	Tidak tahu	16	3,20
3.	Kurang tahu	97	19,40
4.	Tahu	257	51,40
5.	Sangat tahu	94	18,80
	<b>Jumlah</b>	<b>500</b>	<b>100</b>

Sumber: Data primer diolah tahun 2016

Dari Tabel di atas perilaku masyarakat terhadap pelestarian hutan Pondok Buluh sangat tahu sebanyak 94 sebesar 18,80% diikuti tahu sebesar 51,40%, kurang tahu 97 sebesar 19,40%, tidak tahu 16 sebesar 3,20% dan masyarakat tidak mau tau sebanyak 7,20%. Perilaku masyarakat dapat dilihat pada Gambar berikut:



**Gambar 2. Perilaku Masyarakat Terhadap Pelestarian Hutan Pondok Buluh**

Hasil analisis regresi mengenai perilaku masyarakat terhadap pelestarian hutan Pondok Buluh, dalam hal ini R yang menunjukkan korelasi, yaitu korelasi/ hubungan antara lima variable bebas terhadap variabel terikat. Angka R yang didapat .845<sup>a</sup> (lampiran 3) artinya adanya hubungan yang sangat erat antara variabel perilaku masyarakat terhadap pelestarian hutan Pondok Buluh, karena nilai yang dimiliki 0,845.

*R Square (R<sup>2</sup>)* atau kuadrat R menunjukkan koefisien determinasi, besar R<sup>2</sup> sebesar .714 artinya bahwa persepsi masyarakat berpengaruh sebesar 71,4 terhadap pelestarian hutan Pondok Buluh. Variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat sebesar 71%.

Hasil dari perhitungan SPSS dengan menggunakan analisis regresi didapat nilai Beta yaitu .745, nilai tersebut menunjukkan bahwa tingkat korelasi antara perilaku dengan pelestarian hutan Pondok Buluh berpengaruh positif. Korelasi perilaku masyarakat terhadap pelestarian hutan Pondok Buluh dapat dilihat pada Tabel berikut:



**Tabel 4. Analisis Regresi Perilaku Masyarakat Terhadap Pelestarian Hutan Pondok Buluh**

Model				t	Sig.	95.0% Confidence Interval for B		Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound	Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
(Constant)	-12.269	142.220		-.086	.937	-464.878	440.340					
1 Perilaku Masyarakat (X2)	.745	.272	.845	2.738	.071	-.121	1.612	.845	.845	.845	1.000	1.000

**Sosial Budaya Masyarakat**

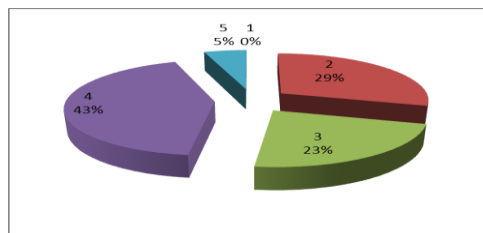
Kearifan lokal adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis. Semua bentuk kearifan lokal ini dihayati, dipraktekkan, diajarkan dan diwariskan dari generasi ke generasi sekaligus membentuk pola perilaku manusia terhadap sesama manusia. Sosial Budaya masyarakat dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 5. Analisis Sosial Budaya Masyarakat Terhadap Pelestarian Hutan Pondok Buluh**

No	Uraian	f	%
1.	Tidak mau tahu	0	0
2.	Tidak tahu	88	29,33
3.	Kurang tahu	68	22,67
4.	Tahu	128	42,67
5.	Sangat tahu	16	5,33
	<b>Jumlah</b>	<b>300</b>	<b>100</b>

Sumber: Data primer diolah tahun 2016

Dari Tabel di atas sosial budaya masyarakat terhadap pelestarian hutan Pondok Buluh sangat tahu sebanyak 16 (5,33%) diikuti tahu sebesar 128 (42,67%), kurang tahu sebesar 68 (22,67%), dan tidak tahu sebanyak 88 (29,33%). Sosial budaya masyarakat dapat dilihat pada Gambar berikut:



**Gambar 3. Sosial Budaya Masyarakat Terhadap Pelestarian Hutan Pondok Buluh**

Hasil analisis regresi mengenai sosial budaya masyarakat terhadap pelestarian hutan Pondok Buluh, dalam hal ini R yang menunjukkan korelasi, yaitu korelasi/hubungan antara tiga variable bebas terhadap variabel terikat. Angka R yang didapat .491<sup>a</sup> (lampiran 4) artinya adanya hubungan antara variabel social budaya masyarakat terhadap pelestarian hutan Pondok Buluh, karena nilai yang dimiliki 0,491

R Square (R<sup>2</sup>) atau kuadrat R menunjukkan koefisien determinasi, besar R<sup>2</sup> sebesar .241 artinya bahwa sosial budaya masyarakat berpengaruh sebesar 71,4 terhadap pelestarian hutan Pondok Buluh. Variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat sebesar 24 %.



Hasil dari perhitungan SPSS dengan menggunakan analisis regresi didapat nilai Beta yaitu .920, nilai tersebut menunjukkan bahwa tingkat korelasi antara sosial budaya dengan pelestarian hutan Pondok Buluh berpengaruh positif. Korelasi sosial budaya masyarakat terhadap pelestarian hutan Pondok Buluh dapat dilihat pada Tabel berikut

**Tabel 6. Analisis Regresi Sosial Budaya Masyarakat Terhadap Pelestarian Hutan Pondok Buluh**

Model			t	Sig.	95.0% Confidence Interval for B		Correlations			Collinearity Statistics		
	B	Std. Error			Beta	Lower Bound	Upper Bound	Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
(Constant)	87.865	243.474		.361	.742	-686.979	862.709					
1 Sosial Budaya (X3)	.920	.942	.491	.977	.401	-2.078	3.919	.491	.491	.491	1.000	1.000

### Persepsi, Perilaku dan Sosial Budaya

Dari Tabel 7 di bawah, persepsi, perilaku dan sosial budaya masyarakat terhadap pelestarian Hutan Pondok Buluh sangat tidak mau tahu, dan tidak tahu sebanyak 0%, diikuti kurang tahu sebanyak 2 (0,67%), tahu sebanyak 167 (55,67%), dan sangat tahu sebanyak 131 (43,67%). Persepsi, perilaku dan sosial budaya masyarakat dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut:

**Tabel 7. Persepsi, Perilaku dan Sosial Masyarakat Terhadap Pelestarian Hutan Pondok Buluh**

No	Uraian	f	%
1.	Tidak mau tahu	0	0
2.	Tidak tahu	0	0
3.	Kurang tahu	2	0,67
4.	Tahu	167	55,67
5.	Sangat tahu	131	43,67
	<b>Jumlah</b>	<b>300</b>	<b>100</b>

Sumber: Data primer diolah tahun 2016

Hasil analisis regresi berganda yang dilakukan menunjukkan bahwa pengaruh persepsi, perilaku dan social budaya masyarakat terhadap pelestarian hutan Pondok Buluh dalam hal ini R yang menunjukkan korelasi, yaitu korelasi/hubungan antara tiga variable bebas terhadap variabel terikat. Angka R yang didapat .959<sup>a</sup> (lampiran 5) artinya adanya hubungan yang sangat erat antara variabel persepsi, perilaku dan sosial budaya masyarakat terhadap pelestarian hutan Pondok Buluh, karena nilai yang dimiliki mendekati 1. Jika nilai sama dengan 1, maka hubungan sangat erat, dan sebaliknya jika mendekati 0, maka hubungan semakin lemah.

*R Square (R<sup>2</sup>)* atau kuadrat R menunjukkan koefisien determinasi, besar R<sup>2</sup> sebesar .920 artinya bahwa persepsi, perilaku dan social budaya masyarakat berpengaruh 0.92 terhadap pelestarian hutan Pondok Buluh. Variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat sebesar 92%.

Analisis yang menguji koefisien regresi secara bersama-sama adalah analisis varian atau yang disebut Anova, analisis ini berperan untuk menguji *signifikansi* pengaruh persepsi, perilaku dan sosial budaya masyarakat secara bersama-sama dengan menggunakan tingkat *signifikasi* sebesar 0,00. Hasil dari penelitian yang dilakukan mendapatkan nilai F sebesar 3.842 dengan *signifikansi* .355<sup>b</sup>, selanjutnya dilakukan uji F degan langkah - langkah : (a) Ho

= konstanta tidak berpengaruh terhadap pelestarian hutan, (b)  $H_a$  = konstanta berpengaruh terhadap pelestarian hutan, (c)  $F_{hitung}$  dan *signifikansi* dari output diperoleh  $F_{hitung}$  sebesar 0,00 dan *signifikansi* 0,000, (d) Penentuan  $F_{tabel}$  pada *signifikansi* 0,05 dengan df 1 (jumlah variabel-1) = 3 dan df 2 (n-k-1) atau 16-3-1=12 (n adalah jumlah data dan k adalah jumlah variabel bebas). Hasil yang diperoleh untuk  $F_{tabel}$  sebesar 0,118, dan (e)  $F_{hitung} < F_{tabel}$  (0,00 < 0,118) dan *signifikansi* < 0,05, maka  $H_a$  diterima.

Dapat disimpulkan bahwa persepsi, perilaku dan social budaya masyarakat terhadap pelestarian hutan Pondok Buluh berpengaruh. Hasil analisis Anova dalam regresi ganda dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 8. Analisis Koefisien Pada Regresi Ganda**

Faktor	Unstandardized coefficient		Standardized coefficient		Sig.
	B	Std. error	Beta	t	
(Constant)	-19.412	164.598		-.118	.925
Persepsi (X <sub>1</sub> )	1.112	1.451	1.228	.766	.584
Perilaku (X <sub>2</sub> )	-.002	1.743	-.003	-.001	.999
Sosial Budaya (X <sub>3</sub> )	-.780	1.240	-.416	-.629	.643

Tabel menjelaskan bahwa *Unstandardized coefficients* merupakan nilai koefisien yang tidak terstandarisasi atau tidak memiliki patokan. Koefisien B terdiri dari nilai konstan (harga Y jika X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub>, X<sub>3</sub>,... = 0) dan koefisien regresi (nilai yang menunjukkan peningkatan atau penurunan variabel Y yang didasarkan variabel X<sub>1</sub> dan X<sub>2</sub>). Nilai-nilai inilah yang dimasukkan dalam persamaan regresi linier berganda. Sedangkan, Std. Error adalah maksimum kesalahan yang dapat terjadi dalam memperkirakan rata-rata populasi berdasarkan sampel. Nilai ini untuk mencari  $t_{hitung}$  dengan cara koefisien dibagi *standard error*.

Persamaan yang didapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4$$

Atau

$$Y = -19,412 + 1,112X_1 - 0,002X_2 - 0,780X_3$$

Keterangan :

Y : Pelestarian Hutan Pondok Buluh

X<sub>1</sub> : Persepsi Masyarakat

X<sub>2</sub> : Perilaku Masyarakat

X<sub>3</sub> : Sosial Budaya Masyarakat

## PEMBAHASAN

Persepsi masyarakat tentang pelestarian hutan Pondok Buluh merupakan peristiwa atau hubungan yang merupakan pengalaman. Setiap individu berbeda walaupun yang diamati benar-benar sama. Persepsi masyarakat tentang kawasan hutan Pondok Buluh dapat diketahui melalui bagaimana pengetahuan mereka tentang hutan dan fungsi hutan tersebut bagi kehidupan mereka Masyarakat juga mengetahui fungsi-fungsi hutan. Menurut informan, kawasan hutan Pondok Buluh memiliki fungsi ekologis diantaranya mengatasi lahan kritis, memunculkan sumber air, mencegah bencana banjir dan tanah longsor dan konservasi tanah. Persepsi masyarakat tentang Pengelolaan hutan yang menyangkut peraturan dan perundang-

undangannya yaitu khususnya melalui penyuluhan, media massa, pengurus kelompok tani maupun pelatihan-pelatihan yang dilakukan instansi kehutanan. Penyuluhan dilakukan oleh Penyuluh Kehutanan. Informan mengakui bahwa kegiatan penyuluhan tentang hutan tersebut sangat bermanfaat, penting untuk diketahui masyarakat, dan relevan dengan kegiatan yang mereka kembangkan diksekitar kawasan Pondok Buluh.. Dengan kegiatan penyuluhan ini maka masyarakat menjadi lebih memahami arti penting keberadaan hutan di desanya. Materi dari penyuluhan selain mengenai peraturan tentang hutan rakyat diantaranya yaitu tentang pembibitan, manfaat hutan rakyat, pentingnya ketersediaan air, pelestarian hutan dan konservasi.

Pengetahuan masyarakat tentang hutan mereka dapat dari kegiatan penyuluhan oleh instansi pemerintah atau media massa. Secara umum fungsi hutan bagi masyarakat berfungsi sebagai penahan erosi dan menyediakan sumber mata air, di samping fungsi ekonomi dan sosial. Hutan menurut masyarakat sangat bermanfaat dalam mendukung kehidupan mereka. Masyarakat memandang bahwa hutan perlu dijaga dan dilestarikan agar tidak terjadi bencana longsor dan kekeringan. Sebagian besar masyarakat bermata pencaharian sebagai petani sehingga ketergantungan terhadap hutan dan ketersediaan air sangat tinggi. Hutan diperlukan agar air tetap ada meskipun pada musim kemarau.

Hasil penelitian tentang persepsi menunjukkan bahwa masyarakat mengetahui tentang hutan rakyat, fungsi dan Undang - Undang yang mengaturnya serta menganggap keberadaannya perlu dijaga dan dipertahankan. Perilaku masyarakat berkaitan dengan aspek persepsi, perilaku dan sosial budaya diantaranya adalah menjaga keberlangsungan hutan rakyat dengan menanam, memelihara, serta tidak melakukan kegiatan yang merusak hutan. Secara ekonomi hutan rakyat hasil hutan rakyat dapat memenuhi kebutuhan sendiri dan dipasarkan.

Perilaku Masyarakat terkait aspek perilaku, merupakan respon manusia berkenaan dengan persepsi dan kepribadiannya dalam proses interaksi dengan lingkungannya. Perilaku masyarakat ini dapat dilihat ada partisipasi masyarakat dalam kegiatan hutan rakyat, kerjasama dengan pihak terkait dan norma yang berlaku. Partisipasi masyarakat mencakup aktivitas masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan dengan tidak ikut merusak hutan.

Pelestarian hutan rakyat di Pondok Bulu tidak lepas dari peran perempuan. Dukungan ibu-ibu ini dalam keikutsertaan mereka dalam menjaga kelestarian hutan yaitu dengan mencari kayu bakar tanpa menebang pohon yang masih segar, tetapi mereka mengambil kayu bakar dengan mengambir ranting ataupun kayu yang sudah mati dan tumbang. Keterlibatan ini didominasi pada pemeliharaan tanaman bawah tegakan. Norma yang dianut masyarakat berkaitan dengan pelestarian lingkungan termasuk di dalamnya hutan rakyat yaitu pelarangan mengambil material dan satwa.

Aspek secara sosial adanya partisipasi aktif masyarakat, kelembagaan, kerjasama dengan instansi terkait dan norma yang berlaku. Secara budaya muncul yaitu perilaku menanam, berkumpul dan tebang butuh. Perilaku masyarakat berkaitan dengan memelihara pohon, memanen hasil hutan, serta tidak melakukan kegiatan yang merusak hutan seperti mengambil satwa, menebang pohon sembarangan dan membakar di kawasan hutan.

Norma tersebut bertujuan agar fungsi hutan sebagai tempat/ habitat hidup tanaman dan satwa serta mencegah tanah longsor dapat terjadi. Perilaku Masyarakat berkaitan dengan kearifan lokal

merupakan nilai-nilai yang dimiliki masyarakat dalam berinteraksi lingkungannya. Kearifan lokal adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis. Semua bentuk kearifan lokal ini dihayati, dipraktikkan, diajarkan dan diwariskan dari generasi ke generasi sekaligus membentuk pola perilaku manusia terhadap sesama manusia, alam maupun gaib.

Masyarakat Pondok Buluh memiliki kearifan lokal yang dianut warganya dan menjadi peraturan adat serta budaya masyarakat. Bentuk kearifan lokal yaitu tersebut diantaranya:

1. Larangan penebangan pohon pada lahan pemakaman kecuali melalui musyawarah
2. Larangan penebangan pohon pada lingkungan sumber-sumber mata air
3. Himbuan dari para leluhur bahwa setelah menebang pohon segera melakukan penanaman sebagai tanaman pengganti.
4. Bentuk kearifan lokal seperti larangan menebang pohon sembarangan, acara doa bersama anggota masyarakat ini sejalan dengan prinsip interaksi manusia dengan lingkungannya : prinsip hormat terhadap alam, prinsip *no harm*, prinsip tanggung jawab

Pelestarian hutan rakyat agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya tidak lepas dari persepsi dan perilaku dan sosial budaya masyarakat. Budaya yang muncul seiring dengan pelestarian hutan di Desa Pondok Buluh diantaranya:

- a. Perilaku menanam dan membudidayakan menanam melalui pendidikan lingkungan pada anak-anak serta pesan lingkungan yang disampaikan pada perkumpulan PKK, pertemuan kelompok tani atau partangiangan.
- b. Perilaku berkumpul dan berorganisasi yaitu aktif dalam menjaga kelestarian hutan Pondok Buluh, berinteraksi dan berdiskusi masyarakat
- c. Kerjasama para pihak (*stake holders*) dalam pengelolaan sumber daya alam. Kerjasama ini dilakukan Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pematangsiantar dengan instansi/dinas terkait, Perguruan Tinggi, masyarakat sekitar hutan diklat dan LSM. Dari hasil kerjasama tersebut, diharapkan masyarakat dapat lebih mengetahui potensi dari sumber daya alam khususnya hutan yang menjadi potensi utama desa, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pelestarian hutan, terjaganya kelestarian hutan diklat dan kesejahteraan masyarakat yang meningkat.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Persepsi masyarakat Pondok Buluh tentang hutan bahwa masyarakat memandang bahwa hutan harus tetap dijaga dan diletarikan. Masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup tentang hutan rakyat dan fungsi-fungsinya serta Undang-Undang/peraturan tentang hutan harus ditaati. Persepsi masyarakat terhadap pelestarian hutan Pondok Buluh berpengaruh positif.
2. Perilaku masyarakat yang berkaitan dengan aktivitas masyarakat di kawasan hutan Pondok Buluh bahwa tingkat korelasi antara persepsi dengan pelestarian hutan Pondok Buluh berpengaruh positif dan kelestarian hutan Pondok Buluh harus tetap terjaga.
3. Sosial budaya masyarakat dalam bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis. Semua bentuk kearifan lokal ini dihayati, dipraktikkan, diajarkan dan diwariskan dari generasi ke generasi sekaligus membentuk

pola perilaku manusia terhadap sesama manusia. Tingkat korelasi antara sosial budaya dengan pelestarian hutan Pondok Buluh berpengaruh positif.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Creswell, J. W. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*, 4 Edition. London: Sage
- Soerawidjaja, T. H. 2005. Potensi Sumber Daya Hayati Indonesia Dalam Menghasilkan Bahan Bakar Hayati Pengganti BBM. Makalah Lokakarya Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Energi Alternatif untuk Keberlanjutan Industri Perkebunan dan Kesejahteraan Masyarakat. Bandung, 28 Nopember 2005.
- Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

**KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DALAM PENINGKATAN KINERJA  
DI KANTOR LURAH BAH KAPUL KECAMATAN SIANTAR SITALASARI  
KOTA PEMATANGSIANTAR**

**Handrico Eldorado Dobona Purba<sup>1</sup>, Robert Tua Siregar<sup>2</sup>, Sarintan E Damanik<sup>3</sup>,  
Mustafa Ginting<sup>4</sup>**

Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota  
Program Pascasarjana Universitas Simalungun

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kualitas pelayanan publik dalam pembangunan wilayah di Kantor Lurah Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Sedangkan teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah: (1) observasi, (2) wawancara, (3) kuesioner/angket dan (4) dokumentasi. Selanjutnya teknik analisis data yang dilakukan adalah analisis kuantitatif. Hasil penelitian bahwa kinerja Kantor Lurah bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar dari aspek Responsivitas termasuk dalam tingkat Tinggi, aspek Responsibilitas termasuk dalam tingkat Sedang, aspek Akuntabilitas termasuk dalam tingkat Tinggi, aspek Keadaptasian termasuk dalam tingkat Tinggi, aspek Kelangsungan Hidup termasuk dalam tingkat Sedang, aspek Keterbukaan/transparansi termasuk dalam tingkat Sedang, aspek Empati termasuk dalam tingkat Sedang, aspek Efektivitas termasuk dalam tingkat Sedang, aspek Produktivitas termasuk dalam tingkat Tinggi, dari aspek Efisiensi termasuk dalam tingkat Tinggi, aspek Kepuasan termasuk dalam tingkat Tinggi, aspek Keadilan termasuk dalam tingkat Tinggi, aspek Keadilan termasuk dalam tingkat Tinggi. Kinerja Kantor Lurah Bah Kapul secara keseluruhan termasuk dalam kriteria tinggi. Kesimpulan Perlu dipertahankan pelayanan kinerja organisasi dari aspek proses yang meliputi indikator responsivitas, responsibilitas, akuntabilitas, keadaptasian, kelangsungan hidup, keterbukaan/transparansi, empati. Saran dari hasil penelitian perlu adanya peningkatan kinerja organisasi dari aspek hasil yang meliputi indikator efektivitas, produktivitas, efisiensi, kepuasan, keadilan agar pelayanan publik tetap bisa dilaksanakan semaksimal mungkin.

**Kata Kunci :** Pelayanan Publik, Kinerja, Kantor Lurah

**ABSTRACT**

*The purpose of this study was to analyze the quality of public services in regional development at the Bah Kapul Lurah Office, Siantar Sitalasari District, Pematangsiantar City. The research method used in this study is a quantitative method. While the techniques used in data collection are: (1) observation, (2) interviews, (3) questionnaires and (4) documentation. Furthermore, the data analysis technique used is quantitative analysis. The results of the study show that the performance of the Lurah Bah Kapul Office, Siantar Sitalasari District, Pematangsiantar City from the Responsiveness aspect is included in the High level, the Responsibility aspect is included in the Moderate level, the Accountability aspect is included in the High level, the Adaptability aspect is included in the High level, the Survival aspect is included in the Moderate level, the aspect of Openness/transparency is included in the Moderate level, the Empathy aspect is included in the Moderate level, the Effectiveness aspect is included in the Moderate level, the Productivity aspect is included in the High level, the Efficiency aspect is included in the High level, the Satisfaction aspect is included in the High level, the*

*Fairness aspect is included in the High level. High, the aspect of Justice is included in the High level. The overall performance of the Bah Kapul Lurah Office is included in the high criteria. Conclusion It is necessary to maintain organizational performance services from the process aspect which includes indicators of responsiveness, responsibility, accountability, adaptability, survival, openness/transparency, empathy. Suggestions from research results need to increase organizational performance from the aspect of results which include indicators of effectiveness, productivity, efficiency, satisfaction, fairness so that public services can still be carried out as much as possible*  
*Keyword : Public Service, Performance, Lurah Office*

## PENDAHULUAN

Pemerintah daerah sebagai daerah yang otonom mempunyai kebebasan yang luas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dan terus meningkat dari waktu ke waktu. Tuntutan tersebut semakin berkembang seiring dengan tumbuhnya kesadaran bahwa warga Negara memiliki hak untuk dilayani dan kewajiban pemerintah untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam memberikan pelayanan publik tidak hanya menciptakan sebuah pelayanan yang efisien, tetapi juga bagaimana agar pelayanan dapat dilakukan dengan tidak membedakan status masyarakat dan menciptakan pelayanan yang adil dan demokratis. Pemerintah Daerah dituntut untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pada hakekatnya penyelenggaraan otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah.

Format kebijakan otonomi daerah yang ada pada saat ini menandai awal dari suatu perubahan fundamental dalam paradigma penyelenggaraan pemerintahan di negeri ini. Kalau pada pemerintahan orde baru, pembangunan menjadi misi terpenting pemerintah (*developmentalism*) dan pemerintah yang pada masa itu menjadikan dirinya sebagai pusat kendali proses pembangunan itu (sentralisasi di tingkat nasional), kini harus mereposisi diri sebagai pelayan dan pemberdaya masyarakat dan harus menyebarkan aktivitasnya ke berbagai pusat (*plusentris*) di tingkat lokal. Dengan kata lain arus baru kehidupan politik kita sekarang adalah realitas pergeseran kekuasaan dari pusat (*sentral*) menuju lokus-lokus daerah (*desentral*) dan berbasis pada kekuatan masyarakat sendiri (*society*).

Dalam menghadapi era globalisasi yang penuh tantangan dan peluang, Pemerintah Daerah harus mampu untuk melakukan inovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik sehingga kesan birokrasi pemerintah yang lamban, berbelit - belit, kurang ramah dapat dihapuskan. Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan landasan untuk menerapkan prinsip-prinsip pelayanan dalam memenuhi kebutuhan dan kepuasan penerima pelayanan publik.

Pelayanan publik merupakan tanggungjawab pemerintah dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah, baik itu di pusat, di Daerah, dan dilingkungan Badan Usaha Milik Negara. Pelayanan publik berbentuk pelayanan barang publik maupun pelayanan jasa. Dewasa ini Masyarakat semakin terbuka dalam memberikan kritik bagi pelayanan publik. Oleh sebab itu substansi administrasi sangat



berperan dalam mengatur dan mengarahkan seluruh kegiatan organisasi pelayanan dalam mencapai tujuan. Salah satu bentuk pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat. Reformasi dibidang kesehatan dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan menjadikannya lebih efisien, efektif serta dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat yang optimal

Penyelenggaraan tugas pemerintahan dapat mencapai hasil yang baik, apabila adanya peningkatan kualitas profesionalisme pemimpin dan pegawainya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memegang teguh etika birokrasi, dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan tingkat kepuasan dan keinginan masyarakat. Pelayanan publik setiap unit organisasi Pemerintah di Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Stalasari mempunyai tugas pokok dan fungsi masing-masing untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, menjadi kewajiban pemimpin unit organisasi. Pemimpin unit organisasi mempunyai peranan yang sangat strategis guna mengarahkan, membimbing dan mendorong kinerja bawahan dalam pelaksanaan tugas yang telah digariskan oleh organisasi, sehingga pelayanan publik dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel.

Hal tersebut dapat diwujudkan, apabila pada setiap pemimpin unit organisasi menggunakan kepemimpinan yang efektif dan efisien. Pemimpin dan kepemimpinan organisasi pemerintah pada umumnya dan pemerintah Kelurahan pada khususnya menjadi perhatian utama publik baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Seiring dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman tersebut, diperlukan pemimpin yang berkualitas sehingga pelayanan publik dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara cepat, efektif dan akuntabel. Namun demikian sampai saat ini sebagian opini masyarakat menyatakan bahwa manajemen Pemerintah Kelurahan dinilai belum dapat melayani kebutuhan masyarakat secara optimal.

Berdasarkan pengamatan awal menunjukkan bahwa para pegawai dikantor Kelurahan Bah Kapul, Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai abdi masyarakat dalam melaksanakan pelayanan publik dilaksanakan secara baik. Hal ini disebabkan karena ada beberapa faktor yang membuat kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas mereka menjadi buruk yaitu faktor kemampuan para pegawai kelurahan dalam melakukan pelayanan publik serta kurang memadainya fasilitas dan teknologi yang ada di kantor Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar sehingga pelayanan menjadi terhambat, serta minimnya pelayanan komunikasi antara Pemimpin dan bawahan atau disebut dalam lingkup kelurahan Lurah sebagai Pemimpin (atasan) dan staf (bawahan) adapun faktor lainnya keterampilan yang dimiliki oleh pegawai di kantor kelurahan dalam menjalankan tugas, juga kedisiplinan lurah yang sangat lemah dalam mengawasi serta mengontrol pelaksanaan tugas yang dikerjakan, adapun kebiasaan pegawai yang tidak diketahui lurah sehingga pelayanan publik yang terjadi di kantor kelurahan menjadi buruk yaitu para pegawai yang pulang lebih awal sebelum jam kerja berakhir, serta pemungutan tarif yang selalu dilakukan pegawai selama melaksanakan pelayanan publik, hal tersebut membuat masyarakat yang membutuhkan bantuan pelayanan publik tidak dapat mengurus keperluan yang mereka butuhkan dan tidak dapat diselesaikan dengan secepatnya sehingga harus menunggu berhari-hari mendapatkan pelayanan dari kelurahan. Selain itu terjadi tumpang tindih terhadap Tugas pokok dan

Fungsinya terhadap tugas yang diemban oleh Pegawai yang berada di Kelurahan Bah Kapul. Hal ini mengakibatkan terjadi penumpukan pekerjaan terhadap 1(satu) orang sedangkan yang lain tidak melakukan pekerjaan apapun.

Sebagai Lurah Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar, haruslah perlu bersikap proaktif dan tegas serta lebih lagi melakukan pengawasan terhadap para pegawai, beliau dapat lebih mengenal dan memahami kondisi dari pegawai untuk lebih meningkatkan kinerjanya untuk dapat mencapai tujuan organisasi yang diinginkan. Peningkatan disiplin kerja para pegawai pemerintah Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar masih harus terus ditingkatkan agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara maksimal dan mengerjakan tugasnya dengan waktu relatif cepat, serta menghasilkan kualitas layanan yang memuaskan. Tugas kepemimpinan yang dijalankan oleh lurah tersebut memperhatikan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh para pegawainya, membuat para pegawai dapat meningkatkan pelayanan di kantor kelurahan.

Selanjutnya tugas pokok Kelurahan adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh walikota. Kelurahan merupakan dasar dari satuan pemerintahan yang terkecil dari suatu komunitas pemerintahan negara. Sehingga boleh dikatakan bahwa keberhasilan dalam melakukan pembangunan juga tergantung dari sejauh mana partisipasi masyarakat setempat beserta aparatur pemerintahan kelurahan dalam perencanaan pembangunan tersebut. Dalam arti masyarakat harus ikut berpartisipasi dan diberi kepercayaan dan kewenangan yang cukup dalam mengurus rumah tangga kelurahannya, sehingga bisa mandiri.

Peran Lurah sangat penting bagi suatu wilayah, khususnya bagi masyarakat, kelurahan sebagai organisasi pemerintahan yang paling dekat dan berhubungan langsung dengan masyarakat merupakan salah satu ujung tombak penyelenggaraan pemerintah daerah, Pemerintah Kelurahan dituntut untuk menunjukkan kemampuan manajerialnya terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat setempat. Lurah dituntut untuk profesional dan menguasai secara baik pekerjaannya melebihi rata-rata pegawai yang ada, serta memiliki komitmen moral yang tinggi atas pekerjaannya sesuai dengan kode etik profesinya sebagai pemimpin.

Sebagaimana dijelaskan oleh (Hardiyansyah, 2011) bahwa kinerja selalu merupakan tanda keberhasilan suatu organisasi dan orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut. Kinerja dapat dilihat dari berbagai sudut pandang tergantung kepada tujuan masing-masing organisasi misalnya untuk profit ataukah untuk customer satisfaction, dan juga tergantung pada bentuk organisasi itu sendiri (misalnya organisasi publik, swasta, bisnis, sosial dan keagamaan). Dengan demikian seorang Lurah harus memiliki kinerja yang baik daripada stafnya, kemudian Lurah juga harus mengevaluasi kinerja dari staf tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kualitas Pelayanan Publik dalam Peningkatan Kinerja di Kantor Lurah Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar”.

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Seperti yang dijelaskan oleh (Creswell, 2014) bahwa penelitian kuantitatif merupakan

pendekatan untuk menguji teori objektif dengan menguji hubungan antar variabel. Variabel ini, pada gilirannya, dapat diukur dengan menggunakan instrumen, sehingga data jumlah dapat dianalisis dengan menggunakan prosedur statistik. Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah: (1) observasi, (2) wawancara, (3) kuesioner/angket dan (4) dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data dilakukan dengan analisis kuantitatif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan permasalahan pokok dalam penelitian adalah analisis Tingkat kinerja Kantor Lurah Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari, dilakukan dengan menyebarkan kuesioner responden, yang diikuti dengan wawancara. Hasil penilaian tingkat kinerja Kantor Lurah Bah Kapul didasarkan pada 13 indikator yang meliputi : responsivitas, responsibilitas, akuntabilitas, keadaptasian, kelangsungan hidup, keterbukaan/transparansi, empati, efektivitas, produktivitas, efisiensi, kepuasan, keadilan, peranan Lurah dalam pembangunan. Masing-masing indikator tersebut terdiri dari beberapa item (sub indikator) dan setiap item terdiri dari satu pertanyaan / pernyataan.

### Responsivitas

Responsivitas (daya tanggap) terhadap aspirasi, kebutuhan dan tuntutan rakyat. Aspek responsivitas kantor Lurah Bah Kapul telah mengarahkan peningkatan kualitas sumberdaya manusia agar mampu merubah sikap, orientasi dan pola pikir untuk bertindak secara profesional, mandiri memberikan layanan publik yang diberikan mencerminkan aspirasi, kebutuhan dan tuntutan rakyat.

**Tabel 1. Frekuensi Organisasi Memperhatikan Komplain**

Nomor	Jawaban	Frekuensi	Prosentase (%)
1.	Tidak memperhatikan	-	-
2.	Kurang memperhatikan	9	9,2
3.	Memperhatikan	69	70,4
4.	Selalu memperhatikan	20	20,4
	Total	98	100

Dari tabel 1. dapat dilihat bahwa dari 98 responden yang diberikan angket menjawab pertanyaan dengan bobot 4 yaitu selalu memperhatikan, 20,4 % menjawab dengan bobot 3 yaitu memperhatikan, 70,4 % menjawab dengan bobot 2 yaitu 9,2% yang kurang memperhatikan. Selanjutnya, dari hasil wawancara dengan informan menyatakan bahwa organisasi memperhatikan komplain dari *customer* yang merasa pelayanan diberikan kurang atau tidak sesuai dengan harapan mereka. Apabila organisasi menerima komplain dari *customer* akan diterima dengan baik dengan terlebih dahulu dipelajari permasalahan apa yang dikomplain oleh *customer*. Setelah itu akan diadakan pembenahan terhadap komplain sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal tersebut sesuai dengan pendapat salah satu informan yang mengatakan bahwa “Dalam rangka meningkatkan citra pelayanan yang diselenggarakan oleh organisasi pemerintah khususnya di Kantor Lurah Bah Kapul kami selalu ditekankan oleh pimpinan untuk selalu tanggap pada permasalahan yang dikeluhkan oleh masyarakat dalam menurus surat-surat yang dibutuhkan oleh warga. Apabila ada pengaduan dari pemohon, kami akan menindaklanjutinya”. (Wawancara, tanggal 21 April 2016).

Berdasarkan tabel dan perhitungan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja kantor lurah bah kapul kecamatan siantar sitalasari Kota Pematangsiantar dari **aspek responsivitas** termasuk dalam tingkat **tinggi**. Dalam kaitannya dengan responsivitas ini merupakan kemampuan organisasi dalam mengenali kebutuhan masyarakat dalam memberikan pelayanan, yang dilihat dari tingkat kepekaan terhadap keluhan masyarakat dalam pelayanan publik. Padahal Kantor Lurah Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari belum mempunyai seksi sendiri dalam merespon keluhan masyarakat.

### Responsibilitas

Kantor Lurah Bah Kapul sebagai aparatur pemerintah mempunyai *responsibilitas* (rasa tanggung jawab internal) terhadap segala yang dilakukannya. Moral dan etika publik dipakai landasan setiap perilaku, berupaya mempertajam kepekaan sosial serta meningkatkan responsivitas (daya tanggap) terhadap aspirasi, kebutuhan dan tuntutan rakyat. Aspek *responsibilitas* yang dimiliki oleh Kantor Lurah Bah Kapul memiliki pelayanan publik bisa memenuhi kepentingan masyarakat. Agar birokrasi lebih responsif terhadap kepentingan masyarakat, terutama masyarakat yang memerlukan kontrak pelayanan, Kartu Keluarga dll. Adanya standar pelayanan publik yang telah ditentukan oleh pemerintah dan akan diterapkan, maka birokrasi berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhinya, tugas aparatur pemerintah sejatinya adalah membawa mandat ke arah pelayanan segala kepentingan rakyat.

**Tabel 2. Frekuensi Struktur Organisasi Mendukung Organisasi Berkinerja Tinggi**

Nomor	Jawaban	Frekuensi	Prosentase (%)
1.	Tidak memberikan	4	4,1
2.	Kurang memberikan	8	18,4
3.	Memberikan	29	29,6
4.	Selalu memberikan	47	48,0
	Total	98	100

Dari tabel 2. dapat dilihat bahwa dari 98 responden yang menjawab angket pertanyaan 48,0 % menjawab dengan bobot 4 yaitu : sangat mendukung, 29,6 % menjawab dengan bobot 3 yaitu : mendukung, 18,4 % menjawab dengan bobot 2 yaitu : kurang mendukung, 4,1% menjawab dengan bobot 1 yaitu : tidak mendukung. Selanjutnya, dari hasil wawancara dengan informan menyatakan bahwa struktur organisasi yang dibentuk sudah mampu mendukung terbentuknya organisasi berkinerja tinggi. Struktur organisasi yang ada sudah mengarah pada usaha - usaha pencapaian karakteristik organisasi berkinerja tinggi. Namun ke depan masih perlu dilakukan penyempurnaan struktur organisasi ke arah yang lebih baik. Hal tersebut sesuai dengan pendapat salah satu informan yang mengatakan bahwa “Struktur organisasi kantor yang ada sekarang ini sebetulnya sudah bagus, dengan adanya miskin struktur namun kaya fungsi diharapkan organisasi akan mampu mewujudkan kinerja yang bagus, namun kedepannya perlu diadakan suatu upaya penyempurnaan struktur organisasi sehingga aspek-aspek yang merupakan aspirasi dari masyarakat dapat ditampung”. (Wawancara, tanggal 22 April 2016).

Berdasarkan tabel dan perhitungan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja kantor lurah dari **aspek responsibilitas** termasuk dalam tingkat **sedang**. Dalam kaitannya dengan responsibilitas ini dapat dilihat dari pelaksanaan kegiatan organisasi sudah

sesuai dengan prosedur dan mekenisme kerja yang ada. Penerbitan susat-surat maupun kegiatan organisasi didasarkan pada aturan hukum yang ada, walaupun aturan hukum yang mendasari penerbitan surat tersebut masih harus disesuaikan dengan perkembangan yang ada.

### Akuntabilitas

Pemerintah kelurahan merupakan ujung tombak yang menentukan penyelenggaraan pemerintahan, mengingat pemerintah kelurahan adalah garda terdepan yang langsung berhadapan dengan masyarakat, oleh karena itu pemerintah kelurahan harus berperan mengerjakan tugas - tugas pemerintahan terutama dalam memberikan informasi kepada *customer*.

**Tabel 3. Frekuensi Memberikan Informasi Kepada *Customer* Secara Tepat**

Nomor	Jawaban	Frekuensi	Prosentase (%)
1.	Tidak memberikan	6	6,1
2.	Kurang Memberikan	5	5,1
3.	Memberikan	29	29,6
4.	Selalu Memberikan	58	59,2
	Total	98	100

Dari tabel 3. dapat dilihat bahwa dari 98 responden yang menjawab pertanyaan 59,2% menjawab dengan bobot 4 yaitu : selalu memberikan, 29,6% menjawab dengan bobot 3 yaitu : memberikan, 5,1 % menjawab dengan bobot 2 yaitu : kurang memberikan, 6,1 % menjawab dengan bobot 1 yaitu : tidak memberikan selanjutnya, dari hasil wawancara dengan informan menyatakan bahwa mereka memberikan informasi kepada *customer* secara tepat sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ada. Hal tersebut sesuai dengan pendapat salah satu informan yang mengatakan bahwa “Apabila ada pertanyaan dari masyarakat tentang persyaratan maupun prosedur untuk mendapatkan Surat Keterangan, saya selalu membuka buku Standar Operasional Prosedur yang berisi syarat-syarat, prosedur maupun waktu pemrosesan. Hal tersebut saya lakukan karena takut informasi yang saya berikan tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur”. (Wawancara, tanggal 18 Mei 2016).

Berdasarkan tabel dan perhitungan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja Kantor Lurah Bah Kapul dari **aspek Akuntabilitas** termasuk dalam tingkat **tinggi**. Dalam kaitannya dengan akuntanbilitas ini dapat dilihat dari tingkat konsistensi antara kebijakan dan kegiatan Kantor Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari dengan aspirasi masyarakat. Akuntanbilitas Kantor Lurah Bah Kapul, dapat dilihat dari misi Kelurahan meningkatkan kualitas pelayanan. Peningkatan kualitas pelayanan terus dilakukan dengan memperhatikan masukan-masukan dari masyarakat.

### Keadaptasian

**Tabel 4. Frekuensi Diberikan Kesempatan Membuat Perubahan**

Nomor	Jawaban	Frekuensi	Prosentase (%)
1.	Tidak Diberikan	4	4,1
2.	Kurang Berikan	8	8,2
3.	Diberikan	39	39,8
4.	Selalu Diberikan	47	48,0
	Total	98	100

Dari tabel 4. dapat dilihat bahwa dari 98 responden yang menjawab pertanyaan 48,0% menjawab dengan bobot 4 yaitu : selalu diberikan, 39,8 % menjawab dengan bobot 3 yaitu : diberikan, 8,23 % menjawab dengan bobot 2 yaitu : kurang diberikan, 4,1 % menjawab dengan bobot 1 yaitu : tidak diberikan. Selanjutnya, dari hasil wawancara dengan informan menyatakan bahwa mereka diberikan kesempatan untuk membuat perubahan guna meningkatkan hasil pekerjaan. Pimpinan organisasi berusaha memberikan kesempatan berinovasi kepada anggota organisasi yang benar-benar mempunyai potensi. Namun sebagian menyatakan bahwa mereka tidak diberikan kesempatan untuk membuat perubahan guna meningkatkan hasil pekerjaan. Pendapat ini mengacu pada anggapan bahwa mereka bekerja harus sesuai dengan mekanisme yang sudah ada tanpa membuat perubahan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat salah satu informan yang mengatakan bahwa “Saya tidak diberikan kesempatan untuk membuat perubahan, karena saya bekerja harus sesuai dengan mekanisme yang sudah ada tanpa membuat perubahan. Hal-hal yang selama ini sudah berjalan dengan baik tidak perlu dirubah. Saya menjalankan rutinitas sesuai dengan mekanisme yang sudah ada”. (Wawancara, tanggal 28 April 2016).

Berdasarkan tabel dan perhitungan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja Kantor Lurah Bah Kapul dari **aspek Keadaptasian** termasuk dalam tingkat **tinggi**. Dalam kaitannya dengan keadaptasian ini dapat dilihat dari upaya organisasi mengantisipasi setiap perubahan yang terjadi dan menyesuaikan dengan perubahan tersebut. Organisasi selalu melakukan perubahan untuk memenuhi kepuasan masyarakat. Struktur organisasi diciptakan untuk mendukung tercapainya organisasi berkinerja tinggi. Disain organisasi disesuaikan dengan fungsi organisasi.

### Kelangsungan Hidup

**Tabel 5. Frekuensi Hasil Pekerjaan Memenuhi Persyaratan**

Nomor	Jawaban	Frekuensi	Prosentase (%)
1.	Tidak Memenuhi	-	-
2.	Kurang Memenuhi	7	7,1
3.	Memenuhi	43	43,9
4.	Selalu Memenuhi	48	49,0
	Total	98	100

Dari tabel 5. dapat dilihat bahwa dari 98 responden yang menjawab pertanyaan 49,0 % menjawab dengan bobot 4 yaitu : sangat memenuhi, 43,9 % menjawab dengan bobot 3 yaitu : memenuhi, 7,1 % menjawab dengan bobot 2 yaitu : kurang memenuhi, 0 % menjawab dengan bobot 1 yaitu : tidak memenuhi. Selanjutnya, dari hasil wawancara dengan informan menyatakan bahwa hasil pekerjaan mereka telah memenuhi seluruh persyaratan yang ada dan memuaskan. Dengan adanya Standar Operasional Prosedur dan mekanisme yang jelas akan diperoleh hasil pekerjaan yang sesuai dengan persyaratan dan tentunya akan memuaskan semua pihak. Hal tersebut sesuai dengan pendapat salah satu informan yang mengatakan bahwa “Hasil pekerjaan kami telah memenuhi seluruh persyaratan yang ada dan memuaskan semua pihak. Dengan adanya Standar Operasional Prosedur dan mekanisme yang jelas akan diperoleh hasil pekerjaan yang sesuai dengan persyaratan dan tentunya akan memuaskan semua pihak”. (Wawancara, tanggal 21 April 2016).



Berdasarkan tabel dan perhitungan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja Kantor Lurah Bah Kapul dari **aspek Kelangsungan Hidup** termasuk dalam tingkat **sedang**. Dalam kaitannya dengan kelangsungan hidup ini dapat dilihat dari upaya organisasi dalam mengatasi segala sesuatu yang dapat mengganggu pencapaian tujuan organisasi dapat dilakukan dengan cukup baik. Koordinasi dengan dinas/instansi terkait selalu dilakukan untuk mendapatkan keterpaduan dalam pelaksanaan kegiatan.

#### Keterbukaan/Transparansi

**Tabel 6. Frekuensi Organisasi Mempermudah Akses Informasi**

Nomor	Jawaban	Frekuensi	Prosentase (%)
1.	Tidak Mempermudah	-	-
2.	Kurang Mempermudah	10	10,2
3.	Mempermudah	58	59,2
4.	Selalu Mempermudah	30	30,6
	Total	98	100

Dari tabel 6. dapat dilihat bahwa dari 98 responden yang menjawab pertanyaan 30,6 % menjawab dengan bobot 4 yaitu : selalu mempermudah, 59,2 % menjawab dengan bobot 3 yaitu : mempermudah, 10,2 % menjawab dengan bobot 2 yaitu : kurang mempermudah, 0 % menjawab dengan bobot 1 yaitu : tidak mempermudah. Dari hasil wawancara dengan informan menyatakan bahwa organisasi mempermudah akses informasi. Pernyataan informan ini didasarkan bahwa organisasi telah menyediakan sarana informasi seperti penyebaran pamphlet pada saat kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat. Disamping itu di ruangan kantor juga dipasang papan informasi dan disediakan satu unit *white Board* yang bisa memberikan informasi mengenai pelayanan yang diberikan oleh organisasi.

Berdasarkan tabel dan perhitungan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja Kantor Lurah Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari dari **aspek Keterbukaan/Transparansi** termasuk dalam tingkat **sedang**. Dalam kaitannya dengan keterbukaan/transparansi ini dapat dilihat dari organisasi menyediakan akses informasi kepada masyarakat pengguna jasa pelayanan dengan jalan mengadakan kegiatan sosialisasi dan pengadaan sarana informasi. Organisasi berusaha memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang prosedur pelayanan.

#### Empati

**Tabel 7. Frekuensi Organisasi Mengikuti Isu Aktual**

Nomor	Jawaban	Frekuensi	Prosentase (%)
1.	Tidak Mengikuti	6	6,1
2.	Kurang Mengikuti	8	8,2
3.	Mengikuti	23	23,5
4.	Selalu Mengikuti	61	62,2
	Total	98	100

Dari tabel 7. dapat dilihat bahwa 98 dari responden yang menjawab pertanyaan 62,2 % menjawab dengan bobot 4 yaitu : selalu mengikuti, 23,5 % menjawab dengan bobot 3 yaitu : mengikuti, 8,2 % menjawab dengan bobot 2 yaitu : kurang mengikuti, 6,1 % menjawab dengan bobot 1 yaitu : tidak mengikuti. Selanjutnya, dari hasil wawancara dengan informan



menyatakan bahwa organisasi mengikuti isu-isu aktual yang berkembang dalam masyarakat. Organisasi selalu mengikuti perkembangan lingkungan, organisasi selalu memantau apa yang terjadi di luar lingkungan organisasi maupun di dalam lingkungan organisasi. Sebagai contoh ada keluhan dari masyarakat melalui rubrik di salah satu surat kabar, melalui rubrik tersebut dapat dipantau apa yang menjadi keluhan masyarakat sehingga dapat dilakukan upaya untuk menindaklanjuti keluhan tersebut. Hal tersebut sesuai dengan pendapat salah satu informan yang mengatakan bahwa “Kantor selalu mengikuti isu-isu aktual yang berkembang dalam masyarakat. Kantor selalu mengikuti perkembangan lingkungan, kantor juga selalu memantau apa yang terjadi di luar lingkungan kantor maupun di dalam lingkungan kantor. Sebagai contoh ada keluhan dari masyarakat melalui rubrik di salah satu surat kabar, melalui rubrik tersebut dapat dipantau apa yang menjadi keluhan masyarakat sehingga dapat dilakukan upaya untuk menindaklanjuti keluhan tersebut”. (Wawancara, tanggal 28 April 2016).

Berdasarkan tabel dan perhitungan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja Kantor Lurah Bah Kapul dari **aspek Empati** termasuk dalam tingkat **sedang**. Dalam kaitannya dengan empati ini dapat dilihat dari organisasi selalu memperhatikan dan mengikuti perkembangan isu-isu yang terjadi di masyarakat. Organisasi mengelola isu-isu tersebut untuk peningkatan kinerja organisasi.

### Evektivitas

**Tabel 8. Frekuensi Organisasi Meminta Masukan**

Nomor	Jawaban	Frekuensi	Prosentase (%)
1.	Tidak Meminta	25	25,5
2.	Kurang Meminta	28	28,6
3.	Meminta	37	37,8
4.	Selalu Meminta	8	8,2
	Total	98	100

Dari tabel 8. dapat dilihat bahwa 98 dari responden yang menjawab pertanyaan 8,2 % menjawab dengan bobot 4 yaitu : selalu meminta, 37,8 % menjawab dengan bobot 3 yaitu : meminta, 28,69 % menjawab dengan bobot 2 yaitu : kurang meminta, 25,5 % menjawab dengan bobot 1 yaitu : tidak meminta. Selanjutnya, dari hasil wawancara dengan informan menyatakan bahwa sebagai perencanaan masa depan, organisasi meminta masukan dari pegawai. Hal ini dilakukan pada forum rapat staf yang dilakukan tiga bulan sekali. Pada forum ini pimpinan organisasi membuka peluang bagi pegawai untuk menyampaikan masukan, saran maupun pendapat mereka. Hal tersebut sesuai dengan pendapat salah satu informan yang mengatakan bahwa “Dalam merencanakan program kedepan, kantor meminta masukan dari kami. Masukan ini dilakukan pada forum rapat staf yang dilakukan secara rutin setiap satu bulan sekali. Pada forum ini pimpinan kantor membuka peluang bagi pegawai untuk menyampaikan masukan, saran maupun pendapat kami”. (Wawancara, tanggal 28 April 2016).

Berdasarkan tabel dan perhitungan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja Kantor Lurah Bah Kapul dari **aspek Efektivitas** termasuk dalam tingkat **sedang**. Dalam kaitannya dengan efektivitas ini dapat dilihat dari sudah adanya upaya pimpinan organisasi dalam mengembangkan visi, misi dan nilai organisasi. Misi organisasi dikembangkan melalui pelaksanaan program kegiatan yaitu : peningkatan disiplin aparatur, peningkatan sumber daya

aparatur, peningkatan profesionalisme sumber daya manusia yang didalamnya dengan menerapkan teknologi informasi. Peningkatan pelayanan perijinan satu pintu dengan kegiatan sosialisasi, optimalisasi pelayanan publik serta monitoring dan evaluasi pelayanan publik.

### Produktivitas

**Tabel 9. Frekuensi Hasil Pekerjaan Memenuhi Persyaratan**

Nomor	Jawaban	Frekuensi	Prosentase (%)
1.	Tidak Memenuhi	-	-
2.	Kurang Memenuhi	8	8,2
3.	Memenuhi	77	78,6
4.	Selalu Memenuhi	13	13,3
	Total	98	100

Dari tabel 9. dapat dilihat bahwa 98 dari responden yang menjawab pertanyaan 13,3 % menjawab dengan bobot 4 yaitu : selalu memenuhi, 78,6 % menjawab dengan bobot 3 yaitu : memenuhi, 8,2 % menjawab dengan bobot 2 yaitu : kurang memenuhi, 0 % menjawab dengan bobot 1 yaitu : tidak memenuhi. Selanjutnya, dari hasil wawancara dengan informan menyatakan bahwa hasil pekerjaan mereka telah memenuhi persyaratan. Produk pelayanan yang diberikan organisasi sebagai penyedia pelayanan telah sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku sebagai dasar setiap penerbitan surat keputusan perijinan. Surat yang dikeluarkan merupakan bukti legalitas bagi pemegang dan sudah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditentukan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat salah satu informan yang mengatakan bahwa “Hasil pekerjaan Kantor Lurah Bah Kapul telah memenuhi persyaratan. Produk pelayanan yang kami berikan sebagai penyedia pelayanan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar setiap penerbitan surat. Surat yang dikeluarkan merupakan bukti legalitas bagi pemegang surat ditentukan”. (Wawancara, tanggal 5 Mei 2016).

Berdasarkan tabel dan perhitungan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja Kantor Lurah Bah Kapul dari **aspek Produktivitas** termasuk dalam tingkat **tinggi**. Dalam kaitannya dengan produktivitas ini dapat dilihat dari keterlibatan para pegawai dalam penyusunan rencana strategi, pencapaian tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Organisasi telah melakukan pengukuran kinerja dan berupaya menjaga agar pengukuran kinerja organisasi tersebut sesuai dengan kebutuhan dan arah organisasi. Organisasi selalu memperhitungkan dampak yang diakibatkan dalam setiap pengambilan keputusan.

### Efisiensi

**Tabel 10. Frekuensi Organisasi Mempunyai SOP**

Nomor	Jawaban	Frekuensi	Prosentase (%)
1.	Tidak Mempunyai	-	-
2.	Kurang Mempunyai	-	-
3.	Mempunyai	86	87,8
4.	Selalu Mempunyai	12	12,2
	Total	98	100

Dari tabel 10. dapat dilihat bahwa dari 98 responden yang menjawab pertanyaan 12,2 % menjawab dengan bobot 4 yaitu : sangat mempunyai, 87,8 % menjawab dengan bobot 3 yaitu : mempunyai, 0 % menjawab dengan bobot 2 yaitu : kurang mempunyai, 0 % menjawab

dengan bobot 1 yaitu : tidak mempunyai. Selanjutnya, dari hasil wawancara dengan informan menyatakan bahwa organisasi telah mempunyai Standart Operasional Prosedur (SOP) yang merupakan acuan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat yang wajib ditaati oleh pemberi pelayanan dan atau penerima pelayanan. Tujuan ditetapkannya Standart Operasional Prosedur pelayanan perijinan ini adalah untuk mendorong terwujudnya pelayanan perijinan yang prima. Hal tersebut sesuai dengan pendapat salah satu informan yang mengatakan bahwa “Organisasi telah mempunyai Standart Operasional Prosedur (SOP) yang merupakan acuan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat yang wajib ditaati oleh pemberi pelayanan dan atau penerima pelayanan. Tujuan ditetapkannya Standart Operasional Prosedur pelayanan ini adalah untuk mendorong terwujudnya pelayanan yang prima”. (Wawancara, tanggal 5 Mei 2016).

Berdasarkan tabel dan perhitungan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja Kantor Lurah Bah Kapul dari **aspek Efisiensi** termasuk dalam tingkat **Tinggi**. Dalam kaitannya dengan efisiensi ini dapat dilihat dari organisasi telah memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada, anggaran telah dikelola dengan baik terbukti dengan laporan keuangan dibuat sesuai dengan jadwal yang ada. Organisasi mengelola waktu dengan cukup baik.

### Kepuasan

**Tabel 11. Frekuensi Mengetahui Siapa yang Harus Dilayani**

Nomor	Jawaban	Frekuensi	Prosentase (%)
1.	Tidak Mengetahui	12	12,2
2.	Kurang Mengetahui	8	8,2
3.	Mengetahui	60	60,2
4.	Sangat Mengetahui	11	11,2
	Total	98	100

Dari tabel 11. dapat dilihat bahwa 98 dari responden yang menjawab pertanyaan 11,2 % menjawab dengan bobot 4 yaitu : sangat mengetahui, 60,2 % menjawab dengan bobot 3 yaitu : mengetahui, 8,2 % menjawab dengan bobot 2 yaitu : kurang mengetahui, 12,2 % menjawab dengan bobot 1 yaitu : tidak mengetahui. Selanjutnya, dari hasil wawancara dengan informan menyatakan bahwa mereka mengetahui siapa yang harus dilayani. Mereka telah membangun paradigma baru bahwa mereka menempatkan *customer* menjadi orang terpenting yang harus dilayani, sebab karena customer mereka bekerja dan mendapat gaji. Mereka tidak merasa berjasa dengan melayaninya, justru mereka berterima kasih telah mendapat kesempatan untuk melayaninya. Harapan mereka paradigma ini akan menjadi tata nilai baru dan budaya kerja mereka. Hal tersebut sesuai dengan pendapat salah satu informan yang mengatakan bahwa “Staf Pegawai Kantor Lurah Bah Kapul mengetahui siapa yang harus dilayani. Mereka tidak merasa berjasa dengan melayani pemohon, justru kami berterima kasih telah mendapat kesempatan untuk melayaninya. Harapan kami paradigma ini akan menjadi tata nilai baru dan budaya kerja mereka”. (Wawancara, tanggal 12 Mei 2016).

Berdasarkan tabel dan perhitungan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja Kantor Pelayanan Terpadu dan Perijinan Kabupaten Grobogan dari **aspek Kepuasan** termasuk dalam tingkat **tinggi**. Dalam kaitannya dengan kepuasan ini dilihat dari organisasi tetap menjaga tingkat kepuasan masyarakat dengan menyusun IKM secara berkala setiap enam bulan sekali, mekenisme pelayanan diciptakan agar masyarakat benar-benar

mendapatkan pelayanan yang memuaskan. Apabila ada permasalahan organisasi berusaha membuat keputusan yang dapat memuaskan kedua belah pihak.

**Keadilan**

**Tabel 12. Frekuensi Jenis Pelayanan Memenuhi Kebutuhan**

Nomor	Jawaban	Frekuensi	Prosentase (%)
1.	Tidak Memenuhi	-	-
2.	Kurang Memenuhi	25	25,5
3.	Memenuhi	56	57,1
4.	Sangat Memenuhi	18	18,4
	Total	98	100

Dari tabel 12. dapat dilihat bahwa 98 dari responden yang menjawab pertanyaan 18,4 % menjawab dengan bobot 4 yaitu : sangat memenuhi, 57,1 % menjawab dengan bobot 3 yaitu : memenuhi, 25,5 % menjawab dengan bobot 2 yaitu : kurang memenuhi, 0 % menjawab dengan bobot 1 yaitu : tidak memenuhi. Selanjutnya, dari hasil wawancara dengan informan menyatakan bahwa jenis pelayanan aspek kepuasan yang diberikan oleh organisasi sudah memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun sebagian informan menyatakan perlu adanya pelayanan publik yang merupakan pendukung dalam mengurus surat-surat seperti genset, sehingga tidak tertunda. Sehingga masyarakat lebih mudah dan cepat dalam menyelesaikan urusannya.

Berdasarkan tabel dan perhitungan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja Kantor Lurah Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari dari aspek **Keadilan** termasuk dalam tingkat **tinggi**. Dalam kaitannya dengan keadilan ini dapat dilihat dari upaya organisasi memberikan pelayanan melalui pemrosesan perijinan dengan menggunakan jaringan teknologi informasi yang secara otomatis menghasilkan keluaran berdasarkan urutan pendaftaran. Berdasarkan hasil kuesioner ditambah dengan wawancara, keempat item termasuk dalam tingkat sedang.

**Tabel 13. Hasil Pengukuran Tingkat Kinerja Organisasi**

Nomor	Aspek yang diukur	Hasil Pengukuran
1	Responsivitas	Tinggi
2	Responsibilitas	Sedang
3	Akuntabilitas	Tinggi
4	Keadaptasian	Tinggi
5	Kelangsungan hidup	Sedang
6	Keterbukaan/transparansi	Sedang
7	Empati	Sedang
8	Efektivitas	Sedang
9	Produktivitas	Tinggi
10	Efisiensi	Tinggi
11	Kepuasan	Tinggi
12	Keadilan	Tinggi
13	Peranan Lurah Dalam Pembangunan	Tinggi
	Tingkat Kinerja Organisasi	TINGGI

Sumber : data primer diolah tahun 2016

Berdasarkan hasil perhitungan tabel dari indikator kinerja organisasi yang berorientasi proses dari aspek responsivitas yang meliputi daya tanggap organisasi terhadap harapan, keinginan dan aspirasi serta tuntutan *customers* termasuk dalam kriteria tinggi. Dari aspek

responsibilitas yang meliputi tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pelayanan dengan hukum atau peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan termasuk dalam kriteria sedang. Dari aspek akuntabilitas yang meliputi tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran-ukuran eksternal yang ada di masyarakat dan dimiliki *stake holders* termasuk dalam kriteria tinggi. Dari aspek keadaptasian yang meliputi daya tanggap organisasi terhadap tuntutan perubahan yang terjadi di lingkungannya termasuk dalam kriteria tinggi. Dari aspek kelangsungan hidup yang meliputi sejauh mana organisasi atau program pelayanan dapat berkembang dan bertahan hidup dalam berkompetisi dengan organisasi atau program lain termasuk dalam kriteria sedang. Dari aspek keterbukaan / transparansi yang meliputi proses pelayanan diinformasikan secara terbuka termasuk dalam kriteria sedang. Dari aspek empati yang meliputi tingkat perhatian organisasi terhadap isu-isu aktual yang sedang berkembang di masyarakat termasuk dalam kriteria tinggi. Dilihat pada indikator kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil dapat disimpulkan bahwa Kantor Lurah Bah Kapul dari aspek efektifitas dalam pencapaian tujuan organisasi termasuk dalam kriteria tinggi. Dari aspek produktivitas dalam menghasilkan keluaran yang dibutuhkan masyarakat termasuk dalam kriteria tinggi. Dari aspek efisiensi dengan membandingkan antara keluaran dan masukan termasuk dalam kriteria tinggi. Dari aspek kepuasan dalam memenuhi kebutuhan pegawai dan masyarakat termasuk dalam kriteria tinggi. Dari aspek keadilan dalam mengusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan diperlakukan secara adil jangkauan kegiatan dan pelayanan termasuk dalam kriteria tinggi. Sedangkan tingkat kinerja Kantor Lurah Bah Kapul secara keseluruhan termasuk dalam kriteria tinggi.

## **PEMBAHASAN**

Aspek responsivitas yang meliputi daya tanggap organisasi terhadap harapan, keinginan dan aspirasi serta tuntutan *customers* termasuk dalam kriteria tinggi. Staf pegawai kantor lurah Bah Kapul memiliki kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas di sini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi.

Dari aspek responsibilitas di kantor lurah Bah Kapul sedang hal ini terjadi karena birokrasi sebagai pemberi layanan merupakan perspektif yang sebenarnya berasal, dan pendekatan birokrasi yang cenderung menempatkan diri sebagai regulator dari pada sebagai pelayan yang meliputi tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pelayanan. Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh staff kantor Lurah Bah Kapul merupakan bagian dari daya tanggap negara atau pemerintah akan kebutuhan vital masyarakat. Oleh sebab itu, secara keseluruhan harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan demi memenuhi kriteria daya tanggap. Daya tanggap pada birokrasi dalam memberikan pelayanan publik sangat mempengaruhi kinerja pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan daya saing suatu negara pada era global

Dari aspek akuntabilitas kantor lurah Bah Kapul termasuk dalam kriteria tinggi. Akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik dalam penelitian dilihat melalui indikator-indikator kinerja yang meliputi: (1) acuan pelayanan yang dipergunakan aparat birokrasi

dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik. Indikator tersebut mencerminkan prinsip orientasi pelayanan yang dikembangkan oleh birokrasi terhadap masyarakat pengguna jasa; (2) tindakan yang dilakukan oleh aparat birokrasi apabila terdapat masyarakat pengguna jasa yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan; dan (3) dalam menjalankan tugas pelayanan, seberapa jauh kepentingan pengguna jasa memperoleh prioritas dari aparat birokrasi. Aparat birokrasi dalam memberikan pelayanan publik seringkali masih menerapkan standar nilai atau norma pelayanan, seperti pemberian pelayanan yang disesuaikan berdasarkan pada juklak (petunjuk dan pelaksanaan) dan kebutuhan sehingga kecenderungan yang terjadi adalah tingginya komitmen aparat birokrasi untuk akuntabel terhadap masyarakat yang dilayaninya. Salah satu faktor penyebab yang menjadikan tingginya tingkat akuntabilitas birokrasi adalah amanya proses indoktrinasi kultur birokrasi yang mengarahkan aparat birokrasi untuk selalu melihat ke atas. Selama ini aparat birokrasi telah terbiasa lebih mementingkan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pimpinan. Birokrasi selalu merasa bertanggung jawab kepada publik.

Aspek kelangsungan hidup termasuk dalam kriteria sedang. Aparat pelayanan yang ideal juga seharusnya tidak memiliki kegiatan atau pekerjaan lain seperti pekerjaan sambilan di luar pekerjaan kantor yang dapat mengganggu tugas-tugas penyelenggaraan pelayanan. Kinerja pelayanan aparat birokrasi akan dapat maksimal apabila bila semua waktu dan konsentrasi aparat benar-benar tercurah untuk melayani masyarakat. Kondisi pelayanan yang ideal di atas dalam realitasnya sangat sulit untuk diwujudkan dalam birokrasi. Ketidakjelasan pembagian wewenang, inkonsistensi pembagian kerja, serta sikap pimpinan kantor yang sewenang-wenang memberikan tugas kepada aparat bawahan tanpa memperhitungkan aspek sifat pekerjaan, urgensi pekerjaan, dan dampak pemberian tugas terhadap kualitas pemberian pelayanan kepada masyarakat. Hal-hal tersebut merupakan beberapa fakta penyebab sulitnya aparat birokrasi berkonsentrasi secara penuh pada tugas-tugas pelayanan masyarakat. Aparat birokrasi seringkali meninggalkan tugas pelayanan dan lebih banyak menghabiskan waktu untuk tugas-tugas lain di luar tugas pelayanan. Kondisi tersebut membuat pelayanan kepada masyarakat menjadi terganggu. Masih seringnya aparat birokrasi meninggalkan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat, erat kaitannya dengan adanya tugas-tugas tambahan yang dibebankan oleh pimpinan kepada aparat pada tingkat bawah yang menjalankan tugas pelayanan langsung kepada masyarakat. Hal tersebut sangat sering menimpa aparat birokrasi di tingkat desa, kelurahan, atau kecamatan yang merupakan tingkatan pemerintahan terendah yang langsung berhadapan dengan masyarakat

Aspek keterbukaan/transparansi termasuk dalam kriteria sedang. Transparansi informasi birokrasi dalam pemberian pelayanan publik masih tetap menjadi isu yang penting bagi upaya ke arah perbaikan kinerja birokrasi pemerintahan di Kantor Lurah Bah Kapul. Tindakan untuk melakukan reformasi birokrasi terutama diarahkan pada upaya untuk peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas birokrasi

Aspek empati yang meliputi tingkat perhatian organisasi terhadap isu-isu aktual yang sedang berkembang di masyarakat termasuk dalam kriteria tinggi. Masyarakat mempunyai harapan yang tinggi, agar pemerintah mengenal mereka secara pribadi, kebutuhan mereka secara spesifik dan bila perlu mengetahui apa yang menjadi tujuan utamanya pada



saat datang ke kantor lurah Bah Kapul. Bila tidak, masyarakat akan kehilangan kesempatan untuk dapat memuaskan mereka dari aspek ini.

Dilihat pada indikator kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil dapat disimpulkan bahwa Kantor Lurah Bah Kapul dari aspek efektifitas dalam pencapaian tujuan organisasi termasuk dalam kriteria tinggi. Kemampuan dan sumber daya aparat birokrasi sangat diperlukan agar orientasi pada pelayanan dapat dicapai. Contohnya, antara lain, adalah masalah penyediaan waktu kerja aparat yang benar-benar berorientasi pada pemberian pelayanan kepada masyarakat. Aparat birokrasi yang ideal adalah aparat birokrasi yang tidak dibebani oleh tugas-tugas kantor lain di luar tugas pelayanan kepada masyarakat. Kondisi pelayanan yang ideal sudah diterapkan dalam birokrasi. Kejelasan pembagian wewenang, inkonsistensi pembagian kerja, serta sikap pimpinan kantor yang memberikan tugas kepada aparat bawahan dengan memperhitungkan aspek sifat pekerjaan, urgensi pekerjaan, dan dampak pemberian tugas terhadap kualitas pemberian pelayanan kepada masyarakat. Hal-hal tersebut merupakan beberapa fakta penyebab aparat birokrasi dapat berkonsentrasi secara penuh pada tugas-tugas pelayanan masyarakat.

Dari aspek produktivitas dalam menghasilkan keluaran yang dibutuhkan masyarakat termasuk dalam kriteria tinggi. Pada umumnya sataf pegawai kantor Lurah Bah Kapul selalu memahami rasio antara input dengan output pekerjaannya. Konsep produktivitas dirasa cukup besar pada pelayanan publik sehingga memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting.

Dari aspek efisiensi dengan membandingkan antara keluaran dan masukan termasuk dalam kriteria tinggi. Dari aspek kepuasan dalam memenuhi kebutuhan pegawai dan masyarakat termasuk dalam kriteria tinggi. Efisiensi pelayanan dan sisi output, dipergunakan untuk melihat produk pelayanan oleh birokrasi tanpa disertai adanya tindakan pemaksaan kepada publik untuk mengeluarkan biaya ekstra pelayanan, seperti suap, sumbangan sukarela, dan berbagai pungutan dalam proses pelayanan yang sedang berlangsung. Adanya toleransi dan pihak aparat birokrasi maupun masyarakat pengguna jasa untuk tidak menggunakan mekanisme suap dan mendapatkan pelayanan yang terbaik.

Dari aspek keadilan dalam mengusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan diperlakukan secara adil jangkauan kegiatan dan pelayanan termasuk dalam kriteria tinggi. Kantor Lurah bah Kapul bertindak profesional terhadap publik. Berperan menjadi pelayan masyarakat (*public servant*). Dalam memberikan pelayanan ada transparansi biaya dan tidak terjadi pungutan liar. PNS perlu memberikan informasi dan transparansi sebagai hak masyarakat dan bisa dimintai pertanggungjawabannya (*public accountability*) lewat dengar pendapat (*hearing*). Melakukan pemberdayaan publik dan mendukung terbangunnya proses demokratisasi.

Sedangkan tingkat kinerja Kantor Lurah Bah Kapul secara keseluruhan termasuk dalam kriteria tinggi. Kinerja birokrasi sebenarnya dapat dilihat melalui berbagai dimensi, seperti dimensi akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, responsivitas, maupun responsibilitas. Kinerja birokrasi pada dasarnya memiliki kesamaan substansial yakni untuk melihat seberapa jauh tingkat pencapaian hasil yang telah dilakukan oleh birokrasi pelayanan. Kinerja itu merupakan suatu konsep yang disusun dan berbagai indikator yang sangat bervariasi sesuai dengan fokus dan konteks penggunaannya.



## KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Kinerja organisasi Kantor Lurah Bah Kapul termasuk dalam kriteria tinggi, (2) Kinerja organisasi dari aspek proses yang diukur melalui indikator responsivitas, tanggung jawab, akuntabilitas, keadaptasian, kelangsungan hidup, keterbukaan/transparansi, empati masing-masing termasuk dalam kriteria tinggi, (3) Peranan Lurah Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari dinilai dari aspek pembangunan termasuk Kriteria tinggi dan (4) Kinerja organisasi dari aspek hasil yang diukur melalui indikator efektivitas, produktivitas, efisiensi, kepuasan, keadilan masing-masing termasuk dalam kriteria tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*, 4 Edition. London: Sage
- Gultom, E. I. K., & Saragih, M. (2019). Pengaruh Pendidikan Dan Pelatihan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Camat Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar. *Jurnal Ilmiah AccUsi*, 1(1), 47–54. <https://doi.org/10.36985/accusi.v1i1.1>
- Hardiyansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*, Yogyakarta: Gava Media, Cetakan Pertama.
- Indah Lestari, & Simatupang, P. (2020). Budaya Organisasi Profesional, Integritas, Kredibel, Kerjasama Tim, Inovatif, Kreatif (PIKKIR) dan Pengaruhnya Terhadap Kreativitas Pegawai Pada Kantor Badan POM Kota Tanjung Balai. *Manajemen: Jurnal Ekonomi*, 2(1), 18–30. <https://doi.org/10.36985/manajemen.v2i1.345>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Saragih, M. (2020). Pengaruh Komunikasi Interpersonal Terhadap Peningkatan Kinerja Pegawai Dinas Bina Marga Dan Pengairan Pematangsiantar. *Jurnal Ilmiah AccUsi*, 2(1), 49–58.
- Situmorang, A. S., Munthe, R. N., & Purba, F. (2022). Pengaruh Disiplin Kerja Dan Pengawasan Pimpinan Terhadap Kinerja Karyawan Pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pematangsiantar. *Manajemen : Jurnal Ekonomi*, 4(1), 16 –. <https://doi.org/10.36985/manajemen.v4i1.350>
- Tarigan, V., & Tarigan, W. J. (2020). Analisis Budaya Organisasi Dan Kepuasan Kerja Yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan Pada Bank Mega Kantor Cabang Pematangsiantar : Analysis Of Organizational Culture And Job Satisfaction That Affect Emoloyee Performance In The Bank Mega Branch Office Trading Siantar. *Jurnal Edueco*, 3(2), 38-50
- Tarigan, W. J., Girsang, R. M., & Martina, S. (2022). Pengaruh Lingkungan Kerja Fisik Dan Non Fisik Terhadap Produktivitas Karyawan PT Astra Honda Pematangsiantar. *Manager: Jurnal Ilmu Manajemen*, 5(3), 363-371
- Tumanggor, B., & Girsang, R. (2021). Pengaruh Kompetensi Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Gunung Malela

Kabupaten Simalungun. Manajemen: Jurnal Ekonomi, 3(1), 42–55.  
<https://doi.org/10.36985/manajemen.v3i1.496>

**PENGARUH PELATIHAN, BUDAYA ORGANISASI, DAN KEPUASAN KERJA  
TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PENDAPATAN,  
PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN ASET  
KABUPATEN SIMALUNGUN**

**Marulitua Tambunan<sup>1</sup>, Marihot Manullang<sup>2</sup>, Robert Tua Siregar<sup>3</sup>, Sarintan E Damanik<sup>4</sup>**  
Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota  
Program Pascasarjana Universitas Simalungun

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji pengaruh pelatihan, budaya organisasi, dan kepuasan kerja terhadap kualitas pelayanan publik pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset kabupaten Simalungun. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Sedangkan teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah: (1) observasi, (2) wawancara, (3) questioner/angket dan (4) dokumentasi. Selanjutnya teknik analisis data yang dilakukan adalah analisis kuantitatif. Pengujian hipotesis menunjukkan beberapa hal yaitu: secara serempak pelatihan, budaya organisasi, dan kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan publik pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset kabupaten Simalungun, secara parsial pelatihan dan kepuasan kerja sama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan publik pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset kabupaten Simalungun, sementara budaya organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan publik pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset kabupaten Simalungun.

**Kata Kunci :** Pelatihan, Budaya Organisasi, Kepuasan Kerja, Kualitas Pelayanan Publik

**ABSTRACT**

*This study aims to determine and test the effect of training, organizational culture, and job satisfaction on the quality of public services at the Revenue Service, Financial and Asset Management, Simalungun district. The research method used in this study is a quantitative method. While the techniques used in data collection are: (1) observation, (2) interviews, (3) questionnaires and (4) documentation. Furthermore, the data analysis technique used is quantitative analysis. Hypothesis testing shows several things: simultaneously training, organizational culture, and job satisfaction have a positive and significant effect on the quality of public services at the Revenue Service Financial and Asset Management Simalungun district, partially training and job satisfaction both have a positive and significant effect on quality public services at the Simalungun Regency Finance and Asset Management Revenue Service, while organizational culture has no significant effect on the quality of public services at the Simalungun Regency Finance and Asset Management Revenue Service*

*Keyword : Training, Organizational Culture, Job Satisfaction, Quality of Public Services*

**PENDAHULUAN**

Rendahnya kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh sebagian aparatur pemerintahan atau administrasi negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya menjadi momok yang sering melekat dalam pandangan masyarakat Indonesia. Padahal, kondisi tersebut sudah diatur dalam kerangka hukum administrasi positif Indonesia tentang standar minimum kualitas pelayanan, namun kepatuhan terhadap standar minimum pelayanan publik

tersebut masih belum termanifestasikan dalam pelaksanaan tugas aparatur pemerintah. Sebagaimana masalah pelayanan publik diberbagai daerah di negara ini, hal yang sama juga terjadi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Simalungun dimana pegawai belum dapat memberikan pelayanan yang prima kepada publik, masih banyak masyarakat yang mengeluhkan buruknya pelayanan publik pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset kabupaten Simalungun.

Dengan demikian sangat perlu diberikan pelatihan kepada para pegawai sehingga mereka dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi yang telah ditentukan. Sebagaimana dijelaskan oleh (Mathis, 2002) bahwa pelatihan merupakan suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, proses ini terikat dengan berbagai tujuan organisasi, pelatihan dapat dipandang secara sempit maupun luas. Secara terbatas, pelatihan menyediakan para pegawai dengan pengetahuan yang spesifik dan dapat diketahui serta keterampilan yang digunakan dalam pekerjaan mereka saat ini. Terkadang ada batasan yang ditarik antara pelatihan dengan pengembangan, dengan pengembangan yang bersifat lebih luas dalam cakupan serta memfokuskan pada individu untuk mencapai kemampuan baru yang berguna baik bagi pekerjaannya saat ini maupun di masa mendatang. Dengan diberikannya pelatihan diharapkan pegawai tersebut dapat melaksanakan tugasnya dengan baik serta memberikan pelayanan prima kepada publik.

Adapun tujuan diberikannya pelatihan kepada pegawai adalah: (1) untuk mengembangkan keahlian, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan lebih efektif, (2) untuk mengembangkan pengetahuan, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan secara rasional, dan (3) untuk mengembangkan sikap, sehingga menimbulkan kemauan kerjasama dengan teman-teman pegawai dan dengan manajemen (pimpinan).

Selain itu, dalam pengembangan program pelatihan agar dapat bermanfaat dan mendatangkan keuntungan diperlukan tahapan atau langkah-langkah yang sistematis. Secara umum ada tiga tahap pada pelatihan yaitu tahap penilaian kebutuhan, tahap pelaksanaan pelatihan dan tahap evaluasi. Atau dengan istilah lain ada fase perencanaan pelatihan, fase pelaksanaan pelatihan dan fase pasca pelatihan. (Mangkunegara, 2005) menjelaskan bahwa tahapan-tahapan dalam pelatihan dan pengembangan meliputi: (1) mengidentifikasi kebutuhan pelatihan/need assesment; (2) menetapkan tujuan dan sasaran pelatihan; (3) menetapkan kriteria keberhasilan dengan alat ukurnya; (4) menetapkan metode pelatihan; (5) mengadakan percobaan (try out) dan revisi; dan (6) mengimplementasikan dan mengevaluasi.

Tidak hanya memberikan pelatihan saja, seorang pegawai juga harus memahami dengan baik budaya organisasi, dimana budaya organisasi merupakan sistem makna, nilai-nilai dan kepercayaan yang dianut bersama dalam suatu organisasi yang menjadi rujukan untuk bertindak dan membedakan organisasi yang satu dengan organisasi yang lain, budaya organisasi yang juga merupakan sistem nilai dan kepercayaan bersama yang berinteraksi dengan orang-orang, struktur dan sistem suatu organisasi untuk menghasilkan norma - norma perilaku, apabila dikuatkan maka akan dapat meningkatkan kualitas layanan publik yang diberikan oleh pegawai Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset kabupaten Simalungun.

Budaya organisasi mempunyai fungsi sebagai berikut: (a) Budaya mempunyai suatu peran menetapkan tapal batas, artinya budaya menciptakan perbedaan yang jelas antara suatu organisasi dengan organisasi yang lain. (b) Budaya memberikan identitas bagi anggota organisasi. (c) Budaya mempermudah timbulnya komitmen yang lebih luas dan pada kepentingan individu. (d) Budaya itu meningkatkan kemantapan system social. (e) Budaya sebagai mekanisme pembuat makna kendali yang memandu serta membentuk sikap dan perilaku karyawan (Rivai, 2004).

Dengan diberikannya pelatihan dan pemahaman tentang budaya organisasi maka diharapkan akan mencapai kepuasan kerja. Kepuasan kerja sendiri merupakan situasi emosional yang muncul dalam diri seseorang serta kebanggaan pada dirinya atas prestasi dan kinerja yang telah dilakukannya. Kepuasan kerja bagi setiap pegawai di lingkungan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset kabupaten Simalungun diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan publik di kabupaten Simalungun. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul “Pengaruh pelatihan, budaya organisasi dan kepuasan kerja terhadap kualitas pelayanan publik pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset kabupaten Simalungun”.

**METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Seperti yang dijelaskan oleh (Creswell, 2014) bahwa penelitian kuantitatif merupakan pendekatan untuk menguji teori objektif dengan menguji hubungan antar variabel. Variabel ini, pada gilirannya, dapat diukur dengan menggunakan instrumen, sehingga data jumlah dapat dianalisis dengan menggunakan prosedur statistik. Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah: (1) observasi, (2) wawancara, (3) quesioner/angket dan (4) dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data dilakukan dengan analisis kuantitatif.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**Penjelasan Responden Atas Variabel Pelatihan**

Tanggapan responden terhadap daftar pertanyaan yang diberikan untuk variabel pelatihan (X<sub>1</sub>) adalah seperti pada Tabel dibawah ini:

**Tabel 1. Penjelasan Responden Atas Variabel Pelatihan**

Item Pertanyaan	S Tidak Setuju		Tidak Setuju		Kurang Setuju		Setuju		Sangat Setuju	
	Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%
Pegawai dikantor ini memperoleh kesempatan yang luas untuk belajar meyelesaikan tugas baru	0	0,00	3	4,62	25	38,46	29	44,62	8	12,31
Pegawai dikantor ini selalu berdiskusi untuk membahas segala hal yang berhubungan erjaan	0	0,00	4	6,15	22	33,85	27	41,54	12	18,46
Pedoman tertulis mengenai bagaimana cara melaksanakan tersedia dikantor ini.	0	0,00	6	9,23	21	32,31	26	40,00	12	18,46
Unit kerja saya sering melakukan pelatihan di instansi ini dengan	0	0,00	6	9,23	19	29,23	23	35,38	17	26,15

mengundang narasumber										
Kantor ini selalu merencanakan mengirim pegawai mengikuti pelatihan setiap tahunnya	0	0,00	7	10,77	21	32,31	26	40,00	11	16,92
Pimpinan kami secara aktif menyeleksi pelatihan yang bermanfaat bagi pegawai	0	0,00	5	7,69	21	32,31	35	53,85	4	6,15
Instansi ini memberikan kesempatan yang luas bagi pegawai untuk mengikuti pelatihan selagi memberikan manfaat bagi penyelesaian tugas-tugasnya sebagai pegawai	0	0,00	0	0,00	9	13,85	42	64,62	30	46,15
Pimpinan memberikan kesempatan secara adil kepada pegawai untuk mengikuti pelatihan	0	0,00	0	0,00	15	23,08	38	58,46	28	43,08

Sumber: Hasil Penelitian 2016 (data diolah)

Untuk pertanyaan tentang pelatihan jawaban responden disajikan pada tabulasi tabel 1. diatas, dimana pilihan yang paling banyak dipilih oleh responden adalah pilihan setuju yang menunjukkan bahwa pelatihan yang diikuti oleh para pegawai di Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset kabupaten Simalungun sudah cukup memadai baik dari segi jumlah maupun kesesuaian pelatihan yang diikuti oleh pegawai, termasuk juga kesempatan mengikuti pelatihan yang diberikan oleh pimpinan.

**Penjelasan Responden Atas Variabel Budaya organisasi**

Tanggapan responden terhadap daftar pertanyaan yang diberikan untuk variabel budaya organisasi (X<sub>2</sub>) adalah seperti pada Tabel dibawah ini yang disajikan kedalam distribusi frekuensi.

**Tabel 2. Penjelasan Responden atas Variabel Budaya organisasi**

Item Pertanyaan	Sangat Tidak Setuju		Tidak Setuju		Kurang Setuju		Setuju		Sangat Setuju	
	Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%
Sebagai pegawai, saya didorong untuk mempunyai inisiatif dalam mengerjakan pekerjaan saya.	0	0,00	0	0,00	25	38,46	30	46,15	10	15,38
Sbagai pegawai, saya diberikan kepercayaan sepenuhnya dalam menyelesaikan pekerjaan.	0	0,00	1	1,54	23	35,38	33	50,77	8	12,31
Sebagai pegawai, saya terus mengembangkan diri untuk mendapatkan hasil yg optimal dlam menyelesaikan pekerjaan	0	0,00	2	3,08	21	32,31	30	46,15	12	18,46
Pegawai di dinas ini memiliki inovasi yg tinggi dalam bekerja	0	0,00	2	3,08	25	38,46	29	44,62	9	13,85
Sebagai pegawai, saya memahami dengan baik struktur organisasi yang ada	0	0,00	2	3,08	14	21,54	26	40,00	23	35,38
Sebagai pegawai, saya dituntut menjadi anggota satuan kerja yang kompak dalam menjalankan pekerjaan untuk mendapatkan hasil yang maksimal	0	0,00	2	3,08	18	27,69	29	44,62	16	24,62
Seluruh pegawai merasa bgga menjadi bgn	0	0,00	0	0,00	9	13,85	42	64,62	30	46,15

instansi kami.											
Sebagai pegawai, saya merasa dihargai dikantor ini.	0	0,00	0	0,00	15	23,08	38	58,46	28	43,08	

Sumber: Hasil Penelitian 2016 (data diolah)

Untuk pertanyaan tentang budaya organisasi jumlah responden yang memilih pilihan setuju, namun pilihan jawaban kurang setuju juga cukup banyak, yang berarti bahwa budaya oerorganisasi di Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset masih belum terlalu kuat atau belum terlalu baik.

**Penjelasan Responden Atas Variabel Kepuasan**

Tanggapan responden terhadap daftar pertanyaan variabel kepuasan (X<sub>3</sub>) adalah seperti pada Tabel dibawah ini yang disajikan kedalam distribusi frekuensi.

**Tabel 3. Penjelasan Responden atas Variabel Kepuasan**

Item Pertanyaan	Sangat Tidak Setuju		Tidak Setuju		Kurang Setuju		Setuju		Sangat Setuju	
	Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%
Secara umum saya sangat puas dengan pekerjaan saya.	0	0,00	9	13,85	9	13,85	32	49,23	15	23,08
Kebanyakan pegawai dikantor ini sangat puas dgn pekerjaannya	0	0,00	9	13,85	8	12,31	36	55,38	12	18,46
Saya tidak pernah memikirkan untuk pindah dari unit kerja saya ke unit yg lain.	0	0,00	8	12,31	7	10,77	39	60,00	11	16,92
Saya tidak pernah memikirkan utk pindah dr dinas pendidikan	0	0,00	11	16,92	11	16,92	30	46,15	13	20,00
Saya selalu menerima umpan balik yg cukup dari atasan saya.	0	0,00	10	15,38	12	18,46	31	47,69	12	18,46
Saya sangat puas dengan kebijakan-kebijakan perusahaan selama ini.	0	0,00	11	16,92	11	16,92	24	36,92	19	29,23
Saya merasa kesempatan untuk maju diperusahaan ini cukup besar.	0	0,00	0	0,00	9	13,85	42	64,62	30	46,15
Perusahaan memberikan dukungan kepada saya dalam menyelesaikan pekerjaan saya.	0	0,00	0	0,00	15	23,08	38	58,46	28	43,08

Sumber: Hasil Penelitian 2016 (data diolah)

Tabel diatas menunjukkan bahwa pilihan paling banyak dipilih oleh responden adalah pilihan setuju untuk seluruh pertanyaan yang diajukan mengenai kepuasan kerja, bahwa kepuasan kerja pegawai Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset kabupaten Simalungun cukup tinggi, secara umum pegawai merasa sangat puas terhadap pekerjaannya.

**Penjelasan Responden Atas Variabel Kualitas layanan publik**

Tanggapan responden terhadap daftar pertanyaan yang diberikan untuk variabel kualitas layanan publik (Y) adalah seperti pada Tabel ini.

**Tabel 4. Penjelasan Responden atas Variabel Kualitas layanan publik**

Item Pertanyaan	Sangat Tidak Setuju		Tidak Setuju		Kurang Setuju		Setuju		Sangat Setuju	
	Jl	%	Jl	%	Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%
Saya selalu membuat urusan masyarakat	0	0,00	13	20,00	29	44,62	21	32,31	2	3,08



sederhana .										
Kami memberikan pelayanan dan jelas kepada masyarakat	0	0,00	13	20,00	29	44,62	16	24,62	7	10,77
Kami selalu memastikan bahwa sitiap warga yang membutuhkan pelayanan akan dilayani di Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset ini.	0	0,00	9	13,85	26	40,00	22	33,85	8	12,31
Saya selalu berusaha agar masyarakat yang menerima layanan di Dinas PPK dan Aset ini merasa nyaman.	0	0,00	13	20,00	33	50,77	12	18,46	7	10,77
Kami selalu berusaha agar mmasyarakat yang berurusan di kantor ini tidak merasa bosan	0	0,00	9	13,85	33	50,77	15	23,08	8	12,31
Saya selalu berusaha terbuka terhadap masyarakat tentang berbagai urusan di kantor Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset ini	0	0,00	8	12,31	30	46,15	19	29,23	8	12,31
Saya tidak pernah mengutamakan famili atau rekan dalam pengurusan berbagai hal di kantor ini.	0	0,00	0	0,00	9	13,85	42	64,62	30	46,15

Sumber: Hasil Penelitian 2016 (data diolah)

Pada Tabel 4. diatas menunjukkan bahwa tidak ada satu orang responden yang menjawab sangat tidak setuju untuk seluruh pertanyaan yang diajukan tentang kualitas layanan publik, piliham tidak setuju dipilih oleh beberapa orang responden, sementara pilihan jawaban yang paling banyak dipilih oleh responden juga adalah pilihan kurang setuju yang menjelaskan bahwa kualitas layanan publik yang diberikan oleh pegawai Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset kabupaten simalungun masih rendah atau masih sangat kurang memuaskan penerima layanan publik.

**Uji Parsial (Uji t)**

Berdasarkan Tabel 5 dapat diketahui bahwa nilai konstanta adalah sebesar 5,164 dan nilai koefisien masing-masing variabel adalah  $X_1 = 0.412$ ,  $X_2 = 257$ , dan  $X_3=0.275$ , Maka model regresi untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = 5,164 + 0.412 X_1 + 0,257 X_2 + 0.275 X_3$$

Dimana :

Y = Kualitas layanan publik

$X_1$  = Pelatihan

$X_2$  = Budaya organisasi

$X_3$  = Kepuasan kerja

Tabel 5. Uji Parsial ( Uji t )

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	5,164	5,203		,992	,325		
1 Pelatihan	,412	,121	,404	3,395	,001	,734	1,362
Budaya Organisasi	,257	,150	,206	1,711	,092	,717	1,394
Kepuasan Kerja	,275	,085	,334	3,230	,002	,972	1,028

Sumber : Hasil Penelitian, 2016 (data diolah)

Dari Tabel 5 di atas ini diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Nilai  $t_{hitung}$  untuk variabel pelatihan (3,395) lebih besar dibandingkan dengan  $t_{tabel}$  (3,18) atau nilai sig (0,001) lebih kecil dari alpha (0,025). Berdasarkan hasil yang diperoleh maka

- $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima untuk variabel pelatihan. Dengan demikian maka secara parsial variabel pelatihan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas layanan publik Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset kabupaten Simalungun. Dengan pengaruh yang signifikan tersebut menunjukkan bahwa pelatihan yang diikuti oleh pegawai memberikan peran atau kontribusi yang besar dalam meningkatkan kualitas layanan publik di Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset kabupaten Simalungun.
2. Nilai  $t_{hitung}$  untuk variabel budaya organisasi (1,711) lebih kecil dibandingkan dengan  $t_{tabel}$  (3,18) atau nilai sig (0,092) lebih besar dari alpha (0,025). Berdasarkan hasil yang diperoleh maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak untuk variabel budaya organisasi.
- Berdasarkan hasil diatas maka secara parsial variabel budaya organisasi di Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset kabupaten Simalungun tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas layanan publik Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset kabupaten Simalungun.
3. Nilai  $t_{hitung}$  untuk variabel kepuasan kerja (3,230) lebih besar dibandingkan dengan  $t_{tabel}$  (3,18) atau nilai sig (0,002) lebih kecil dari alpha (0,025). Berdasarkan hasil yang diperoleh maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima untuk variable kepuasan kerja.

Berdasarkan hasil pengolahan diatas untuk variabel budaya organisasi  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, dengan demikian maka secara parsial variabel kepuasan kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas layanan publik Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset kabupaten Simalungun. Sehingga dapat dikatakan bahwa kepuasan kerja pegawai Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset kabupaten simalungun memiliki kontribusi yang tinggi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset kabupaten Simalungun.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dirumuskan kesimpulan penelitian ini sebagai berikut: (1) Pengujian secara serempak menunjukkan bahwa pelatihan, budaya organisasi, dan kepuasan secara serempak atau simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas pelayanan public pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset kabupaten Simalungun, (2) Pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel pelatihan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan publik pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset kabupaten Simalungun, (3) Pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel budaya organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan publik pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset kabupaten Simalungun, (4) Pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel kepuasan kerja memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan publik pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset kabupaten Simalungun dan (5) Nilai  $R^2$  yang diperoleh adalah sebesar 0.364 atau 36,4% yang menunjukkan kemampuan variabel pelatihan, budaya organisasi dan kepuasan kerja dalam menjelaskan variasi yang terjadi pada kualitas layanan publik hanya 36,4%, sedangkan sisanya sebesar 63,6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan

ke dalam model seperti kepemimpinan, motivasi kerja, pengembangan karir, disiplin kerja dan lain-lain.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anggri, Munthe, R. N., & Panjaitan, P. D. (2022). Pengaruh Kepemimpinan Dan Budaya Organisasi Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Rumah Sakit Tentara Pematangsiantar. *Manajemen : Jurnal Ekonomi*, 4 (1), 33 – 42. <https://doi.org/10.36985/manajemen.v4i1.352>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*, 4 Edition. London: Sage
- Gultom, E. I. K., & Saragih, M. (2019). Pengaruh Pendidikan Dan Pelatihan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Camat Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar. *Jurnal Ilmiah AccUsi*, 1(1), 47–54. <https://doi.org/10.36985/accusi.v1i1.1>
- Mangkunegara, Anwar Prabu. (2005). *Evaluasi Kinerja SDM*. Bandung : Refika Aditama.
- Mathis, Robert L & Jhon H. Jackson. (2002). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Buku I, Penerjemah Jimmy Sadeli dan Bayu. Prawira Hie, Jakarta: Salemba Empat
- Napitu, R., & Tarigan, W. J. (2022). Dampak Konflik dan Stress Kerja terhadap Kinerja pada PTPN IV Dolok Sinumbah. *J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains)*, 7(1), 290-298
- Rivai, Veithzal. (2004). *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan dari Teori ke Praktek*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Saragih, M. (2020). Pengaruh Komunikasi Interpersonal Terhadap Peningkatan Kinerja Pegawai Dinas Bina Marga Dan Pengairan Pematangsiantar. *Jurnal Ilmiah AccUsi*, 2(1), 49–58. <https://doi.org/10.36985/accusi.v2i1.52>
- Saragih, T. M., & Purba, D. syafe'i. (2019). Pengaruh Pelatihan Dan Pendidikan Dalam Meningkatkan Prestasi Kerja Pegawai Kantor Satpol PP Kabupaten Simalungun. *Jurnal Ilmiah AccUsi*, 1(1), 36–46. <https://doi.org/10.36985/accusi.v1i1>
- Tarigan, V., & Tarigan, W. J. (2020). Analisis Budaya Organisasi Dan Kepuasan Kerja Yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan Pada Bank Mega Kantor Cabang Pematangsiantar : Analysis Of Organizational Culture And Job Satisfaction That Affect Emoloyee Performance In The Bank Mega Branch Office Trading Siantar. *Jurnal Edueco*, 3(2), 38-50
- Tarigan, W. J., Girsang, R. M., & Martina, S. (2022). Pengaruh Lingkungan Kerja Fisik Dan Non Fisik Terhadap Produktivitas Karyawan PT Astra Honda Pematangsiantar. *Manager: Jurnal Ilmu Manajemen*, 5(3), 363-371
- Wahyu Wiranda, & Tarigan, V. (2019). Pengaruh Budaya Kerja Terhadap Peningkatan Prestasi Kerja Pada PT.Telkom Indonesia,Tbk Pematangsiantar. *Jurnal Ilmiah AccUsi*, 1(1), 23–35. <https://doi.org/10.36985/accusi.v1i1.6>

**DAMPAK PERUSAHAAN KELAPA SAWIT PTPN - IV TERHADAP  
KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNANAN  
WILAYAH DI DESA KEDAI DAMAR KECAMATAN PABATU KABUPATEN  
SERDANG BADAGEI**

**M Agus Nurlanda Siregar<sup>1</sup>, Marihot Manullang<sup>2</sup>, Robert Tua Siregar<sup>3</sup>, Sarintan E Damanik<sup>4</sup>**  
Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota  
Program Pascasarjana Universitas Simalungun

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis tingkat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat, dampak keadaan sosial masyarakat sebelum dan sesudah adanya Perusahaan dan menganalisis pengaruh keberadaan PTPN-IV terhadap pengembangan wilayah di Desa Kedai Damar, Kecamatan Pabatu Kabupaten Serdang Bedagai. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Sedangkan teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah: (1) observasi, (2) wawancara, (3) questioner/angket dan (4) dokumentasi. Selanjutnya teknik analisis data yang dilakukan adalah analisis kuantitatif. Hasil analisis dampak sosial keberadaan perusahaan kelapa sawit di Desa Kedai Damar sangat membawa dampak positif bagi perubahan sosial dan peningkatan ekonomi masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan setelah adanya perusahaan banyak sarana pendidikan yang dulunya tidak ada sekarang menjadi ada. Dampak kesehatan limbah tidak mencemari lingkungan dan sudah dikelola dengan baik oleh pihak perusahaan sehingga tidak ada masalah kesehatan yang ditimbulkan oleh keberadaan perusahaan. Keamanan, sebelum adanya perusahaan tidak pernah terjadi perkelahian massal, hal ini dibuktikan dengan keseluruhan responden menyatakan tidak pernah terjadi perkelahian massal, setelah adanya perusahaan sebanyak 17,5% responden menyatakan pernah terjadi perkelahian massal. Terjadi peningkatan intensitas interaksi antara sebelum dan sesudah adanya perusahaan, peningkatan yang terjadi sangat besar sehingga dapat disimpulkan tingkat interaksi masyarakat di Desa Kedai Damar sangat baik. Tingkat gotong royong di Desa Kedai Damar mengalami penurunan yang sangat besar, ketika sebelum adanya perusahaan masyarakat sekitar selalu mengadakan gotong royong. Namun setelah adanya perusahaan masyarakat menjadi jarang melakukan gotong royong jadi dalam hal ini perusahaan membawa dampak negatif terhadap tingkat gotong royong di Desa Kedai Damar. Pembangunan pertanian yang berbasis perkebunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat sehingga terjadi suatu perubahan dalam pola hidup masyarakat disekitarnya serta menghilangkan kemiskinan dan keterbelakangan khususnya di daerah pedesaan, disamping itu juga memperhatikan pemerataan perekonomian antar golongan dan antar wilayah, kebijaksanaan pemerintah menentukan variasi sumber-sumber pendapatn yang muncul dan kemampuan masyarakat dalam memperoleh manfaat dari adanya perkebunan.

**Kata Kunci :** Kelapa Sawit, PTPN-IV, Kesejahteraan Sosial, Pembangunan Wilayah

**ABSTRACT**

*The purpose of this study was to analyze the level of socio-economic welfare of the community, the impact of the social condition of the community before and after the existence of the Company and to analyze the influence of the existence of PTPN-IV on regional development in Kedai Damar Village, Pabatu District, Serdang Bedagai Regency. The research method used in this study is a quantitative method. While the techniques used in data collection are: (1) observation, (2) interviews, (3) questionnaires and (4) documentation. Furthermore, the data analysis technique used is quantitative*

*analysis. The results of the social impact analysis of the existence of a palm oil company in Kedai Damar Village have had a very positive impact on social change and improving the community's economy. This is evidenced by the fact that after the existence of the company, many educational facilities that did not exist before are now available. The health impact of waste does not pollute the environment and has been managed properly by the company so that there are no health problems caused by the existence of the company. Security, before the existence of the company there was never a mass fight, this is evidenced by all respondents stating that there had never been a mass fight, after the existence of the company as much as 17.5% of respondents stated that there had been a mass fight. There was an increase in the intensity of interaction between before and after the existence of the company, the increase that occurred was very large so that it can be concluded that the level of community interaction in Kedai Damar Village was very good. The level of mutual cooperation in Kedai Damar Village experienced a very large decline, when before the existence of the company the surrounding community always held mutual cooperation. However, after the existence of the company, the community rarely carried out mutual cooperation so in this case the company had a negative impact on the level of mutual cooperation in Kedai Damar Village. Plantation-based agricultural development aims to improve the welfare of the community so that there is a change in the lifestyle of the surrounding community and eliminate poverty and underdevelopment, especially in rural areas, besides that it also pays attention to economic equity between groups and between regions, government policy determines variations in sources of income. that arise and the ability of the community to benefit from the existence of plantations*

*Keyword : Oil Palm, PTPN - IV, Social Welfare, Regional Development*

## **PENDAHULUAN**

Sektor pertanian memegang peranan penting dalam perekonomian nasional, karena selain menyediakan pangan bagi seluruh penduduk, sektor ini juga menyumbang devisa, menyediakan kesempatan kerja dan mendukung perkembangan sektor lain terutama dalam penyediaan bahan baku bagi industri. Pembangunan pertanian merupakan bagian yang diandalkan dalam mencapai pertanian yang tangguh dan juga sebagai wahana untuk mencapai peningkatan pertanian. Sektor pertanian yang diunggulkan adalah sektor perkebunan. Pembangunan perkebunan dapat dilakukan oleh pemerintah maupun pihak swasta dalam bentuk perkebunan besar ataupun oleh rakyat dalam bentuk perkebunan rakyat. Dalam perkembangannya, sub sektor ini tidak terlepas dari berbagai dinamika nasional dan global.

Pembangunan di sektor perkebunan pada tahapan tertentu akan membuat peluang pengembangan agribisnis yang cukup besar, karena bertumpuh di atas landasan keunggulan komparatif dalam memproduksi berbagai bahan mentah berupa komoditas perkebunan, hortikultura, peternakan dan perikanan serta peluang pasar baik dalam maupun luar negeri (Fahrudin, 2012). Sawit dan produk turunannya merupakan komoditas tanaman perdagangan terpenting Indonesia. Pada tahun 2014, Indonesia memproduksi 33,5 juta ton minyak sawit, yang menghasilkan \$ 18,9 miliar dari pendapatan ekspor. Sawit menjadi ekspor paling berharga setelah batubara dan migas. Laju ekspor minyak sawit Indonesia merupakan fenomena yang relatif baru dengan pertumbuhan luar biasa industrinya dalam 30 tahun terakhir.

Perkembangan perkebunan sawit memiliki hubungan yang signifikan dengan industri penebangan (*logging*), sebuah industri yang mulai berkembang pesat di tahun 1970-an. Di

paruh kedua 1970-an, Indonesia menjadi eksportir terbesar kayu di dunia, yang didorong oleh investasi asing termasuk pembangunan akses jalan dengan membuka hutan hujan yang sebelumnya tidak dapat dilakukan. Perkembangan teknologi mendorong pengusaha untuk mendirikan pabrik-pabrik baru dalam memproduksi berbagai sarana sehingga terbuka lapangan pekerjaan baru yang menyerap tenaga kerja (Usman, 2014). Dalam hal ini termasuk juga perusahaan - perusahaan yang bergerak pada sektor perkebunan, termasuk perusahaan kelapa sawit.

Peluang-peluang agribisnis yang tercipta akan menimbulkan stimulan terhadap investasi di bidang agribisnis, yang diikuti dengan berdirinya perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. Berdirinya perusahaan-perusahaan di suatu daerah tertentu akan berpengaruh secara makro terhadap kondisi perekonomian nasional serta memiliki dampak terhadap kondisi kesejahteraan sosial di sekitar perusahaan-perusahaan itu didirikan.

Laju perkembangan industri kelapa sawit Indonesia merupakan hasil dari kombinasi beragam faktor. Sebagai komoditas perkebunan, sawit merupakan tanaman yang sangat produktif yang mampu menghasilkan 7 kali lebih banyak dari minyak *rapeseeds* (*Brassica napus*) dan 11 kali lebih banyak dari kedelai per hektar. Selain itu, minyak sawit baik tinggi dalam kualitas dan sangat serbaguna. Minyak sawit sekarang digunakan sebagai dasar untuk sebagian margarin, sabun, lipstik, berbagai ragam kembang gula, minyak goreng, es krim, pelumas industri, dan berbagai produk lainnya.

Kelapa sawit merupakan salah satu tanaman perkebunan yang memiliki arti penting bagi perkembangan pembangunan nasional. Selain mampu menciptakan kesempatan kerja, kontribusi lainnya adalah sebagai sumber devisa negara. Indonesia merupakan salah satu produsen utama minyak sawit (*Crude Palm Oil*). *Crude Palm Oil* (CPO) yang dihasilkan kelapa sawit memiliki beberapa keunggulan dibandingkan minyak nabati tanaman lainnya, yaitu tahan lebih lama, tahan terhadap tekanan, dan memiliki toleransi suhu yang relatif tinggi. CPO dikenal sebagai produk primadona perkebunan Indonesia. Pengembangan usaha perkebunan kelapa sawit ini dikenal dengan tiga bentuk utama usaha perkebunan, yaitu Perkebunan Rakyat (PR), Perkebunan Besar Swasta (PBS), dan Perkebunan Besar Negara. Walaupun dihadapkan kepada berbagai hambatan, sejak Pelita I sampai sekarang upaya perluasan areal dan peningkatan produksi kelapa sawit tetap berlangsung dengan laju yang cepat.

Kabupaten Serdang Bedagai merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki peluang sumber daya yang baik untuk tanaman kelapa sawit. Hal ini yang menjadikan Kecamatan Tebing Tinggi menjadi salah satu wilayah yang berpotensi dalam mengembangkan komoditi tersebut. Pengolahan kelapa sawit merupakan salah satu faktor menentukan keberhasilan usaha perkebunan kelapa sawit hasil utama yang dapat diperoleh ialah minyak sawit mentah / CPO (*Crude Palm Oil*), minyak inti sawit / PKO (*Palm Kernel Oil*), serabut, cangkang, dan tandan kosong sawit. Produksi CPO memiliki kaitan erat dengan luas areal perkebunan yang produktif, disamping itu juga ada faktor lain yang mempengaruhi seperti kondisi tanah ataupun iklimnya. Sementara itu rata-rata produksi per



hektar perkebunan kelapa sawit berbeda-beda sesuai dengan pola pengusahaannya atau pola pengelolaannya.

Sehubungan dengan uraian di atas, berdirinya PTPN-IV yang merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terletak di Kecamatan Pabatu, Kabupaten Serdang Badagei, tentunya memiliki dampak sosial. Sebagaimana dijelaskan oleh (Soedharto, 2000) bahwa Dampak sosial merupakan konsekuensi sosial yang menimbulkan akibat dari suatu kegiatan pembangunan ataupun penerapan suatu kebijakan dan program merupakan perubahan yang terjadi pada manusia dan masyarakat yang diakibatkan oleh aktivitas pembangunan. Dengan berdirinya PTPN-IV disana mengakibatkan pembangunan dan penggunaan lahan yang luas dapat menimbulkan dampak kepada kehidupan masyarakat sekitar.

Dampak tersebut berimbas kepada kehidupan sosial ekonomi masyarakat disekitar lokasi perkebunan PTPN-IV tersebut. Perubahan yang terjadi akibat berdirinya perkebunan kelapa sawit akan menimbulkan hal-hal positif atau negatif yang justru merugikan masyarakat sekitar perkebunan. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Dampak Keberadaan Perusahaan Kelapa Sawit PTPN-IV Terhadap Kesejahteraan Sosial Masyarakat dalam Pembangunan Wilayah di Desa Kedai Damar Kecamatan Pabatu Kabupaten Serdang Badagei”.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Seperti yang dijelaskan oleh (Creswell, 2014) bahwa penelitian kuantitatif merupakan pendekatan untuk menguji teori objektif dengan menguji hubungan antar variabel. Variabel ini, pada gilirannya, dapat diukur dengan menggunakan instrumen, sehingga data jumlah dapat dianalisis dengan menggunakan prosedur statistik. Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah: (1) observasi, (2) wawancara, (3) kuesioner/angket dan (4) dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data dilakukan dengan analisis kuantitatif.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Sejarah Singkat dan Perkembangan Perusahaan**

PT. Perkebunan Nusantara IV Unit Usaha Pabatu didirikan pada tahun 1938 oleh Maschapay Belanda dengan nama CMO (*Cultural Maschapay Onderniming*) yang mengusahakan tanaman tembakau, pada tahun itu juga berubah menjadi HU Bandar *Oil Elasiquenensis* pada tahun 1942 - 1945 dikuasai oleh pemerintah Indonesia, tepatnya pada saat revolusi fisik.

Pada 1947 sampai Desember 1957 kembali dikuasai oleh BOCM Belanda, tetapi pada 1958 dikuasai oleh pemerintah Indonesia, dengan nama PPN (Pusat Perkebunan Negara) IV dan bulan Januari 1963 diganti namanya menjadi PPN SUMUT ANTAN II yang mengolah kelapa sawit dan kakao (cokelat). Bulan Oktober 1978 berganti namanya menjadi PT. Perkebunan Nusantara IV Unit Usaha Pabatu. Berdasarkan Konstaterring No.: 110/-PPT/B, Menteri Dalam Negeri Cq. Direktorat Jendral Agraria melalui surat keputusan No: 19/HGU/DA/-1976 tanggal 26 Juni 1976, memberikan Hak Guna Usaha kepada PNP-IV Unit Usaha Pabatu atas arela seluas 5.770,07 hektar yang didasari atas pemeriksaan yang

dilakukan oleh panitia B yang menetapkan bahwa areal tersebut bebas dari penduduk rakyat. Selisih kurang atas luasan areal HGU seluas 403,50 ha yakni dari 6.173,53 ha menjadi 5.77,07 ha adalah setelah memperoleh izin pelepasan Asset dari Menteri yang berwenang diperuntukkan guna rencana umum tata ruang wilayah pemerintahan Kabupaten untuk kepentingan masyarakat.

Namun dari perkembangan dan perubahan yang ada hingga saat ini, berdasarkan Keputusan Kepala BPN RI dengan Surat No.: 40/HGU/BPN RI/2005 tanggal 19 April 2005, Keputusan Kepala BPN RI dengan Surat No.: 20-HGU-BPN RI-2005 tanggal 29 Mei 2007, memberikan Hak Guna Usaha kepada PTPN-IV Unit Usaha Pabatu atas areal seluas 5.754,04 ha. Sejarah tahun ketahun hingga terbentuknya PTPN IV Unit Usaha Pabatu adalah sebagai berikut :

1. Tahun 1938 – 1942 dikuasai oleh B.O.C.M
2. Tahun 1943 – 1945 dikuasai oleh pemerintahan Jepang
3. Tahun 1958 – 1959 diorganisasi menjadi PPN Baru
4. Tahun 1968 – 1978 menjadi PNP VI
5. Tahun 1978 – 1996 menjadi PTP VI
6. Pada bulan Maret 1996 sesuai PP No Tahun 1996, terjadinya peleburan PTP VI, VII, VIII, menjadi PTPN IV Unit Usaha Pabatu yang berpusat di Bah Jambi Pematang Siantar dan sekarang di Medan

PTPN IV Unit Usaha Pabatu juga memiliki dua buah pabrik pengolahan yang terdiri dari :

1. Pabrik Kelapa Sawit (PKS)  
Pabrik Kelapa Sawit Pabatu dibangun oleh Bandar *Oil Company Mashcapay* (BOCM) pada tahun 1940 dengan kapasitas design 30 ton TBS/jam.
2. Pabrik Pengolahan Inti Sawit (PPIS)  
Pabrik Pengolahan Inti Sawit dibangun pada tahun 1999 dengan kapasitas 16 ton/jam dan mulai beroperasi secara komersil pada bulan Januari tahun 2000.

Selain kedua pabrik diatas PTPN IV Unit Usaha Pabatu juga memiliki Power plant dengan kapasitas 3 Mwatt yang berbahan baku cangkang dan tandan kosong kelapa sawit sehingga menjadi sumber listrik. Unit Kebun Pabatu memiliki 7 afdeling dan masing-masing luas areal afdeling sebagai berikut :

1. Afdeling I memiliki luas areal 962,04 Ha
2. Afdeling II memiliki luas areal 780,00 Ha
3. Afdeling III memiliki luas areal 786,00 Ha
4. Afdeling IV memiliki luas areal 703,00 Ha
5. Afdeling V memiliki luas areal 858,00 Ha
6. Afdeling VI memiliki luas areal 821,00 Ha
7. Afdeling VII memiliki luas areal 844,00 Ha

Sehingga luas seluruh areal afdeling di PKS PTPN IV Unit Usaha Pabatu ialah 5.754,04 Ha. Unit Usaha Pabatu memiliki batas-batas kebun sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tebing Tinggi
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan PTPN III Kebun Gunung Para

3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kebun Sibulan dan Kebun PTPN IV Kebun Dolok Hilir
4. Sebelah Barat berbatasan dengan PTPN III Kebun Gunung Pamela.

### **Analisis Dampak Keadaan Sosial Masyarakat Sebelum Dan Sesudah Adanya Perusahaan PTPN - IV Pabatu.**

Pembangunan industri telah memberikan pengaruh secara langsung dan tidak langsung. Pengaruh langsung adalah kurangnya lahan pertanian sedangkan pengaruh tidak langsung adalah bergesernya mata pencaharian penduduk setempat ke bidang industri dan jasa perdagangan. Dampak dari keberadaan suatu perusahaan juga dapat dilihat dari dampak positif dan dampak negatif.

#### **Dampak Ekonomi**

Dalam kehidupan manusia harus memenuhi kebutuhan materialnya untuk melangsungkan hidupnya, hal tersebut dapat diwujudkan melalui pranata-pranata mereka dengan memanfaatkan sumber daya alam, modal dan tenaga kerja yang terbatas. Salah satu faktor yang berpengaruh dalam ekonomi masyarakat adalah tingkat pendapatan masyarakat. Bahwa pendapatan rumah tangga dapat berasal dari satu atau lebih macam sumber pendapatan. Sumber pendapatan tersebut ada yang berasal dari sektor perkebunan maupun dari luar sektor perkebunan. Pendapatan Masyarakat dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel 1. Dampak Ekonomi Masyarakat Dengan Adanya Perusahaan**

No	Pendapatan (Rp)	Sebelum		Sesudah	
		f	%	f	%
1.	1.000 – 999.000	36	39,56	-	
2.	1.000.000-1.999.000	27	29,67	7	7,69
3.	2.000.000-2.999.000	8	8,79	25	27,47
4.	3.000.000-3.999.000	12	13,19	36	39,56
5	4.000.000-4.999.000	6	6,59	19	20,88
6	>5.000.000	2	2,20	4	4,40
	<b>Jumlah</b>	<b>91</b>	<b>100</b>	<b>91</b>	<b>100</b>

Sumber : data primer diolah tahun 2016

Perubahan pendapatan yang dianalisis dalam penelitian ini adalah pendapatan masyarakat tahun 2015. Dampak ekonomi dengan keberadaan pabrik dapat terlihat jelas perkembangan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Hal ini dapat dilihat bahwa sebelum adanya pabrik pendapatan masyarakat mayoritas dibawah dari Rp 3.000.000, namun setelah adanya pabrik peningkatan pendapatan masyarakat begitu tinggi dan mayoritas pendapatan diatas Rp. 3.000.000. Keberadaan perusahaan PTPN. IV Pabatu memiliki dampak positif dari peningkatan pendapatan bagi masyarakat sekitarnya.

Dari tabel di bawah menunjukkan dampak keberadaan perusahaan kelapa sawit di Desa Kedai Damar sangat membawa dampak positif bagi perekonomian desa. Hal ini dibuktikan dengan setelah adanya perusahaan banyak sarana ekonomi yang dulunya tidak ada sekarang menjadi ada, seperti pasar, karena pasar tempat penduduk untuk berbelanja kebutuhan sehari - harinya begitupula dengan adanya supermarket. Dengan adanya rumah makan maka dapat menjadi tempat singgah musafir sehingga menambah pendapatan. Adanya bank akan memberikan keamanan dalam penyimpanan penghasilan penduduk dan dengan adanya ATM akan lebih mempermudah penduduk dalam pengambilan uang. Koperasi akan

membuat penduduk bisa memiliki tempat untuk meminjam uang tanpa bunga yang banyak. Dengan adanya bengkel, bengkel elektronik, akan memudahkan penduduk dalam perawatan kendaraannya. Foto copy, biro perjalanan, pangkas rambut, salon kecantikan, bengkel las, dan penyewaan alat pesta.

**Tabel 2. Sarana Ekonomi**

No	Sarana Ekonomi	Sebelum	Sesudah
1.	Pasar	Tidak Ada	
2.	Supermarket	Tidak Ada	Ada
3.	Restoran/RM	Tidak Ada	Ada
4.	Warung	Tidak Ada	Ada
5.	Toko	Tidak Ada	Ada
6.	Bank Umum	Tidak Ada	Ada
7.	Koperasi	Tidak Ada	Ada
8.	Bengkel	Tidak Ada	Ada
9.	Pangkas Rambut	Tidak Ada	Ada
10.	Salon Kecantikan	Tidak Ada	Ada
11.	Penyewaan Alat Pesta	Tidak Ada	Ada
12.	Penginapan	Tidak Ada	Tidak Ada
13.	Penggadaian	Tidak Ada	Tidak Ada

Sumber: data primer diolah tahun 2016

Melihat dari pembahasan tabel diatas dapat dilihat dengan keberadaan perusahaan kelapa sawit sangat berdampak positif bagi perekonomian masyarakat. Hal ini dapat dilihat sebelum adanya perusahaan sarana ekonomi seperti pasar belum ada dan setelah adanya perusahaan baru sarana ekonomi seperti pasar dibangun untuk meningkatkan perekonomian masyarakat kemudian berkembang diikuti sarana sosial ekonomi lainnya setelah adanya perusahaan seperti bank umum, bengkel, salon kecantikan, pangkas rambut, rumah makan dan supermarket yang sebelum adanya perusahaan belum ada kini menjadi ada setelah adanya perusahaan.

### **Pendidikan (Sarana Pendidikan)**

Pendidikan adalah usaha sadar dan sistematis untuk mencapai taraf hidup atau kemajuan yang lebih baik (pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat). Pendidikan meliputi pengajaran keahlian khusus dan juga sesuatu yang tidak dapat dilihat lebih mendalam yaitu pemberian pengetahuan, pertimbangan dan kebijaksanaan. Dengan adanya pendidikan maka dapat memanfaatkan sarana pendidikan yang ada dimana tingkat pendidikan (sarana pendidikan) sangat mempengaruhi terhadap kualitas berfikir, sikap dan bertingkah laku masyarakat dalam menjalani kehidupan mereka sehari-hari. Berikut digambarkan distribusi responden berdasarkan sarana pendidikan.

**Tabel 3. Sarana Pendidikan**

No	Sarana Pendidikan	Sebelum	Sesudah
1.	PAUD / TK	Belum Ada	Sudah Ada
2.	SD/MI	Belum Ada	Sudah Ada
3.	SMP/Sederajat	Belum Ada	Sudah Ada

4.	SMA/Sederajat	Belum Ada	Sudah Ada
----	---------------	-----------	-----------

Sumber: data primer diolah tahun 2016

Dari tabel diatas, tabel 3 menunjukkan dampak keberadaan perusahaan kelapa sawit di Desa Kedai Damar sangat membawa dampak positif bagi pendidikan khususnya sarana pendidikan desa. Hal ini dibuktikan dengan setelah adanya perusahaan banyak masyarakat yang lulusan Perguruan Tinggi. Tingkat pendidikan masyarakat dampak dari keberadaan pabrik dapat dilihat pada Tabel Berikut.

**Tabel 4. Tingkat Pendidikan Masyarakat**

No	Sarana Pendidikan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
		f	%	f	%
1.	SD	12	13,19	-	-
2.	SMP	18	19,78	7	7,69
3.	SMA	59	64,84	53	58,24
4.	S <sub>1</sub>	2	2,1,20	27	29,67
5	S <sub>2</sub>	-	-	4	4,40
<b>Jumlah</b>		<b>91</b>	<b>100</b>	<b>91</b>	<b>100</b>

Sumber: data primer diolah tahun 2016

### **Kesehatan**

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Namun dengan konsentrasi dan kuantitas tertentu, kehadiran limbah dapat berdampak negatif terhadap lingkungan terutama bagi kesehatan manusia, terutama pada kebutuhan sehari - hari penduduk tersebut, sehingga perlu dilakukan penanganan terhadap limbah. Berikut distribusi responden berdasarkan limbah dalam penelitian ini dapat dijelaskan dalam tabel 3 yang telah disajikan dibawah ini:

**Tabel 5. Limbah**

NO	Limbah	Kecenderungan	Frekuensi	Persentase
1.	Pencemaran	Ya	88	96,7
		Tidak	3	3,3
		<b>Total</b>	<b>91</b>	<b>100</b>
2.	Pengolahan	Ya	90	98,9
		Tidak	1	1,1
		<b>Total</b>	<b>91</b>	<b>100</b>

Sumber: data primer diolah tahun 2016

Dari tabel diatas, menunjukkan bahwa limbah perusahaan kelapa sawit tidak mencemari lingkungan dengan persentase 96,7% (88 responden), sehingga tidak mengganggu kesehatan warga sekitar. Selain itu, tabel tersebut juga menunjukkan bahwa limbah perusahaan telah dikelola oleh perusahaan dengan persentase 98, 9 % (90 responden) menyatakan bahwa limbah sudah dikelola dengan baik, sehingga tidak ada keluhan dari warga berkenaan dengan pengelolaan limbah.

Limbah tidak mencemari lingkungan dan sudah dikelola dengan baik oleh pihak perusahaan sehingga tidak ada masalah kesehatan yang ditimbulkan oleh keberadaan perusahaan.

### **Keamanan**

Keamanan adalah suatu keadaan yang bebas dari bahaya apapun. Namun kenyamanan itu tidak bisa didapatkan dan melindungi diri seseorang secara keseluruhan serta tidak

bergantung pada satu pengatasan keamanan saja. Contohnya perkelahian merupakan suatu perbuatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum, dimana perkelahian menunjukkan tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak secara bersamaan yang menimbulkan efek akan ketidaknyamanan antara keduanya. Timbulnya perkelahian karena keamanan yang tidak didapatkan secara keseluruhan. Berikut digambarkan distribusi responden berdasarkan keamanan.

**Tabel 6. Perkelahian Massal**

No	Perkelahian	Sebelum		Sesudah	
		Frekwensi	Persentase	Frekwensi	Persentase
1.	Ya	-	-	16	17,5
2.	Tidak	91	100	75	82,4
<b>Total</b>		<b>91</b>	<b>100</b>	<b>91</b>	<b>100</b>

Sumber: data primer diolah tahun 2016

Dari tabel diatas, tabel 6 menunjukkan bahwa sebelum adanya perusahaan tidak pernah terjadi perkelahian massal, hal ini dibuktikan dengan keseluruhan responden menyatakan tidak pernah terjadi perkelahian massal. Kemudian setelah adanya perusahaan sebanyak 17,5 % atau 16 responden menyatakan pernah terjadi perkelahian massal.

Hal ini menunjukkan bahwa setelah adanya perusahaan sesuai dengan penyampaian penduduk bahwa terjadi perkelahian massal disalah satu dusun yang sebelum keberadaan perusahaan tersebut tidak pernah terjadi perkelahian.

### Hubungan Sosial

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain dan merupakan makhluk yang terbuka, memiliki kebebasan dalam memilih suatu makna di setiap keadaan. Manusia bisa mengemban atau melakukan tanggung jawabnya terhadap setiap keputusan yang diambilnya dalam hidup secara kontinu. Oleh karena itu, manusia perlu berinteraksi dengan manusia lainnya untuk dapat hidup sebagai makhluk sosial. Interaksi sosial yang menjadi syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial ini merupakan hubungan sosial yang dinamis. Interaksi sosial menyangkut hubungan antar individu, antar kelompok, atau antar individu dengan kelompok. Berikut distribusi responden berdasarkan hubungan sosial dalam penelitian ini dapat dijelaskan dalam table 7 yang telah disajikan dibawah ini.

**Tabel 7. Interaksi Sosial**

No	Intensitas	Sebelum		Sesudah	
		Frekwensi	Persentase	Frekwensi	Persentase
1.	Selalu	54	57,1	91	100
2.	Sering	32	37,4	-	-
3.	Jarang	5	5,5	-	-
<b>Total</b>		<b>91</b>	<b>100</b>	<b>91</b>	<b>100</b>

Sumber: data primer diolah tahun 2016

Tabel 7 diatas, menggambarkan bahwa sebelum adanya perusahaan masyarakat Desa Kedai Damar dalam berintraksi dengan masyarakat sekitarnya masih sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan persentase 57,1% (54 responden) mengatakan selalu berinteraksi dibandingkan dengan persentase yang menjawab sering 37,4% (32 responden) dan jarang



5,5% (5 responden) sedangkan setelah adanya perusahaan yang menjawab selalu dengan persentase 100% (91 responden).

Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan intensitas interaksi antara sebelum dan sesudah adanya perusahaan, peningkatan yang terjadi sangat besar sehingga dapat disimpulkan tingkat interaksi masyarakat di Desa Kedai Damar sangat baik.

**Tabel 8. Gotong Royong**

No	Intensitas	Sebelum		Sesudah	
		Frekwensi	Persentase	Frekwensi	Persentase
1.	Selalu	85	93.4	1	1.1
2.	Sering	4	4.4	40	44.0
3.	Jarang	2	2.2	41	45.1
4.	Tidak pernah	0	0	9	9.9
<b>Total</b>		<b>91</b>	<b>100</b>	<b>91</b>	<b>100</b>

Sumber: data primer diolah tahun 2016

Dari tabel diatas, tabel 8 menunjukkan bahwa sebelum adanya perusahaan tingkat gotong royong masyarakat di Desa Kedai Damar masih sangat baik, hal ini ditunjukkan dengan persentase yang menjawab selalu 93,4% (85 responden), lalu yang menjawab sering dengan persentase 4,4% (4 responden), dan yang menjawab jarang 2,2% (2 responden) sedangkan sesudah adanya perusahaan tingkat gotong royong masyarakat di Desa Kedai Damar dapat dikatakan sangat kurang. Hal ini ditunjukkan dengan persentase yang menjawab selalu 1,1% (1 responden), lalu yang menjawab sering dengan persentase 44,0% (40 responden), lalu menjawab jarang dengan persentase 45,1% (41 responden), dan menjawab tidak pernah dengan persentase 9,9 % (9 responden).

Hal ini menunjukkan tingkat gotong royong di Desa Kedai Damar mengalami penurunan yang sangat besar ketika sebelum adanya perusahaan masyarakat sekitar selalu mengadakan gotong royong. Namun setelah adanya perusahaan masyarakat menjadi jarang melakukan gotong royong jadi dalam hal ini perusahaan membawa dampak negatif terhadap tingkat gotong royong di Desa Kedai Damar.

### **Sarana Sosial / Publik**

Sarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama / pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja. Sarana merupakan seperangkat alat yang digunakan dalam suatu proses kegiatan baik alat tersebut adalah merupakan peralatan pembantu maupun peralatan utama, yang keduanya berfungsi untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai. Dengan adanya sarana maka kegiatan akan lebih mudah dilaksanakan. Berikut digambarkan distribusi responden berdasarkan sarana sosial publik.

**Tabel 9. Sarana Sosial Publik**

No	Sarana Sosial Publik	Sebelum	Sesudah
1.	Jalan Raya	Tidak ada	Ada
2.	Rambu-rambu jalan	Tidak ada	Ada
3.	Angkutan umum	Tidak ada	Ada
4.	Saluran air	Tidak ada	Ada
5.	Jembatan	Tidak ada	Ada

6.	Lampu jalan	Tidak ada	Ada
7.	Rumah sakit	Tidak ada	Ada
8.	Puskesmas	Tidak ada	Ada
11.	Apotek	Tidak ada	Ada
12.	Pangkalan/terminal desa	Tidak ada	Ada

Sumber: data primer diolah tahun 2016

Dari tabel Tabel 9 menunjukkan dampak keberadaan perusahaan kelapa sawit di Desa Kedai Damar sangat membawa dampak positif bagi sarana sosial publik di desa. Hal ini dibuktikan dengan setelah adanya perusahaan banyak sarana sosial publik yang dulunya tidak ada sekarang menjadi ada, seperti Jalan raya, dengan adanya jalan raya maka penduduk lebih mudah untuk bersosialisasi terhadap penduduk yang lain terutama dengan jarak yang jauh. Selain itu ada juga Rambu-rambu jalan, dengan adanya rambu-rambu jalan akan mengurangi terjadinya kecelakaan karena pengguna jalan lebih patuh pada rambu-rambu tersebut dan menjadikannya sebagai patokan berkendaraan. Ada juga saluran air, dengan adanya saluran air maka kebutuhan penduduk lebih terjamin karena penduduk membutuhkan air untuk melangsungkan hidupnya. Selanjutnya dibangun juga jembatan, dengan begitu lebih mudah penduduk untuk berhubungan dengan penduduk di desa seberang. Didirikan juga puskesmas, membuat masyarakat bisa memeriksakan kesehatannya lebih cepat dan dapat mendapatkan penanganan terlebih dahulu sebelum di rujuk ke RS jika penyakitnya parah begitu juga dengan didirikannya posyandu, berarti penduduk bisa mendapatkan imunisasi lengkap dengan rutinnya menghadiri posyandu setiap bulannya. Demikian pula klinik, dan apotek, penduduk dapat membeli obat sesuai dengan kebutuhannya lebih dekat dari tempat tinggalnya. Walaupun sampai saat ini masih tetap belum ada seperti PLN, rumah sakit, panti asuhan, kantor pos, lampu jalan dan terminal namun tidak menutup kemungkinan untuk menjadi ada di masa yang akan datang.

Sarana sosial publik pada tahun 2000 seperti jalan raya belum terbangun sebelum adanya perusahaan dan setelah berdirinya perusahaan pada tahun 2007 barulah akses jalan raya dibangun hal ini untuk memudahkan masyarakat ataupun perusahaan dalam menjalankan aktifitasnya dan dengan dibangunnya akses jalan raya di Desa Kedai Damar banyak sarana publik mengalami peningkatan seperti rambu jalan sebelum adanya perusahaan belum terdapat rambu jalan dan setelah beroperasinya atau adanya perusahaan baru diadakan untuk mempermudah masyarakat yang baru datang atau bertransmigrasi kedesa Kedai Damar dan dengan bertambahnya transmigran atau yang menjadi penduduk asli sekarang di desa Kedai Damar dari tahun 1990 sampai sekarang masih menetap maka dibangun sarana sosial lainnya untuk kesehatan seperti puskesmas, posyandu, klinik, apotek, yang sebelum adanya perusahaan belum ada dan setelah adanya perusahaan barulah sarana tersebut diadakan.

Kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitar sangat diperlukan untuk menjaga kestabilan keamanan lingkungan dan menjaga kontinuitas produksi dan nama baik pabrik pada pihak lain. Adapun bentuk - bentuk kontribusi pabrik yang telah diberikan, yaitu:

- a. Pemberian bantuan pembangunan masjid
- b. Membangun jalan jembatan
- c. Memberi santunan kepada Fakir Miskin
- d. Pembinaan Olahraga di Desa sekitar perusahaan

e. Pemberian bantuan dana partisipasi pada Hari Kemerdekaan RI

Pengembangan perkebunan di pedesaan telah membuka peluang kerja bagi masyarakat yang mampu untuk menerima peluang tersebut. Dengan adanya perusahaan perkebunan, mata pencaharian masyarakat tempatan tidak lagi terbatas pada sektor primer dalam memenuhi kebutuhan keluarganya, tetapi telah memperluas ruang gerak usahanya pada sektor tertier. Berbagai sumber pendapatan yang memberikan andil yaitu pedagang (dagang barang-barang harian, dagang karet, tiket angkutan dan penjual es), pegawai (guru, pemerintahan desa), industri rumah tangga (industri tahu, roti, dan percetakan genteng), buruh kasar, nelayan, pencari kayu di hutan dan tukang kayu.

Selain besaran jumlah pendapatan pada masing-masing rumah tangga petani kelapa sawit, hal yang perlu dicermati dalam mengamati dampak pelaksanaan investasi perkebunan adalah timbulnya usaha-usaha baru yang dikelola oleh masyarakat. Kegiatan usaha tersebut pada dasarnya merupakan upaya pemanfaatan peluang usaha yang tercipta sebagai akibat adanya mobilitas penduduk, baik yang terpengaruh secara langsung maupun sebagai akibat usaha yang tercipta oleh adanya pengaruh tidak langsung dari pembangunan perkebunan yang memungkinkan terbukanya peluang usaha lainnya.

### **Infrastruktur**

Pengaruh adanya perusahaan PTPN IV Pabatu dapat dilihat dari terjadinya perubahan yang bersifat fisik berupa dibangunnya jalan dan infrastruktur untuk memudahkan transportasi pengangkutan bahan baku maupun pengangkutan hasil industri, penyerapan tenaga kerja lokal, serta kontribusi industri tersebut kepada masyarakat pedesaan disekitar industri. Laba industri selain di potong pajak dan retribusi kepada pemerintahan (daerah) juga dapat berpartisipasi kepada pembangunan desa setempat.

### **Analisis Pengaruh Keberadaan PTPN-IV Terhadap Pengembangan Wilayah Di Desa Kedai Damar, Kecamatan Pabatu Kabupaten Serdang Bedagai**

Proses pembangunan dengan adanya investor dibidang perusahaan terutama PTPN-IV diharapkan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan produksi untuk kebutuhan di dalam negeri dan luar negeri serta kesejahteraan masyarakat sekitar lokasi perkebunan menuju taraf hidup yang lebih baik. Kemudian diharapkan dapat meningkatkan pendapatan perkapita, pemerataan pendapatan, membuka lapangan kerja baru serta meningkatkan usaha masyarakat sekitar perusahaan. Dalam perkembangan perusahaan disuatu wilayah tidak semuanya menonjol. Ada yang lebih menonjol dibandingkan yang lainnya. Untuk itu suatu wilayah harus lebih peka dalam menganalisis industri yang sesuai dengan keberadaan sumber daya yang ada dan harus dikembangkan. Dengan demikian agar peranan industri diarahkan pada industri yang memiliki keunggulan aglomerasi. Keberadaan Perusahaan pada suatu daerah dengan sifat aglomerasi maka perusahaan tersebut berkontribusi dan peduli terhadap pemerintah dan masyarakat

Besar kecilnya kepedulian perusahaan tersebut terhadap desa sekitarnya tentunya akan menimbulkan juga terhadap besar kecilnya persepsi penerimaan masyarakat terhadap keberadaan operasionalisasi industri tersebut di desanya. Kabupaten Segei mempunyai kebijaksanaan Tata Ruang Daerah menyangkut daerah perkotaan dan pedesaan yang salah

satu isinya: daerah pedesaan pengembangannya diarahkan sebagai pusat produksi, penyediaan tenaga kerja, penyediaan bahan baku industri dan daerah penyangga lingkungan hidup. Dengan demikian perlu pengendalian penggunaan tanah pertanian subur dengan kepentingan non pertanian, termasuk penyelamatan, pelestarian dan peningkatan kemampuan sumber alam dan lingkungan hidup.

### **Peningkatan Perekonomian Masyarakat Sekitar PTPN IV**

Keberadaan PTPN IV Pabatu menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan perekonomian masyarakat disekitar perusahaan. Jika dilihat dari lokasi perusahaan yang berdekatan dengan kawasan permukiman sangat jelas terjadi peningkatan kesejahteraan. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan pendapatan masyarakat dengan secara otomatis maka kesejahteraan semakin meningkat karena kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sudah semakin terjamin sehingga dengan terpenuhinya kebutuhan sandang dan pangan masyarakat sudah mampu meningkatkan kepada kebutuhan papan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi mencerminkan distribusi pendapatan

Pembangunan perkebunan kelapa sawit bertujuan untuk menghilangkan kemiskinan dan keterbelakangan khususnya di daerah pedesaan, di samping itu juga memperhatikan pemerataan perekonomian antar golongan dan antar wilayah. Pembangunan pertanian yang berbasis perkebunan dalam arti luas bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat sehingga terjadi suatu perubahan dalam pola hidup masyarakat di sekitarnya.

### **Nilai Ekonomi Lingkungan**

Nilai ekonomi lingkungan yang diperoleh dari keberadaan PTPN IV Pabatu adalah kontribusi dari perusahaan dalam hal WTP (*Willingness To Pays*). Kemauan atau keinginan membayar untuk membayar atau mengeluarkan uang dalam rangka memperbaiki kondisi lingkungan sesuai dengan standar yang diinginkannya. Kesediaan membayar setiap individu didasarkan atas pertimbangan biaya dan manfaat yang akan diperoleh, dalam hal ini WTP merupakan nilai kegunaan potensial dari sumberdaya alam dan jasa lingkungan. Penghitungan WTP yang dikaitkan dengan peningkatan kualitas dan degradasi lingkungan dapat dilakukan.

### **Indek Kesejahteraan Masyarakat**

Aktivitas pembangunan perkebunan kelapa sawit yang melibatkan banyak tenaga kerja dan investasi yang relatif besar untuk industri hilirnya, diperkirakan secara positif merangsang, menumbuhkan dan menciptakan lapangan kerja serta lapangan berusaha. Melalui kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan selama proses kegiatan perkebunan kelapa sawit dan pembangunan industri hilirnya akan mempunyai keterkaitan ke belakang (*backward linkages*). Pada proses kegiatan ini akan muncul antara lain jasa kontruksi, jasa buruh tani, jasa angkutan, perdagangan pangan dan sandang, perdagangan peralatan kerja serta bahan dan material yang dibutuhkan selama proses tersebut. Sedangkan pada kegiatan ekonomi waktu pascapanen dan proses produksi akan mempunyai keterkaitan ke depan (*foreward linkages*). Proses *foreward linkages* yang diperkirakan akan muncul adalah sektor jasa, antara lain: angkutan, perhotelan, koperasi, perbankan, perdagangan, industri kecil di pedesaan yang memproduksi alat produksi pertanian. Semua aktivitas ini akan meningkatkan indeks kesejahteraan masyarakat di daerah sekitarnya.

---

---

## **PEMBAHASAN**

### **Tingkat Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat di Desa Kedai Damar Pabatu Kecamatan Pabatu, Kabupaten Serdang Bedagei.**

Secara umum dapat diungkapkan bahwa dengan adanya kawasan perkebunan telah menyebabkan munculnya sumber-sumber pendapatan baru yang bervariasi. Sebelum dibuka kawasan perkebunan di pedesaan, sumber pendapatan masyarakat relatif homogen, yakni menggantungkan hidupnya pada sektor primer, memanfaatkan sumberdaya alam yang tersedia seperti apa adanya tanpa penggunaan teknologi yang berarti.

Kondisi sebelum pembangunan perkebunan dengan setelah adanya kegiatan perkebunan pendapatan masyarakat semakin beragam. Keragaman ini semakin memperkuat stabilitas struktur pendapatan rumah tangga karena memberikan alternatif pemasukan bagi keluarga pada saat sumber pendapatan lain mengalami kegagalan usaha.

### **Dampak Keadaan Sosial Masyarakat Sebelum Dan Sesudah Adanya Perusahaan PTPN-IV Pabatu**

Kegiatan pembangunan perkebunan telah menimbulkan mobilitas penduduk yang tinggi. Akibatnya di daerah-daerah sekitar pembangunan perkebunan muncul pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di pedesaan. Kondisi ini menyebabkan meningkatnya daya beli masyarakat pedesaan, terutama terhadap kebutuhan rutin rumah tangga dan kebutuhan sarana produksi perkebunan kelapa sawit.

Sesudah Adanya Perusahaan PTPN-IV Pabatu setiap masyarakat mengalami perubahan - perubahan. Perubahan - perubahan pada masyarakat berupa perubahan norma-norma, pola perilaku seseorang, organisasi, susunan stratifikasi masyarakat dan juga lembaga kemasyarakatan disekitar perusahaan. Perubahan dalam masyarakat tersebut dilalui dan dalam proses sehingga pada akhirnya perubahan sosial yang ada pada masyarakat diakui dan digunakan oleh masyarakat.

### **Pengaruh Keberadaan PTPN-IV Terhadap Pengembangan Wilayah Di Desa Kedai Damar, Kecamatan Pabatu Kabupaten Serdang Bedagei**

Apabila dikaji dari struktur biaya perusahaan perkebunan kelapa sawit yang teknis operasionalnya dirancang lebih banyak menggunakan teknik manual, biaya yang berkaitan dengan tenaga kerja langsung serta tenaga teknis di lapangan memiliki porsi yang cukup besar. Berdasarkan hal tersebut, perputaran uang yang terjadi di lokasi dalam jangka panjang diperkirakan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi di wilayah ini dengan tumbuhnya perdagangan dan jasa. Hal ini memberikan arti bahwa kegiatan perkebunan kelapa sawit di pedesaan menciptakan multiplier effect, terutama dalam lapangan pekerjaan dan peluang berusaha.

Pembangunan perkebunan kelapa sawit telah memberikan dampak ekonomi secara berantai. Subsektor perkebunan memberikan kontribusi pembangunan di pedesaan, sehingga dapat menekan ketimpangan ekonomi antar wilayah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Az-zahra, A. (2020). Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Desa (Studi Di PTPN IV Unit Kebun Bah Jambi) (Doctoral dissertation).

- 
- Botha, P. M., & Itu, Y. (2022). Analysis of Social, Economic and Environmental Impacts on Village Communities Household Life after Mangrove Ecotourism Existence in Nira Nusa Village, Maurole District, Ende Regency. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 5(4), 30612-30620.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*, 4 Edition. London: Sage
- Defriza, R. (2021). Kajian Pengaruh Kawasan Industri Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Dan Infrastruktur Di Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Fahrudin, Adi. (2012). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Refika Aditama
- Manurung, S. S., & Sos, S. Dampak Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Surplus Pendapatan Masyarakat (Study Kasus Kec. Bandar Pasir Mandoge, Kab. Asahan).
- Pratama, A. (2019). Dampak Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Desa Karya Jadi Kabupaten Langkat) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Riyono, A. (2022). Peran Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Meningkatkan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Wahau Baru Kabupaten Kutai Timur.
- Ruslan, I. (2014). Perubahan sosial dan ekonomi masyarakat akibat perkebunan kelapa sawit. *Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah*, 9(2), 32-51.
- Siregar, D. A. F., Santosa, T. N. B., & Suswatiningsih, T. E. (2016). Dampak Berdirinya Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Masyarakat di Sekitar Perusahaan. *Jurnal Agromast*, 1(2).
- Tarigan, W. J. (2021). *Buku Ajar Akuntansi Lingkungan*. Global Aksara Pres



**DAMPAK RELOKASI PUSAT PEMERINTAHAN TERHADAP EFESIENSI  
PELAYANAN MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN WILAYAH  
KABUPATEN SIMALUNGUN**

**Ridwan Toni Purba<sup>1</sup>, MARIHOT MANULLANG<sup>2</sup>, ROBERT TUA SIREGAR<sup>3</sup>, SARINTAN E DAMANIK<sup>4</sup>**

Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota  
Sekolah Pascasarjana Universitas Simalungun

**ABSTRAK**

Dampak relokasi pusat pemerintahan Kabupaten Simalungun ditinjau dari; aspek keterjangkauan pelayanan (*affordability*), aspek kecukupan pelayanan (*recoverability*), aspek kesesuaian pelayanan (*replicability*), dan aksesibilitas terhadap pengembangan wilayah Kabupaten Simalungun. Dengan menggunakan metode kombinasi antara kualitatif dan kuantitatif dalam penelitian ini. Maka relokasi pusat pemerintahan Kabupaten Simalungun memberi pengaruh terhadap pelayanan masyarakat dan Pengembangan wilayah. Dari hasil analisis Chi Square diperoleh hasil adalah variable pelayanan yang paling dipengaruhi adalah variabel independen yang paling utama dipengaruhi oleh relokasi di Kecamatan Raya dengan nilai Chi Square 47.367. Dominan diakibatkan timbulnya aktivitas - aktivitas masyarakat di Pusat Pemerintahan tersebut. Fasilitas umum pemerintahan dilakukan pembangunan fisik dan non fisik yang dipengaruhi oleh relokasi memperoleh nilai Chi Square 44.049. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan sector pelayanan yang mengikuti relokasi untuk mengantisipasi perkembangan wilayah Simalungun.

**Kata Kunci:** Pengembangan Wilayah, Pelayanan Masyarakat

**ABSTRACT**

*The impact of the relocation of the Simalungun Regency government center in terms of; aspects of service affordability (affordability), aspects of service adequacy (recoverability), aspects of suitability of services (replicability), and accessibility to regional development of Simalungun Regency. By using a combination of qualitative and quantitative methods in this study. Then the relocation of the Simalungun Regency government center has an influence on community services and regional development. From the results of the Chi Square analysis, the result is that the service variable that is most affected is the independent variable that is most affected by relocation in Raya District with a Chi Square value of 47,367. Dominance caused by the emergence of community activities in the Central Government. Government public facilities carried out physical and non-physical development which were affected by relocation obtained a Chi Square value of 44,049. This condition indicates that the development of the service sector following the relocation is to anticipate the development of the Simalungun area*

*Keyword : Regional Development, Community Service*

**PENDAHULUAN**

Kabupaten Simalungun merupakan salah satu daerah kabupaten yang terdapat di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Sebelum tahun 2008 Ibukota Kabupaten Simalungun berada dalam wilayah kota Pematang Siantar. Pada tahun 2008 Ibukota Kabupaten Simalungun yang berkedudukan di wilayah Pematangsiantar di pindahkan ke Pematang Raya di Kecamatan Raya.

Perpindahan Ibukota Kabupaten Simalungun dari Wilayah Kota Pematangsiantar ke Pematang Raya di Kecamatan Raya mengacu pada konsep keadilan dan pemerataan. Pada tanggal 28 Juli 1999 Pemerintah menyetujui perpindahan Ibukota Kabupaten Simalungun melalui Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 1999 tentang pemindahan ibukota daerah Kabupaten Simalunngun dari wilayah daerah Kota Pematangsiantar ke Kecamatan Raya di wilayah Kabupaten Simalungun. Pemindahan daerah Ibukota Kabupaten Simalungun tersebut sebelumnya telah mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Simalungun pada tanggal 8 Oktober 1996. Pada tanggal 23 Juni 2008 Pematang Raya resmi menjadi Ibukota Kabupaten Simalungun, maka sejak saat itu seluruh aktifitas roda pemerintahan Kabupaten Simalungun berpusat di Kota Pematang Raya. Dimana dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 1999 tersebut dibutuhkan waktu hampir sembilan tahun. Dan sejak saat itu kota Pematang Raya yang sebelumnya hanya merupakan sebuah ibukota kecamatan Raya kini juga meningkat statusnya menjadi Ibukota Kabupaten Simalungun.

Perpindahan Ibukota Kabupaten bukan sekedar persoalan pusat pemerintahan, namun hal ini merupakan perubahan yang sangat mendasar, yakni perubahan paradigma lama ibukota kabupaten sebagai pusat seluruh aktifitas pemerintahan ke paradigma baru bahwa ibukota kabupaten direncanakan sedemikian rupa untuk menjadi pusat pelayanan. Dari sisi nasional, hal ini sekaligus diharapkan mampu mengatasi ketimpangan pembangunan dengan merencanakan pembangunan yang lebih merata dan seimbang (Purba, 2006)

Untuk meraih pembangunan yang nyata di Kabupaten Simalungun dibutuhkan suatu konsep perencanaan pembangunan yang memberikan gambaran tentang pilihan tujuan yang di prioritaskan, pengalokasian sumber daya alam dan peningkatan sumber daya manusia. Hal ini akan menunjang roda pembangunan ekonomi yang lebih efektif dan efisien serta penetapan langkah yang lebih baik di masa yang akan datang. Tujuan dilaksanakan pembangunan pada hakekatnya hanyalah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Peningkatan kesejahteraan tersebut sangat dimungkinkan apabila pendapatan penduduk mengalami peningkatan yang sangat berarti, sehingga mampu memenuhi kebutuhan mendasar dalam kehidupan sehari - hari. Peningkatan kesejahteraan penduduk akan tercapai melalui proses pembangunan secara bertahap dan berkesinambungan, baik berupa pembangunan ekonomi, fisik, sosial dan pembangunan sarana lainnya.

Dari sektor lain kemajuan suatu daerah dapat dilihat dari besarnya penyerapan tenaga kerja, hal ini tidak terlepas dari semakin baiknya pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja dapat merangsang pertumbuhan ekonomi, jumlah angkatan kerja yang lebih besar berarti akan menambah jumlah tenaga produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar akan meningkatkan luasnya pasar domestik. Namun demikian efek positif dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi tergantung pada kemampuan sistem perekonomian tersebut untuk menyerap dan secara produktif mempekerjakan tambahan angkatan kerja (Todaro, 2000).

Sejak tahun 2008 terutama di kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, Kota Pematang Raya telah menjadi sebuah kawasan yang berkembang dengan pesat. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi maupun pertumbuhan fisik dengan berbagai

aspek perluasannya. Karena Kota Pematang Raya merupakan simpul pusat pemerintahan dan pusat pelayanan bagi masyarakat di seluruh kabupaten Simalungun. Perkembangan Kota Pematang Raya yang pesat berakibat pada peningkatan jumlah penduduk dan aktifitasnya, sehingga kebutuhan akan sumber daya dan ruang turut meningkat. Selain itu, dengan perannya saat ini sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan, maka keberadaan Kota Pematang Raya bagi masyarakat simalungun sangat penting. Untuk saat ini dan di waktu yang akan datang Kota Pematang Raya menjadi tumpuan perkembangan Kabupaten Simalungun. Dengan demikian, penggunaan lahan di Pematang Raya khususnya di kompleks perkantoran Kabupaten Simalungun dan sekitarnya dalam pemanfaatannya harus direncanakan sesuai dengan kebutuhan.

Kompleks perkantoran Kabupaten Simalungun saat ini menjadi bagian dari perkembangan kota yang pesat ditandai dengan semakin banyaknya bangunan-bangunan berdiri yang bergerak dalam bidang perdagangan dan pelayanan jasa, yang berarti semakin berkurangnya lahan pertanian, pemukiman yang semakin padat, serta ramainya aktifitas di sepanjang jalan dari desa Damei Raya hingga ke Raya Tengah. Untuk mengarahkan perkembangannya di masa yang akan datang sebuah kota yang memiliki prospek perkembangan yang pesat memerlukan suatu konsepsi seluruh perubahan yang berkelanjutan, yang mampu menampung arus perkembangan dengan tetap mempertahankan kawasan yang berfungsi melindungi kehidupan masyarakat sekitar. Dalam jangka panjang pembangunan dan perkembangan Kota Pematang Raya harus terjamin sesuai dengan tujuan yang ingin di capai sekaligus terjamin tidak akan timbul dampak terhadap lingkungan sekitar. Kota Pematang Raya memiliki prospek perkembangan ekonomi ditinjau dari potensi yang dimilikinya, seperti letak lokasi yang cukup strategis menghubungkan langsung Kota Pematang Siantar dengan Kabupaten Karo, tingkat keamanan kota yang sudah kondusif dan dukungan wilayah sekitarnya. Namun, hal yang perlu digaris bawahi adalah bagaimana memanfaatkan potensi tersebut menjadi peluang yang bermanfaat bagi perekonomian masyarakat setempat.

Kehadiran pusat pemerintahan Kabupaten Simalungun di Pematang Raya diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitarnya. Dampak yang dirasakan masyarakat selain pelayanan pemerintahan juga *multiplier effect* dari keberadaan Kantor Pemerintahan Kabupaten Simalungun terhadap masyarakat sekitarnya. Bentuk *multiplier effect* keberadaan Kantor Pemerintahan Kabupaten Simalungun terhadap masyarakat sekitar dapat dilihat dan dirasakan oleh masyarakat Simalungun umumnya dan masyarakat yang berdomisili di sekitar kompleks perkantoran pada khususnya. Dengan melihat kondisi keberadaan wilayah di sekitar kompleks perkantoran menunjukkan bahwa beberapa kegiatan ekonomi yang telah berkembang setelah perpindahan kantor Pemerintahan Kabupaten Simalungun ke Pematang Raya antara lain adalah telah berkembang unit-unit usaha percetakan dan penggandaan, jasa perumahan atau rumah-rumah kos, rumah makan, salon dan kecantikan, bengkel, serta jasa-jasa lain yang turut berkembang seiring perkembangan kota Pematang Raya sebagai ibukota Kabupaten Simalungun. Berdasarkan beberapa uraian yang telah diuraikan di atas, penulis merasa penting untuk membahas tentang dampak keberadaan Kantor Pemerintahan Kabupaten Simalungun Pematang Raya terhadap pendapatan usaha kecil serta pola ruang di wilayah sekitarnya.

---

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah dalam rangka pemecahan suatu permasalahan. Penelitian ini mengenai dampak relokasi pusat pemerintahan Kabupaten Simalungun terhadap sosial ekonomi masyarakat dan pengembangan wilayah ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Maksud dari penelitian ini adalah menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik (Sugiyono, 2008). Adapun metode pengumpulan data dilakukan, yaitu : Wawancara, Studi Dokumen, Penyebaran daftar pertanyaan (Kuesioner). Sedangkan pengolahan data dan proses pengujian statistik diolah dengan menggunakan program SPSS.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Wilayah Penelitian**

Kecamatan Raya merupakan salah satu dari tiga puluh satu kecamatan di Kabupaten Simalungun dengan ibukota Pernatang Raya. Secara geografis, Kecamatan Raya terletak antara 05° Lintang Utara dan 100° Bujur Timur; dengan luas wilayah 328,5 Km<sup>2</sup> atau 32850 Ha, berada pada ketinggian rata - rata 900 meter dari permukaan laut (dpl). Kecamatan Raya memiliki batas wilayah yang strategis dengan kecamatan yang ada di kabupaten Simalungun. Bila dirinci batas wilayah Kecamatan Raya sebagai berikut:

1. Sebelah Utara Kecamatan Raya Kahean Silau Kahean
2. Sebelah Selatan Kecamatan Dolok Pardamean
3. Sebelah Barat Kecamatan Purba
4. Sebelah Timur Kecamatan Panei

Kecamatan Raya merupakan ibu kota kabupaten Simalungun dengan mengacu kepada konsep keadilan dan pemerataan, pemerintah melalui PP No. 70/1999 tanggal 28 Juli 1999, menyetujui pemindahan ibukota daerah Kabupaten Simalungun dari wilayah daerah Kota Pematangsiantar ke Kecamatan Raya di Wilayah Daerah Kabupaten Simalungun. Pemindahan ibukota daerah Kabupaten Simalungun dari wilayah daerah Kota Pematangsiantar ke Kecamatan Raya di Wilayah Daerah Kabupaten Simalungun.

Keputusan tersebut tentu telah mempertimbangkan aspek kelayakan, potensi dan dampak positif dalam jangka pendek dan jangka panjang bagi pembangunan daerah Simalungun. Pemindahan daerah ibukota Kabupaten Simalungun tersebut telah mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Simalungun (Nomor 4/DPRD/1996) tanggal 8 Oktober 1996 (3 tahun sebelumnya). Perpindahan tersebut dimaksudkan agar dapat dilakukan pembangunan di Daerah Kabupaten Simalungun dengan mengatur tata ruang wilayah. Namun setelah dievaluasi lebih dari satu dekade, pengaturan tata ruang tersebut tidak bisa dilaksanakan, karena Ibukota Daerah Kabupaten Simalungun saat ini masih berada dalam wilayah Daerah Kota Pematang Siantar.

Perpindahan ibukota kabupaten bukan sekedar persoalan pusat pemerintahan, namun hal ini merupakan perubahan yang sangat mendasar, yakni perubahan paradigma lama ibukota kabupaten sebagai pusat seluruh aktivitas pemerintahan ke paradigma baru bahwa ibukota kabupaten direncanakan sedemikian rupa untuk menjadi pusat pelayanan. Luas wilayah Kecamatan Raya sebesar 328,50 Km<sup>2</sup> atau 32.850 Ha.

## Penduduk

Penduduk berdasarkan luas wilayah dan kepadatan penduduk per nagori/Kelurahan di kecamatan Raya tahun 2015 tercatat sebanyak 30 697 jiwa yang terdiri dari laki – laki 15.703 jiwa dan perempuan sebanyak 14.994 jiwa- Kepadatan penduduk rata – rata 117,3 jiwa per km<sup>2</sup>. Penduduk Kecamatan Raya terhimpun kedalam 7.621 kepala keluarga.

## HASIL PENELITIAN

### Karakteristik Responden

Gambaran umum responden mencakup karakteristik individu yaitu usia, pendidikan dan pekerjaan. Untuk lebih memberikan gambaran secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut. Umur responden yang paling banyak adalah pada kelompok umur 19-31 tahun yaitu 52,53%, selanjutnya rentang umur 32- 44 tahun sebanyak 32,32% dan umur 45-57 tahun sebanyak 15,15 %. Ini member' makna bahwa responden yang berperan dalam kegiatan sektor pertanian dan jasa di Kelurahan Pematang Raya, Desa Sondi Raya dan Raya Bayu adalah kelompok umur yang produktif.

**Tabel 1. Distribusi Responden berdasarkan Kelompok Usia**

No	Usia (Tahun)	Jumlah Responden (orang)	Persentase
1	19-31	52	52.53
2	32-44	32	32.32
3	45-57	15	15.15
	Jumlah	99	100.0

Sumber Data Primer 2016

Pekerjaan responden mayoritas adalah bertani sebanyak 61,62 %, wiraswasta 24,24 % dan PNS/TNI/POL.RI sebanyak 14,14 % . Jenis pekerjaan utama responden in' memberikan gambaran bahwa masyarakat Kelurahan Pematang Raya, Desa Sondi Raya dan Raya Bayu yang menjadi lokasi penelitian dominan bekerja pada sektor pertanian.

**Tabel 2. Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan**

No	Pekerjaan	Jumlah Responden (orang)	Persentase
1	Bertani	61	61.62
2	Wiraswasta	24	24.24
3	PNS/TNI/POLRI	14	14.14
	Jumlah	99	100.0

Sumber : Data Primer 2015

Dari komposisi pendidikan ini terlihat bahwa tingkat pendidikan responden termasuk kategori menengah ditandai dengan Jumlah responder yang tamatan SLTA yang cukup banyak yaitu sebesar 49,49%, selanjutnya tamat SD sebesar 23,23%, tamat SLTP sebesar 21,21% dan tamat Akademi/Sarjana sebesar 6,06 %. Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan dapat dilihat pada Tabel 3.

**Tabel 3. Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Pendidikan	Jumlah Responden (orang)	Persentase
1	Tamat SD	23	23.23
2	Tamat SMP	21	21.21
3	Tamat SLTA	49	49.49

4	Akademi/Sarjana	6	6.06
	Jumlah	99	100

Sumber : Data Primer 2016

Berdasarkan jenis kelamin sebagai responden 67,68 % laki-laki dan 32,32 % perempuan. Distribusi responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 4.

**Tabel 4. Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden (orang)	Persentase
1	Perempuan	67	67.68
2	Laki-Laki	32	32.32
	Jumlah	99	100

Sumber : Data Primer 2016

### **Analisis Dampak Relokasi Pusat Pemerintahan Kabupaten Simalungun, Ditinjau dari Aspek Keterjangkauan Pelayanan, Kecukupan Pelayanan, Kesesuaian Pelayanan**

Untuk melihat dampak relokasi pusat Pemerintahan Kabupaten Simalungun terhadap pengembangan wilayah Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun ditinjau berdasarkan aspek keterjangkauan pelayanan (*affordability*), *-kecukupan* pelayanan (*recoverability*), kesesuaian pelayanan (*replicability*), meliputi pelayanan:

- a) Administrasi kependudukan dan catatan sipil, meliputi : (a) Pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP), (b) Pengurusan Akte Kelahiran, (c) Pengurusan Kartu Keluarga/RunahTangga, (d) Pengurusan Surat Keterangan lainnya.
- b) Pelayanan Perizinan, meliputi: (a) Pengurusan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan (b) Pengurusan IMB (Izin Mendin'kan-Bangunan).
- c) Pelayanan Tenaga Kerja (Pengurusan Surat Keterangan Pancari Kerja)
- d) Pelayanan Kesehatan (Pengurusan Surat Keterangan Sehat/Sakit)

Sedangkan untuk melihat dampak relokasi pusat Pemerintahan Kabupaten Simalungun ditinjau dari aspek pendapatan masyarakat dilihat berdasarkan (pendapatan rumah tangga) dan dari aspek lapangan kerja dilihat berdasarkan (jumlah anggota keluarga yang bekerja dan jenis pekerjaan/lapangan kerja dari anggota keluarga yang bekerja) terhadap pengembangan wilayah Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun.

#### **Pelayanan**

Berdasarkan hasil penelitian dampak relokasi Pusat Pemerintahan Kabupaten Simalungun terhadap Pengembangan Wilayah berdasarkan pelayanan administrasi dengan uraian sebagai berikut:

##### **a. Keterjangkauan Pelayanan (*affordability*)**

Aspek keterjangkauan pelayanan dalam pengurusan meliputi- waktu yang dibutuhkan, biaya pengurusan serta kesesuaian biaya dengan yang ditetapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lama waktu pengurusan sebelum relokasi sebagian besar responden menyatakan > 15 baik, yaitu 61 orang (64,9%), setelah relokasi juga sebagian besar responden menyatakan > 15 -hari, yaitu 64 orang (68,1%). Biaya pengurusan sebelum relokasi sebagian besar responden menyatakan > Rp-30.000, yaitu 56 orang (59,6%), dan setelah relokasi sebagian besar responden juga menyatakan biaya pengurusan sebesar > Rp.30.000, yaitu 52 orang (55,3%). Kesesuaian biaya pengurusan sebelum relokasi menurut sebagian besar responden menyatakan lebih mahal dan yang ditetapkan, yaitu 62 orang (66,0%), setelah



relokasi juga sebagian besar responden menyatakan lebih mahal dari yang ditetapkan, yaitu 59 orang (62,8%). Keterjangkauan pelayanan dalam pengurusan sebelum dan setelah relokasi pusat pemerintahan Kabupaten Simalungun disajikan pada Tabel 5.

**Tabel 5. Keterjangkauan Pelayanan &Pengurusan Sebelum dan Setelah Relokasi Pusat Pemerintahan Kabupaten Simalungun**

No	Jawaban	Sebelum		Setelah	
		F	%	F	%
1	Sangat baik	23	23.23	23	23.23
2	Baik	37	37.37	47	47.47
3	Biasa Saja	28	28.28	18	18.18
4	Kurang Baik	8	8.08	8	8.08
5	Tidak Baik	3	3.03	3	3.03
Jumlah		99	100	99	100

Sumber: Data Primer, 2016

**b. Kecukupan pelayanan (*recoverability*)**

Aspek kecukupan. pelayanan dalam pengurusan meliputi dinas teknis melayani, pelayanan petugas, kesopanan petugas serta kenyamanan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan dings yang melayani pengurusan sebelum relokasi, yaitu 73 orang (77,7%), setelah relokasi juga sebagian besar responden menyatakan Dinas Teknis, yaitu 72 orang (76,6%).

Pelayanan petugas dalam pengurusan sebelum relokasi, sebagian besar responden menyatakan lambat, yaitu 56 orang (59,6%), demikian juga setelah relokasi sebagian besar responden menyatakan pelayanan petugas lambat, yaitu 57 orang (60,6%). Kesopanan petugas saat pengurusan sebelum maupun setelah relokasi menurut sebagian besar responden adalah sopan, yaitu 38 orang (40,4%)- Kenyamanan lingkungan pelayanan sebelum relokasi menurut sebagian besar responden adalah tidak nyaman, yaitu 56 orang (59,6%), setelah relokasi juga sebagian besar responden menyatakan nyaman lingkungan nyaman, yaitu 53 orang (56,4%), seperti pada. Tabel 6

**Tabel 6. Kecukupan Pelayanan dan Pengurusan Sebelum dan Setelah Relokasi Pusat Pemerintahan Kabupaten Simalungun**

No	Jawaban	Sebelum		Setelah	
		F	%	F	%
1	Sangat Sopan	11	11.11	11	11.11
2	Sopan	12	12.12	32	32.32
3	Biasa Saja	53	53.54	33	33.33
4	Kurang Sopan	18	18.18	18	18.18
5	Tidak Sopan	5	5.05	5	5.05
Jumlah		99	100	99	100

Sumber: Data Primer, 2016

**c. Kesesuaian pelayanan**

Aspek kesesuaian pelayanan dalam pengurusan meliputi: prosedur pengurusan, persyaratan yang dibutuhkan, penjelasan petugas dan kedisiplinan petugas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan prosedur pelayanan sebelum relokasi melalui perantara, yaitu 56 orang (59,6%), setelah relokasi Juga sebagian besar responden menyatakan melalui perantara, yaitu 51 orang (54,3%). Persyaratan dalam pengurusan sebelum relokasi, sebagian besar responden menyatakan administrasi tidak terbuka, yaitu 49 orang (52,12%), namun setelah relokasi sebagian besar responden menyatakan administrasi terbuka, yaitu 56 orang (59,6%). Penjelasan petugas saat pengurusan sebelum, maupun setelah relokasi menurut sebagian besar responden adalah jelas, yaitu 38

orang (40,4%). Kedisiplinan petugas dalam pengurusan sebelum maupun setelah relokasi menurut sebagian besar responden tidak tepat waktu, yaitu. 60 orang (63,8%) sebelum relokasi dan 56 orang (59,6%) setelah relokasi seperti pada Tabel 7.

**Tabel 7. Kesesuaian Pelayanan dalam Pengurusan Sebelum dan Setelah Relokasi Pusat Pemerintahan Kabupaten Simalungun**

No	Jawaban	Sebelum		Setelah	
		F	%	F	%
1	Sangat Displin	11	11.11	11	11.11
2	Displin	12	12.12	32	32.32
3	Biasa Saja	53	53.54	33	33.33
4	Kurang Displin	18	18.18	18	18.18
5	Tidak Displin	5	5.05	5	5.05
Jumlah		99	100	99	100

Sumber: Data Primer, 2016

Menurut (Rahman, 2002), salah satu katagori organisasi berdasarkan tugas pokok atau mist adalah birokrasi pelayanan, yaitu unit organisasi pemerintahan yang pada hakekatnya merupakan bagian atau berhubungan dengan masyarakat. Fungsi utamanya adalah *service* (pelayanan) langsung kepada masyarakat. Kualitas birokrasi pelayanan yang ingin dicapai melalui pengaturan struktur-tural seperti hirarki kewenangan, pembagian kerja, profesionalisme, tata kerja, dan sistem pengupahan yang kesemuanya berlandaskan peraturan yang berlaku. Pengertian tersebut, sering dianggap terlampau ideal, karena sering muncul pertanyaan apakah mungkin sosok birokrasi yang demikian dapat sepenuhnya terwujud, karena ditentukan oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya, misalnya peraturan perundang-undangan, institusi, pemberdayaan dan juga mentalitas masyarakat.

Hasil uji statistik *t-test* menunjukkan tingkat perbedaan yang nyata variabel ketedangkauan ( $t - \text{hitung} = 2.636$ ), variabel kecukupan ( $t - \text{hitung} = 5.086$ ) dan variabel kesesuaian ( $t - \text{hitung} = 5.489$ ) lebih besar dari  $t_{\text{tabel}} = 1,986$ , artinya terdapat perbedaan yang positif dan signifikan keterjangkauan pelayanan (*affordability*), kecukupan pelayanan (*recoverability*) dan kesesuaian pelayanan (*replicability*) sebelum dan setelah relokasi pusat pemerintahan Kabupaten Simalungun dalam pelayanan pengurusan dengan nilai signifikansi sebesar 0,010 variabel keterjangkauan, 0,000 variabel kecukupan dan 0,000 variabel kesesuaian. Hal ini menunjukkan bahwa relokasi pusat pemerintahan Kabupaten Simalungun memberi dampak terhadap kualitas pelayanan publik, untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 8.

**Tabel. 8. Perbedaan Keterjangkauan Pelayanan (*Affordability*), Kecukupan Pelayanan (*Recoverability*) dan Kesesuaian Pelayanan (*Replicability*) Pelayanan Pengurusan Sebelum dan Setelah Relokasi**

Pelayanan Pengurusan	Keterjangkauan	Kecukupan	Kesesuaian
Sebelum Relokasi	2,79	1,49	1,97
Setelah Relokasi	2,94	1,81	2,21
Perbedaan rata-rata	0,15	0,32	0,24
Signifikansi	0,010	0,000	0,000
t-hitung	2,636	5,086	5,489
t-Uji	1,986	1,986	1,986

Sumber: Diolah dari Data Primer, 2016

Hasil penelitian yang dilakukan terhadap 145 siswa di Kecamatan Raya, menunjukkan seberapa besar hubungan antara pekerjaan orangtua, penghasilan orangtua, tanggungan orang tua, jarak tempat tinggal, waktu tempuh ke sekolah, dan fasilitas sekolah terhadap minat siswa dalam memilih sekolah atau program studi pilihan.

## **PEMBAHASAN**

Strategi pengembangan struktur ruang wilayah Kabupaten Simalungun secara khusus dimaksudkan untuk mengarahkan sistem pusat–pusat permukiman sesuai dengan heirarki dan fungsinya untuk mengembangkan wilayah secara terintegrasi dengan cara memacu pengembangan terbentuknya kota–kota di pusat perdesaan serta membentuk struktur kegiatan perkotaan. Strategi pengembangan struktur ruang wilayah dapat dilakukan dengan meningkatkan aktivitas wilayah dengan penyediaan sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung aktivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah terutama untuk kegiatan pertanian, perdagangan, jasa dan industri yang mendukung kegiatan pertanian.

Strategi pengembangan sistem perdesaan dapat dilakukan dengan cara :

Memperlakukan sistem perdesaan sebagai hinterland dalam sistem perkotaan dalam kerangka sistem perwilayahan pembangunan di Kabupaten Simalungun. Sebagai upaya pengintegrasian sistem perdesaan ke dalam sistem perwilayahan Kabupaten Simalungun agar tercipta interaksi desa-kota yang harmonis, yang dicerminkan dari berfungsinya pusat-pusat perdesaan dalam suatu kesatuan sistem pusat-pusat kegiatan di wilayah Kabupaten Simalungun. Mengembangkan sektor-sektor primer perdesaan, yang meliputi pertanian perkebunan, rakyat , hortikultura dan sawah.

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional maupun regional Provinsi Sumatera Utara, untuk Kabupaten Simalungun PDRB menurut harga konstan secara agregat terjadi perubahan dari tahun 2008 sebesar Rp. 2.729.450.330.000 naik menjadi Rp. 2.893.427.210.000 di tahun 2009 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp. 163.976.880.000 atau mengalami laju pertumbuhan sebesar 6,01 % laju pertumbuhan tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2008 sebesar 5,69 % dan lebih tinggi apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara yang mencapai sebesar 4,71 %. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor jasa-jasa yakni mencapai 8,22 %, hal ini didorong oleh kebijaksanaan pemerintah pusat dalam menaikkan belanja pegawai yang berdampak pada kenaikan subsektor pemerintahan dan pertahanan disusul kemudian sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan yakni sebesar 7,04 %. Sedangkan kenaikan terkecil dialami oleh sektor industri pengolahan yaitu sebesar 5,06 % yang berarti lebih rendah apabila dibandingkan dengan kenaikan pada tahun 2008 yang mencapai sebesar 6,88 %, kondisi ini sebagai akibat dari pengaruh krisis global yang berdampak pada sektor industri khususnya industri yang memiliki pasar luar negeri karena mengalami penurunan permintaan, disamping itu juga area pasar bebas kawasan ASEAN dengan negara China yang sudah berlaku sehingga berbagai jenis produk dengan harga yang murah dari luar negeri bebas memasuki pasar regional maupun nasional, sehingga produk nasional yang tidak siap bersaing tentu saja akan mengalami kesulitan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Sedangkan laju pertumbuhan perekonomian pada tahun 2009 atau besaran PDRB menurut harga berlaku di Kabupaten Simalungun secara agregat adalah mencapai sebesar Rp. 5.871.144.810.000,- yang memperlihatkan adanya peningkatan apabila dibandingkan dengan

tahun 2008 yang mencapai sebesar Rp. 5.170.914.120.000,- sehingga terjadi kenaikan sebesar 13,54 % atau secara agregat naik sebesar Rp. 700.230.690.000,- Kenaikan tersebut lebih didorong oleh naiknya harga barang dan jasa yang terjadi pada tahun 2009, sehingga pertumbuhan ekonomi menurut harga berlaku lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan menurut harga konstan. Jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan tahun 2008 sebesar 14,59 % maka pertumbuhan tahun 2009 relatif lebih kecil. Pada umumnya laju pertumbuhan ekonomi menurut harga berlaku dipengaruhi oleh kenaikan harga-harga barang dan jasa, hal ini dapat terlihat dari besaran angka inflasi PDRB pada tahun 2008 yang mencapai sebesar 7,11 %. Pertumbuhan tertinggi menurut harga berlaku terjadi pada sektor jasa-jasa sebesar 17,53 % , selanjutnya pada urutan kedua pertumbuhan tertinggi adalah pada sektor pertanian yakni sebesar 14,22 % hal ini disebabkan oleh banyaknya warga Kabupaten Simalungun yang merantau baik secara individu, keluarga ataupun kelompok manajemen yang bersama-sama untuk berjualan barang - barang lokal terutama kosmetik, peralatan dapur produk kabupaten Simalungun maupun pakaian jadi lebih spesifik lagi berjualan batik antar pulau dengan tujuan utama adalah daerah-daerah pedalaman Kalimantan, Sulawesi, Irian maupun Timor Leste, setiap barang dagangan habis mereka pulang sambil berbelanja dan menginvestasikan uangnya di Kabupaten Simalungun ataupun menjadi tenaga kerja di luar negeri terutama di Arab Saudi, Taiwan, Singapura dan Malaysia yang selalu mengirimkan uangnya ke tanah air serta jika dilihat dari sektor pertanian Kabupaten Simalungun yang mayoritas lahannya digunakan untuk pertanian produksi padinya selalu surplus sehingga merupakan lumbung padi bagi Sumatera Utara, maupun nasional, pertumbuhan terkecil terjadi pada sektor industri pengolahan sebesar 10,35 %. Karena pada umumnya industri yang berkembang di Kabupaten Simalungun adalah industri agroindustri.

Pengelompokan sektor yang lain adalah pengelompokan yang didasarkan atas output maupun input dari asal terjadinya proses produksi untuk masing-masing sektor ekonomi, yaitu sektor primer apabila output masih merupakan proses tingkat dasar, sektor sekunder yakni jika input berasal langsung dari sektor primer dan output sudah melalui proses lebih dari proses tingkat dasar, sedangkan sektor tersier apabila output lebih dominan pada pelayanan/jasa.

- a) Kelompok primer : Sektor pertanian dan pertambangan/penggalian
- b) Kelompok sekunder : Sektor industri, listrik / gas dan air bersih, bangunan /kontruksi.
- c) Kelompok tertier : Sektor perdagangan, pengangkutan/komunikasi, bank dan lembaga keuangan lainnya, pemerintahan umum/hankam dan jasa - jasa.

Faktor aksesibilitas akan berpengaruh besar kepada berbagai sektor kegiatan baik ekonomi maupun sosial karena akan menentukan tingkat kemudahan dan kelancaran pergerakan orang dan barang dari suatu wilayah ke wilayah lainnya. Untuk itu, pertimbangan aksesibilitas dalam setiap keputusan lokasi suatu kegiatan akan menjadi mutlak karena akan sangat berdampak kepada operasional dari kegiatan itu sendiri. Berdasarkan hasil analisis/penilaian terhadap jarak terjauh yang dilayani oleh pusat pelayanan yaitu Kabupaten Simalungun terhadap masing-masing ibukota kecamatan sebagai fungsi pusat pelayanan masyarakat sejauh 103 kilometer yaitu kecamatan Ujung Padang sedangkan yang terdekat Kecamatan Purba sejauh 13 kilometer hal ini sangat berpengaruh dalam menentukan optimal tidaknya suatu ibukota dari suatu wilayah administrasi pemerintahan dengan menggunakan jarak antar ibukota kecamatan.

Kota ini sebagai pusat pelayanan bagi daerah hinterland kabupaten Simalungun, sehingga relatif berkembang lebih cepat daripada subwilayah yang berada di pedalaman atau tidak dilewati jalur lintas utama tersebut dalam hal ini jarak jangkauan pelayanan yang biasa ditempuh dari Kecamatan Pamatang Raya Ke Kecamatan lain di wilayah Kabupaten Simalungun.

Secara teoritis jalan utama yang menghubungkan Raya dengan Wilayah sekitar dapat dikategorikan ke dalam jalan Propinsi yang artinya segala pengelolaan jalan menjadi kewenangan Propinsi. Tipe jalan propinsi ini relatif baik untuk pengembangan wilayah pada daerah yang cukup luas, yang kemudian saling dihubungkan oleh jalan kolektor primer dan jalan lokal primer lainnya hanya saja, kualitas jaringan jalan tersebut saat ini sebagian berada dalam kondisi sedang dan rusak ringan dengan akses dan orientasi pergerakan melintasi wilayah Kabupaten Simalungun dengan Kabupaten Karo, Dairi dan Pak Pak barat melewati Kecamatan Raya, sedangkan jalan lokal primer kondisinya belum memungkinkan untuk transportasi kendaraan besar dengan intensitas yang padat akibatnya ialah sangat terbatasnya dukungan jaringan jalan alternatif bagi aktivitas penduduk di Kecamatan Raya . Oleh karena itu, umumnya pergerakan orang, barang, dan jasa di Kecamatan Raya tetap saja memanfaatkan jaringan jalan utama yang sudah ada dengan memperhatikan faktor kedekatan jarak.

Namun jika dicermati lebih jauh, sebenarnya dengan keberadaan jaringan jalan alternatif yang tersebar sekitar kecamatan Raya serta rencana pembuatan jalur lingkaran maka sangat terbuka harapan di masa yang akan datang untuk menjadikan Kecamatan Raya sebagai daerah transit maupun perlintasan utama dari berbagai route perjalanan dengan cara atau kebijakan meningkatkan tipe perkerasan jalur jalan-jalan alternatif, disamping memperbaiki kondisi ruas jalan utama saat ini, sehingga pola jaringan jalan lingkaran dalam Kecamatan Raya perlu diperhatikan.

Dampak dari banyaknya permukiman baru akan memberi akibat relokasi dan tentunya akan membawa bangkitan ekonomi baru bagi wilayah penelitian karena akan terjadi peningkatan permintaan akan kebutuhan-kebutuhan primair, sekundair maupun tersier hal ini terbukti dengan semakin menjamurnya mini market, ruko, rumah makan, tempat- tempat hiburan dan wisata serta lain sebagainya. Berdasarkan temuan hasil analisis dalam penelitian ini, jelaslah bahwa Pamatang Raya yang menjadi pusat pelayanan administratif wilayah Kabupaten Simalungun di bagian Barat sangat representatif mewakili kondisi utara bengkawan yang memang kurang potensial untuk dikembangkan, karena keterbatasan sumber daya alam walaupun berdasarkan penilaian analisis di atas secara agregat, kecamatan ini masih kalah jika dibandingkan dengan Kecamatan lainnya Berarti secara ruang wilayah Kecamatan Pamatang Raya mempunyai hirarki kota berupa ordo II berada dibawah Kota Pematangsiantar yang berordo I, dengan demikian Kecamatan Pamatang raya dapat ditetapkan sebagai hinterland bagi Kabupaten Simalungun dalam satu Bagian Wilayah Kota (BWK) berdampingan dengan Kecamatan Panei, Kecamatan Purba, Kecamatan Raya kahean, Kecamatan Dolok Pardamean, yang mana kecamatan-kecamatan tersebut dapat menjadi hinterland bagi Kecamatan Pamatang raya. diharapkan dapat menjadi pusat kegiatan dari daerah-daerah lain yang merupakan daerah perbatasan karena memang letak bagian wilayah kota ini berpusat di Pamatang raya dan berbatasan dengan kabupaten tetangga atau dalam bahasa perencanaan dikatakan hinterland dari Kecamatan

Pamatang raya adalah daerah perbatasan.

Selanjutnya, mengingat semua data yang digunakan dalam analisis yang telah dilakukan adalah data kecamatan, bukan khusus data ibukota kecamatannya saja, maka penentuan apakah pusat pelayanan masyarakat ditetapkan hanya di kabupaten Simalungun saja atau mulai dibuka beberapa akses pelayanan di Kecamatan Pamatang raya mengingat jarak antara Kabupaten Simalungun dengan Kecamatan Pamatang raya relatif jauh. Di sini, terhadap Kecamatan Pamatang raya yang terpilih sebagai lokasi optimal pusat pelayanan masyarakat di sebelah utara Kabupaten Simalungun perlu ditindaklanjuti dengan melakukan kajian kota alternatif ataupun revisi penyusunan tata ruang wilayah yang lebih komprehensif mengingat kedudukan Pamatang Raya secara geografis letak lokasi tersebut bersebelahan satu dengan yang lain. Sehingga kajian yang agak melebar atau agak sedikit regional perlu segera ditindaklanjuti dengan tata ruang kawasan atau kawasan pengembangan ekonomi terpadu atau lebih spesifik lagi. Menjadi lebih luas lingkungannya dan memberi peluang pengembangan ekonomi wilayahnya ke depan. Posisi strategis Kecamatan Pamatang raya yang berada di perempatan berfungsi sebagai pusat transit karena keberadaannya yang persis terletak pada sumbu utama jalan propinsi yang menghubungkan antar kabupaten perlu dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan sektor perdagangan dan jasa serta dimungkinkan untuk menggalang sinergi kebijakan dengan kabupaten tetangga maupun kecamatan tetangga yang secara geografis mempunyai sifat yang 'sama-sama agraris' serta sangat membuka peluang bagi pembentukan kerjasama pengembangan wilayah terpadu dalam suatu kawasan saling terkait dan bersinergi bagi kemajuan bersama. Kerjasama ini sangat mungkin untuk dijajagi dalam perencanaan tata ruang wilayah perbatasan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bersama dengan daerah sekitar

## **KESIMPULAN**

1. Relokasi pusat pemerintahan Kabupaten Simalungun memberi pengaruh terhadap Pelayanan Masyarakat. Dari hasil analisis Chi Square diperoleh hasil adalah variable pelayanan yang paling utama dipengaruhi oleh relokasi di Kecamatan Raya dengan nilai Chi Square 47.367.
2. Jika dilihat dari segi pengembangan wilayah Kabupaten Simalungun yang begitu luas maka relokasi pusat pemerintahan dapat dijadikan sebagai prioritas pada pengembangan wilayah atas Simalungun, karena Kota Raya merupakan pengelompokkan lokasi pengembangan di wilayah atas Simalungun. Namun demikian hal yang paling penting untuk diingat adalah bahwa perencanaan pembangunan pusat pertumbuhan haruslah tetap mengacu kepada standar pengembangan wilayah yang ada.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Andiaskiton, M. (2019). Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Smart*, 3(2), 68-80.
- Anggraini, T. (2020). Analisis Kinerja Birokrasi di Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Studi Kasus: Relokasi Pasar Rakyat oleh Dinas Koperasi, UMKM, dan Pengelolaan Pasar Tahun 2016). *Jurnal Wacana Kinerja*, 23(1), 101-118.



- Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktik*. PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Simalungun. 2005. *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2005-2025*. Penerbit : Bappeda Kabupaten Simalungun.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2010. *Simalungun Dalam Angka*
- Danil, M. (2016). Analisis Tentang Konsolidasi Tanah pada Desa Pematang Simalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun. *Premise Law Journal*, 21, 165034.
- Intan Suswita, Darwin Damanik, & Pawan Darasa Panjaitan. (2020). Pengaruh Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Simalungun. *Jurnal Ekuilnomi*, 2(1), 1–11. <https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v2i1.346>
- Maulana, R. (2019). *Analisis Dampak Kebijakan Otonomi Khusus Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh (Doctoral dissertation)*.
- Ritonga, J., & Girsang, R. M. (2019). Pengaruh Kreativitas Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Peserta BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pematangsiantar. *Manajemen : Jurnal Ekonomi*, 1(1). <https://doi.org/10.36985/manajemen.v1i1.36>
- Sugiyono. 2008. *Statistika untuk Penelitian*. Alfabeta. Bandung.
- Suryana. 2000. *Ekonomi Pembangunan*. Salemba Empat. Jakarta.
- Tarigan, W. J., Girsang, R. M., & Martina, S. (2022). Pengaruh Lingkungan Kerja Fisik Dan Non Fisik Terhadap Produktivitas Karyawan PT Astra Honda Pematangsiantar. *Manager: Jurnal Ilmu Manajemen*, 5(3), 363-371
- Tatang Syahban Adi Syahputra, Purba, E., & Damanik, D. (2021). Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Subulussalam. *Jurnal Ekuilnomi*, 3(2), 104–114. <https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v3i2.261>
- Yanti, M. (2022). *Profesionalisme Aparatur Negara Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Di Kantor Camat Sekernan Kabupaten Muaro Jambi (Doctoral dissertation, Ilmu Pemerintah)*.